

AKTUAL

Edisi 35 | 7 - 21 Mei 2015

China Commitment



KAA ke-60 menjadi awal masuknya investasi besar Tiongkok di Indonesia. Pinjaman sebesar US\$ 50 Miliar diterima Indonesia. Apa tujuan Tiongkok sebenarnya?

RP 30.000

ISSN 2337-8395





PIJAK PROFETIS! PIKIR PROGRESIF!

Selama 3 tahun, Aktual selalu memiliki kecepatan dan ketepatan dalam pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, menyajikan informasi terhangat, terakual serta dapat dipercaya. Reporter yang kapabel di bidangnya dan tersebar di Jakarta serta memiliki kontributor di seluruh ibu kota provinsi, Aktual selalu menempatkan diri menjadi teman bagi pembaca selama 24 jam dalam 7 hari seminggu. Aktual terus berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam meliput peristiwa baik nasional maupun internasional. Kami menjadikan Aktual sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang dan menghibur.



3rd ANNIVERSARY

aktual.co
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

Caprof
Media Negeri
enlightenment and harmony

AKTUAL

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief

SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa

REDAKTUR SENIOR Dha Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dha Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhy

DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhy

REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Neby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Tri Harningsin

STAF REDAKSI Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlam (Majalah), Fahrul Anwar, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

IT Radius Rasmangun

DESAIN GRAFIS Shoiful Hadi, Nelson Natis

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makasar), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhsin (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febrianto

DIREKTUR OPERASIONAL Ririn Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkifli

SIRKULASI Widhi Maulana

MARKETING OFFICER Ranie Anggoro, Rhiza Aditya

ALAMAT REDAKSI

PT Caprof Media Negeri
Cawang Kencana Building
1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang
DKI Jakarta 13630 Indonesia
No Telp : (021) 8005520
Fax : (021) 80886466
Email : majalah@aktual.co
iklan@aktual.co

aktual.co
TERHANGAT TERPERCAYA

aktualTV

Kualitas Tiongkok

Konferensi Asia-Afrika ke-60 sukses digelar oleh Indonesia pekan lalu. Momen bersejarah kembali tercipta dalam hajatan yang digelar di Jakarta dan Bandung tersebut. Terbangunnya hubungan erat antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) salah satunya.

Sukar membantah anggapan bahwa dalam kongres tersebut Presiden Joko Widodo memberikan ruang khusus untuk Presiden RRT Xi Jinping. Sejumlah momen merekam keduanya tampak sebagai magnet konferensi kali ini. Semua bukan tanpa sebab.

Jinping sebagai Sekjen Partai Komunis Tiongkok memiliki misi besar yang disambut oleh Jokowi. Pidato pembukaan konferensi yang dibacakan Jokowi tentang tata dunia yang tidak adil harus dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa dan dunia dalam arti luas.

Dari ungkapan ketidakadilan oleh PBB serta tata ekonomi yang timpang oleh IMF, ADB dan Bank Dunia itulah Tiongkok memberikan solusi. Yakni melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Sebuah siasat Tiongkok membentuk lembaga keuangan global untuk mengikis dominasi IMF, ADB dan

Bank Dunia.

Disela konferensi Jinping melalui AIIB sepakat menggelontorkan dana sebesar US\$ 50 Miliar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jokowi menerima pinjaman tersebut. Bahkan Dengan cepat Indonesia sudah memutuskan apa saja yang akan dibangun melalui pinjaman tersebut.

Jalan raya sepanjang 1000 kilometer, dua pelabuhan, sampai kereta cepat akan dimiliki Indonesia dalam waktu tak lama lagi. Namun kita punya ingatan buruk tentang produk Tiongkok. Alangkah kebetulan ingatan buruk itu terjadi saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ingatan tentang bus Trans Jakarta yang sering terbakar.

Bus yang dipesan dari Tiongkok itu terbukti memiliki kualitas yang buruk. Belum genap satu tahun banyak armadanya yang usang. Bahkan sudah puluhan bus terbakar tanpa sebab yang jelas.

Tentu kita ingin punya jalan raya yang semakin panjang hingga semua daerah terhubung.

Kita ingin pelabuhan yang memadai.

Kita ingin kereta super cepat. Tapi kita tidak ingin semuanya itu cepat rusak.

Selamat Membaca. ■



Laporan Utama

22 Ayo Bongkar Kabinetmu Jokowi

Pidato politik Megawati ibarat sebuah perintah kepada Jokowi sebagai kader partai untuk membenahi kabinetnya. mengemuka.



24 Melawan Trio Macan Istana

Menurut Effendy Simbolon kabinet yang dibentuk Jokowi sesak dipenuhi oleh kelompok neoliberal yang berorientasi pada ekonomi pasar.



28 Golkar Masuk, Gusur Siapa?

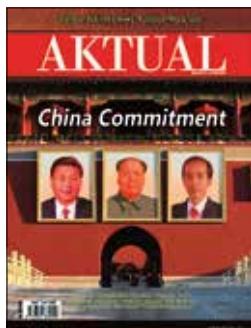
Muhammad Misbakhun mengatakan, kinerja tim ekonomi Jokowi-JK memang sudah harus dievaluasi karena dalam enam bulan pemerintahan sudah banyak menelurkan kebijakan tidak bagus.



Laporan Khusus

52 Jokowi Memukau Dunia Tanpa Data

Mendapatkan pujian, Jokowi malah "mengoreksi" pidatonya.



56 Komitmen Tiongkok

Pilihan pemerintah mengandeng Tiongkok untuk proyek infrastruktur mendapat komentar kritis dari sejumlah kalangan.

60 Awas, Siasat Tiongkok

Kalau tidak mewaspada tujuan strategis Tiongkok menguasai geopolitik jalur sutera termasuk di Indonesia, melalui kedudukannya sebagai investor Tiongkok akan menguasai sistem pengamanan maritim Indonesia, melalui penguasaan akses pelabuhan dan bandara.

64 Kemlu Dikebiri, Jokowi Tutup Telinga

Kemlu sejatinya mempunyai wilayah strategis dalam penyelenggaraan KAA, selayaknya diberi porsi lebih oleh Presiden.

66 Gedung Merdeka Bocor Panitia KAA Panik

Cak Roeslan dan belasan petugas berjuang keras mengeringkan area dalam gedung yang basah terkena air dengan alat seadanya.

10 NASIONAL

Harapan Kerja Berujung Petaka

Siapa Mary Jane yang diputuskan ditunda eksekusinya oleh Jokowi?

14 POLITIK

Pinjam Perahu Milik Seteru

Kegelisahan kepala daerah di sejumlah wilayah ini buntut dari dualisme kepemimpinan Partai Golkar.

18 POLITIK

HMP Ahok Tak Bisa Ditawar

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi bola liar yang membingungkan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

32 HUKUM

Ada yang Hilang di Dakwaan Sutan

Selain hilangnya nama Ibas dalam dakwaan Sutan, jaksa juga tidak menyebutkan peran mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

38 EKONOMI

Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK, Mencekik Leher Rakyat

Harga BBM sejak pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla naik-turun.

40 EKONOMI

Blusukan Itu Berbuah Kemelaratan

Kisah heroik enam bulan silam itu seolah tinggal kenangan.

42 EKONOMI

Timor Leste Kembangkan 3 sektor Utama Investasi

Pemerintah Timor Leste saat ini sedang mengembangkan tiga sektor utama untuk menambah jumlah investor.

46 ENERGI

Pertamina Ketularan Petrabras

Pertamina berasalan laba bersih minus Rp2,7 triliun pada Januari-Februari 2015 karena kerugian hilir.

68 GEOPOLITIK

Cara Kolombia Menangkis Tekanan Isu HAM

Dokumen itu ternyata tidak hanya berkuat masyarakat pemerintah dan pemberontak. Namun peran besar asing (Amerika Serikat) juga terkuak dengan jelas.

70 INTERNASIONAL

Semangat Baru Membela Palestina

Berbagai krisis di Timur Tengah sempat menenggelamkan isu Palestina. Namun, forum Konferensi Asia Afrika di Bandung mengangkat kembali dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

3 Tatap Redaksi	12 Kilas Nasional	50 Kilas Energi
5 Terkini	20 Kilas Politik	74 Kilas Nusantara
6 Kaki Hari	36 Kilas Hukum	76 Oase
8 Lensa Aktual	44 Kilas Ekonomi	

Australia Tarik Dubes Pasca Eksekusi Mati

Perdana Menteri Australia Tony Abbott memastikan Australia segera menarik Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia di Jakarta. Abbott mengatakan keputusan ini diambil karena Australia menyesalkan keputusan pemerintah Indonesia yang tetap mengeksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Kami menyesal dengan apa yang telah terjadi dan kami tidak dapat menganggap ini sebagai persoalan biasa," kata Abbott dalam konferensi pers di Canberra seperti dilansir dari ABC.

Abbott melanjutkan, "Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat keluarga Chan dan Sukumaran, kami akan menarik Dubes kami."

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson akan kembali ke Australia akhir pekan ini.

"Penarikan Dubes Australia menunjukkan kekecewaan kami atas perlakuan yang diterima warga negara kami," ujar Bishop dikutip dari Sydney Morning Herald.

Tony Abbott mengatakan Australia menganggap hubungan bilateral Indonesia-Australia sebagai hal yang sangat penting. Namun, Abbott melanjutkan, peristiwa ini telah merusak hubungan itu.

Sebelumnya, Australia tidak menarik dubesnya ketika warga negara Australia mendapat hukuman mati. Pada 2005 lalu, Australia membiarkan warga

negaranya, Van Tuong Nguyen, dijatuhi hukuman mati atas pidana narkoba di Singapura.

Duo gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati pada Rabu (29/4/2015) dini hari di Lapangan Tembak Limus Buntu, Nusakambangan, Jawa Tengah. Keduanya dinyatakan meninggal dunia 27 menit setelah eksekusi dilaksanakan. Soemitra

Bareskrim Tangkap Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (1/5) dini hari di rumahnya daerah Kelapa Gading, Jakarta.

Penangkapan ini terkait dengan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus penembakan pelaku pencurian sarang burung walet 12 tahun silam. Saat dia berdinas masih sebagai polisi di Bengkulu tahun 2004.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso menegaskan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan

prosedur. "Saya kira beretika, biasa saja. Hal itu kita buktikan semua kita video-kan, proses itu kita video-kan, nanti kita lihat," kata Komjen Buwas di Mabes Polri, Jalan

Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015).

Budi bahkan mencontohkan saat KPK melakukan penyidikan dalam kasus



korupsi yang menjerat mantan Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Djoko Susilo. Saat itu KPK melakukan penggeledahan malam hari di kantor Dirlantas Polri, Polri menurut Budi mematuhi kewenangan KPK. "Itu menghormati penegakan hukum. Jadi jangan ada kata-kata *lebay*. Jadi disini tidak ada dewa, tidak ada yang super. Kita ini manusia biasa yang patuh dan taat kepada UU dan hukum. Jikalau kita melakukan pelanggaran hukum, ya harus bertanggung jawab," ujar dia.

Pimpinan KPK menilai penangkapan terhadap Novel dapat kembali merusak hubungan KPK-Polri yang saat ini terus dibenahi pasca penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut Plt Pimpinan KPK Johan Budi, dia dan empat pimpinan lain akan menjaminkan diri agar Novel tidak ditahan.

Namun jika permohonan penangguhan penahanan tersebut ditolak, semua pimpinan akan mengundurkan diri. "Memang ada wacana bahwa ada pimpinan KPK bukan hanya 1 tapi bisa juga 5 bila penahanan tetap dilakukan karena upaya-upaya yang sudah dikondisikan dengan baik bisa berantakan," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (1/5/2015). Soemitra

INDONESIA, SULUH KEBANGKITAN ASIA-AFRIKA (1)



Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika bermula dari pendirian Indonesia mengenai pentingnya membangun kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika. Negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang masih terjajah di kedua benua ini memerlukan ikatan kerjasama untuk memajukan perdamaian dan kesejahteraan. Urgensi kerjasama Asia-Afrika itu kian mendesak guna menanggapi tantangan dan realitas aktual yang dihadapi negara-negara Asia-Afrika: Pertentangan antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (komunis) yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia; sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika menjadi korban imperialisme-kolonialisme; perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan; serta pelaksanaan politik apartheid (diskriminasi) di beberapa negara, terutama di Afrika Selatan.

Dalam pidatonya di muka parlemen pada Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menerangkan bahwa “Kerjasama erat antara negara-negara tersebut tentulah memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal”. Ia kemudian menunjuk pada Piagam PBB yang mengatur kerjasama regional.

Pendirian Indonesia tersebut menemukan jalan perwujudannya, ketika pada bulan April 1954 PM Ali mendapatkan undangan dari PM Sri Lanka (Ceylon), Sir John Kotewala, untuk menghadiri Sidang Panca Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Pakistan, dan Indonesia yang akan diadakan di Kolombo. Sidang ini dipraksai PM Sri Lanka karena

kekhawatiran dan keprihatinannya atas situasi peperangan di Indocina pada waktu itu; meningkatnya agresi komunis di bumi Asia, dan perkembangan persenjataan nuklir. Dalam rangka memenuhi undangan tersebut, PM Ali bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pertengahan April 1954. Seperti dikisahkan oleh Roeslan Abdulgani, dalam pertemuan itu, Presiden Soekarno berpesan kepada PM Ali agar pertemuan lima Perdana Menteri di Kolombo itu dapat meluaskan gagasannya ke arah kerjasama regional di tingkat Asia-Afrika, dan memperingatkan agar Indonesia jangan sampai mundur dalam soal ini. “Ingat, Ali, ini adalah cita-cita bersama; hampir 30 tahun yang lalu kita di Pergerakan Nasional melawan penjajahan, kita sudah mendengungkan solidaritas Asia-Afrika,” pesan Bung Kurni. Yang diingatkan menimpal, “Bung Kurni,” kata Pak Ali, “Saya harap jangan Bung Kurni menyamakan sikap hati-hati sebagai sikap nguler kambang. Sebaliknya kita jangan grusa-grusu. Saya tak akan menyamakan sikap dinamis sebagai sikap grusa-grusu.” Mendengar jawaban Pak Ali, Bung Kurni tersenyum saja; dan dengan senyuman itu, roman muka Pak Ali yang tadinya “agak merengut” jadi cerah kembali, ikut tersenyum (Abdulgani, 2013: 21-23).

Ternyata tidak mudah untuk menggolkkan gagasan Konferensi Asia Afrika itu. Baru dalam persidangan keenam, pada 30 April sore, Pak Ali berkesempatan mengajukan usulnya tentang, “Suatu Konferensi yang sama hakekatnya dengan Konferensi Kolombo sekarang, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Afrika lainnya.” Reaksi para

Perdana Menteri atas usul tersebut bersifat skeptis. Roeslan Abdulgani melukiskan:

PM Burma U Nu dan PM Pakistan Moh Ali agak ragu-ragu, tapi tidak berani menolak terang-terangan. Mereka mau memberikan persetujuannya, tapi hanya dalam prinsipnya saja. PM Sri Lanka Sir John Kotewala lebih ragu-ragu lagi. Sedangkan PM India Nehru mengatakan bahwa terlalu banyak kesulitan untuk melaksanakan gagasan konferensi demikian. Lagi pula ikhtiar-ikhtiar terdahulu untuk mengorganisasi Konferensi sebesar dan seluas gagasan Indonesia ‘had proved abortive’, mati sebelum dilahirkan! Jelas sekali: semua skeptis dan pesimistik.

Tetapi Pak Ali tidak mundur; dan tidak melepaskan usulnya. Ia mengajukan persetujuan minimal: “Saya akan merasa puas apabila Konferensi Kolombo dapat menyetujui bahwa Indonesia akan mensponsori sendiri Konferensi A-A demikian.” Dengan kata lain, jika para Perdana Menteri itu masih pada ragu, berilah kesempatan kepada Indonesia untuk merintis dan memeloporinya, dan jangan menghalanginya. Atas ketetapan hati delegasi Indonesia itu, semua pada mengangguk, dan akhirnya Indonesia diberikan dukungan moral untuk mensponsori Konferensi yang dicita-citakan. Komunike Konferensi Kolombo menyatakan: “Para PM telah membicarakan perlu/tidaknya mengadakan sebuah konferensi A-A, dan menerima baik sebuah usul bahwa PM Indonesia akan menyelidiki kemungkinannya.” Pernyataan ini dicantumkan di bagian terakhir sendiri dari seluruh Komunike Konferensi Kolombo, seakan-akan sekadar embel-embel saja. Namun bagi Indonesia, sesuatu yang boleh jadi dipandang sebagai embel-embel itu justru memberikan dorongan ketetapan hati untuk menaikkan “embel-embel” itu menjadi “umbul-umbul”, untuk dipancangkan di ketinggian demi kehormatan dan kebesaran bangsa (Abdulgani, 2013: 24-25).

Tidak ingin kehilangan

momentum, Kabinet Ali Sastroamidjojo segera menentukan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Semua pemangku kepentingan sibuk; tetapi yang paling sibuk adalah Kementerian Luar Negeri. Rencana perhelatan para pemimpin Asia-Afrika ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sunario dan dibantu oleh seluruh staf dan pegawainya dengan diawasi secara langsung oleh PM Ali sendiri. Pusat roda aktivitas terletak di tangan Sukardjo Wirjopranoto, Kepala Direktorat Asia dan Timur-Tengah dan dalam perkembangannya mendapat topangan penting dari Sekjen Deplu yang baru beberapa bulan menjabat, yakni Roeslan Abdulgani.

Langkah raksasa dimulai dengan mengadakan kontak untuk penjajagan dengan semua negara-negara Asia-Afrika, baik per kawat ke dubes-dubes Indonesia di luar negeri, maupun dengan lisan dan nota dengan para dubes negara-negara A-A di Jakarta. Hasilnya tidak mengecewakan. Reaksi sementara yang masuk pada umumnya sangat mendukung. Tinggal masalahnya bagaimana meyakinkan kembali para pemimpin Konferensi Kolombo, terutama PM Nehru yang besar pengaruhnya di kalangan negara-negara A-A, agar tidak lagi ragu-ragu.

Untuk meyakinkan dukungan para pemimpin Konferensi Kolombo, PM Ali memerlukan berkunjung ke New Delhi pada akhir September 1954. Mendengar tanggapan yang masuk atas rencana Konferensi A-A itu, PM Nehru menjadi antusias. Kedua Perdana Menteri mengeluarkan Joint Statement pada 25 September 1954, di New Delhi: “Kedua Perdana Menteri membicarakan juga usul untuk mengadakan Konferensi A-A, dan mereka berdua sepakat bahwa konferensi demikian sangat perlu, dan akan sangat membantu usaha memperkokoh perdamaian dunia. Seyogianya Konferensi itu diadakan selekas mungkin.” Dalam Joint Statement itu juga ditambahkan

tentang perlunya pada Panca Perdana Menteri Konferensi Kolombo bertemu sekali lagi, dengan tempat seyogianya di Jakarta. PM Ali juga terbang ke Rangoon (Burma) untuk bertemu dengan PM U Nu, dan berhasil mengeluarkan pernyataan bersama yang senada pada 28 September 1954.

Tentang rencana pertemuan kembali para Panca Perdana Menteri sebelum Konferensi A-A dilaksanakan mendapatkan kepastian dari PM Sir John Kotewala, yang dalam bulan Desember 1954 akan berkunjung ke Amerika Serikat. Pada perjalanan pulangnya, beliau bersedia untuk singgah di Indonesia untuk bersama-sama berjumpa dengan para PM yang lain. Pertemuan pada akhirnya dilaksanakan di Istana Bogor pada 28-29 Desember 1954. Pada pidato pembukaan (28 Desember; jam 14.30), PM Ali antara lain melaporkan bahwa dari 14 negara yang telah dijajagi Indonesia (Afghanistan, Mesir, Ethiopia, Iran, Iraq, Yordania, Lebanon, Liberia, Libya, Filipina, Saudi Arabia, Syria, Thailand, dan Yaman), 12 negara telah memberikan jawaban positif. Semua setuju agar Konferensi A-A dapat dilaksanakan selekas mungkin, dan semua setuju tempatnya di Indonesia. Hanya Filipina dan Thailand (dulu Muangthai) yang belum memberikan reaksi. Dilaporkan juga bahwa beberapa negara mengusulkan agar RRC diundang juga. Sedangkan Liberia dan Iraq menganjurkan agar RRC dan Taiwan diundang bersamaan. Beberapa negara lain mengajukan agar Nepal, Tunisia dan Liga Arab diundang. Namun, banyak penolakan terhadap kemungkinan mengundang Israel.

Bukan tanpa hambatan Indonesia untuk memprakarsai Konferensi A-A. Kritikan keras dari majalah terbitan Amerika yang menilai Indonesia tidak akan mampu menggelar acara. Sampai dengan keraguan sejumlah delegasi atas kemampuan Indonesia mengundang peserta. Lantas bagaimana upaya Indonesia? ■





LENSA AKTUAL

2015 Angka Kemiskinan Warga Ibukota Jakarta Meningkat 20%

Seorang ibu memandikan anaknya dengan air sungai ciliwung di Banjar Kanal Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2015). Orang miskin di DKI Jakarta pada September 2014 tercatat sebesar 412.790 orang atau 4,09% dari total penduduk. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya sebesar 371.700 orang atau 3,72%. Menurut hasil survie angka kemiskinan warga Ibukota Jakarta akan meningkat hingga 20% pada tahun 2015.

Aktual - Munzir

Presiden Joko Widodo membuktikan janjinya mengeksekusi terpidana narkoba. Rabu (29/4) pagi, sekitar pukul 00.35 WIB. Delapan dari sembilan terpidana dieksekusi di Lapangan Tembak Limus Buntu, Lembaga Pemasyarakatan Besi, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Mereka adalah Andrew Chan warga kebangsaan Australia, Myuran Sukumaran alias Mark (Australia), Martin Anderson alias Belo (Nigeria), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brazil), Sylvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria) dan Zainal Abidin (Indonesia).

Sedangkan satu terpidana, Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), diputuskan ditunda. Penundaan eksekusi atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino menyusul penyerahan diri pelaku perdagangan manusia yang diduga melibatkan Mary Jane. Pelaku dimaksud adalah Maria Cristina Sergio alias Mary Christine Gulles Pasadilla.

Siapa Mary Jane yang diputuskan ditunda eksekusinya oleh Jokowi? Berikut sekelumit kisah singkat perjalanan yang yang mengantarkannya ke daftar tunggu eksekusi mati di Indonesia.

Kemiskinan membuat hidup Mary Jane (MJ) menderita. Ia terlahir sebagai anak bungsu dari lima bersaudara di Barangay Caudillo, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Filipina. Sejak kecil MJ harus menyaksikan keadaan ekonomi orang tuanya yang serba kekurangan.

Kegembiraan dan suka-cita yang selayaknya dinikmatinya jauh dari kenyataan. Orang tuanya bekerja sebagai penjual minuman keliling dan pengumpul barang-barang bekas. Disela-sela itu, menjadi buruh tani musiman pun dilakoninya.

Wanita bernama lengkap Mary Jane Fiesta Veloso itu lahir pada tanggal 10 Januari 1985. Kedua orang tuanya, Cesar Velosso dan Celia Velosso, hanya mampu



Harapan Kerja Berujung Petaka

mengantarkan pendidikan MJ hingga bangku kelas 1 sekolah lanjutan tingkat pertama.

Mengutip tulisan Iwan Meulia Pirous, antropolog gerakan sosial dan relawan Nation Union of People's Lawyers Filipina, dalam blognya www.iwan.pirous.com dan Lembar Fakta Komnas Perempuan, MJ diketahui melepas masa kegadisannya di usia 16 tahun.

Di usia remaja belia, atau sekitar dua tahun setelah keluar sekolah, atau tahun 2000, ia menikah. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai dua anak, Mark Daniel (12) dan

Mark Darren Velosso (6). Sayang, pernikahannya hanya seumuran jagung.

Kebiasaan suaminya yang sudah main judi dan mabuk-mabukan menjadi penyebabnya. Karena kebiasaan buruknya pula suami MJ pernah dua kali mendekam di balik jeruji besi.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai berpisah, MJ pernah menjalani berbagai pekerjaan. Diantaranya sebagai penjual es lilin, pisang goreng dan penjual telur ballot. Akan tetapi hasil jualan keliling tersebut tidak mencukupi



kebutuhan dapurnya.

Berkaca pada kehidupan orang tuanya sekaligus memperbaiki kehidupannya, MJ bertekad untuk mencari pekerjaan di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan menjadi buruh migran. Riwayat hidupnya di Dubai sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dijalani dalam waktu 10 bulan pada tahun 2009.

Akibat adanya percobaan pemeriksaan memaksanya keluar dari negara yang terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Persia Jazirah Arab tersebut. Desember 2009, ia kembali ke Filipina. Padahal, kontrak kerjanya berlaku dua tahun. Asa memperbaiki kehidupannya justru berujung luka di tangan saat melakukan pembelaan diri dari percobaan pemeriksaan. MJ juga trauma berat.



Terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso mengikuti lomba peragaan busana kebaya saat peringatan Hari Kartini di Lembaga Pernasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Selasa (21/4).

Maria Cristina Sergio alias Mary Christine Gulles Pasadilla.

Empat bulan berselang, tepatnya 19 April 2010, ia ditawari temannya bernama Maria Christina Serio untuk bekerja di Malaysia. Kata Maria, temannya di Negeri Jiran tengah membutuhkan tenaga pembantu rumah tangga. Seperti halnya Tenaga Kerja Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri, MJ harus mengeluarkan biaya administrasi sebelum pemberangkatan.

Uang sebesar 20 ribu peso, satu unit sepeda motor dan sebuah telepon seluler diberikan kepada Maria Christina. Belum cukup, MJ diharuskan membayar sisa pembiayaan administrasi dengan memotong 3 bulan gaji apabila sudah bekerja.

Dengan membawa satu celana dan sepasang baju MJ akhirnya berangkat ke Malaysia. Janji tinggal janji, di Malaysia tidak bisa langsung bekerja. Alasan Maria, ia akan dipekerjakan di tempat lain. Lalu diajaklah MJ berkeliling di seantero Malaysia selama tiga hari oleh Maria.

Lembar Fakta Komnas Perempuan menjabarkan lebih jauh

bagaimana akhirnya MJ dijerat hukum di Indonesia.

Selama tiga hari menginap di hotel, Maria membelikan beberapa potong pakaian pada MJ. Bukan pakaian baru, melainkan pakaian bekas. Lalu MJ meminta dibelikan tas untuk tempat pakaian tersebut.

Dari pembelian tas inilah malapetaka bermula. Ia diajak Maria menemui seseorang di sebuah tempat parkir hotel. Maria berbincang dalam bahasa Inggris dengan temannya yang disampaikan telah membelikan tas ke MJ.

Kecurigaan sempat muncul karena tas terasa berat apabila diangkat. MJ percaya saja dengan penegasan Maria bahwa tas baru memang berat, apalagi tas yang memiliki roda.

MJ diminta ke Indonesia menemui teman Maria selama sepekan dengan bekal uang sebesar 500 USD. Maria berpesan agar sesampainya di Indonesia membeli *sim card* telepon dan menginap di hotel. Lalu menghubungi nomor temannya di Indonesia.

Naas, saat di Bandara Adi Suciyo Jogjakarta, X-Ray mencurigai tas MJ. Petugas membongkar dan tidak menemukan hal aneh. Namun ketika dimasukkan lagi ke dalam mesin X-Ray tampak barang mencurigakan. Maka kemudian koper tersebut dihancurkan dan di bagian dalam yang tersembunyi terdapat 2.6 kg heroin senilai US\$500,000.

Di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sleman, 11 Oktober 2010, MJ divonis hukuman mati. Pada tingkat banding, 10 Februari 2011, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak banding yang diajukan dan tetap menghukum mati MJ.

Begitu halnya ditingkat Kasasi, 31 Mei 2011, Mahkamah Agung tetap menghukum mati. Pengajuan grasi pada 30 Desember 2014 ditolak Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 31/G-2014. Upaya hukum lanjutan, yakni Peninjauan Kembali pada 16 Januari 2015, kembali ditolak MA. ■ *Soemita*

Gus Dur Berpeluang Dianugerahi Pahlawan Nasional



Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan tokoh pluralisme yang juga Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, berpeluang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

"Pengusulan Gus Dur sudah selesai di Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tinggal melanjutkan ke dewan gelar," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Sabtu (25/4).

Pengajuan ke dewan gelar akan dimulai pada Mei mendatang. Sementara proses penganugerahan sendiri dilakukan menjelang 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dewan Gelar diketahui dipimpin Menkopolhukam sementara sekretarisnya dari unsur militer.

Saat ini usulan yang masuk untuk Pahlawan Nasional cukup banyak dan ada beberapa yang di proses di TP2GP ke dewan gelar seperti usulan dari Banten dan Jawa Barat. Gus Dur dianggap sebagai Bapak Bangsa dan Tokoh Pluralisme. (/Ant-Karel Stefanus Ratulangi)

Effendi Simbolon Tantang Jokowi Realisasikan Pidato KAA

Pernyataan kritis Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) terhadap lembaga donor Internasional, seperti World Bank, ADB, dan IMF yang sepantasnya dibuang menuai perhatian dan decak kagum publik Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengapresiasi pidato yang disampaikan presiden itu. Namun, ia menantang pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut agar diimplementasikan pada kebijakan, khususnya yang berkaitan anggaran.

"Kalau sungguh-sungguh maka dinyatakan *dong* kepada DPR, melalui pembahasan APBN selanjutnya, bahwa kita tidak pernah lagi akan menggunakan lembaga keuangan internasional. Oke," ucap Effendi mengapresiasi sekaligus mendesak presiden untuk tidak sekedar retorika saja menjawab pertanyaan Aktual di Jakarta, Minggu (26/4).

Presiden juga harus menjelaskan bagaimana pemerintah memenuhi penguatan anggaran pendapatan negara ke DPR RI.

Dalam pembukaan KAA, Presiden Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional dalam pidatonya di Konferensi Asia Afrika (KAA). Selain PBB, Presiden mengkritik keberadaan beberapa lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF, serta ADB. (Ant-Tri Harningsih)

IRESS: Surya Paloh Dibalik Isu Pembubaran Petral

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mempertanyakan tujuan Pemerintah membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Kalau itu tujuannya efisiensi ya kita dukung, tapi kalau nanti justru malah menciptakan perusahaan baru serupa, itu yang patut dicurigai," kata Marwan kepada Aktual di Jakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, ada yang janggal dari wacana pembubaran Petral ini lantaran alasannya yang tidak terang-benderang diungkapkan dan dapat diterima secara logis.

"Jangan sampai (Presiden RI) Jokowi ini membubarkan Petral, lalu memberi ruang pada perusahaan baru untuk menggantikan Petral. Mengakomodasi mafia yang berada dalam lingkar pemerintahan," ujarnya.

"Petral itu 100 persen bisa diatur oleh Pertamina, Pertamina juga berada di tangan Pemerintah. Jadi apa yang salah? Dengan adanya Petral di Singapura juga kan positifnya dia (Petral) bisa memenuhi kebutuhan dolarnya sendiri di sana, kalau dibuat penggantinya lalu berada di Indonesia, apakah mampu memenuhi kebutuhan dolar untuk setiap hari mengimpor BBM? Ini akan berbahaya bagi nilai tukar kita karena permintaan dolar yang terlalu tinggi," ungkap Marwan.

Marwan menduga kabar dibalik wacana pembubaran Petral ini adalah desakan dari Surya Paloh yang diduga punya hubungan dengan perusahaan energi bernama PT Surya Energi Raya.

"Sudah disebutkan oleh Tim Reformasi (Reformasi Tata Kelola Migas/RTKM) ini ada Surya Paloh, malah setahu saya Tim RTKM tidak merekomendasikan untuk dibubarkan, tapi diperkuat. Maka dari itu saya ingin menegaskan kepada Jokowi dan Rini (Menteri BUMN) agar jangan mau di-*feeding* oleh kepentingan tertentu yang merugikan rakyat," tutupnya.

/ Dhanu Akbar Muhamad Daeng, Ismed Eka Kusuma



PSSI Dibekukan, Menpora Penuhi Janji ke Persebaya '27?

Isu janji Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kepada Persebaya 1927 menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Tindak-tanduk Menpora mulai terungkap setelah dirinya bersikeras untuk mengembalikan Persebaya 1927 ke kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air, Indonesia Super League (ISL).

Oktober 2014 silam, pasca pelantikan Menteri Kabinet Kerja, Imam langsung melontarkan wacana agar Persebaya 1927 bisa kembali pentas di ISL musim 2015. Persebaya 1927 menurutnya berhak mengikuti kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Indonesia itu, lantaran klub tersebut bukan terdegradasi, melainkan karena membelot ke Indonesia Premier League (IPL), saat terjadi dualisme liga pada 2010.

“Saya memastikan akan memberikan izin kepada Persebaya 1927 kembali pentas di ISL musim ini (2015). Klub ini tidak terdegradasi hanya saja membelot ke IPL,” tegas Imam di salah satu TV swasta nasional, Jumat (31/10).

Jika hal itu tidak bisa terealisasi, Imam berencana untuk negosiasi dengan pihak PSSI yang saat itu masih di pimpin oleh Djohar Arifin. Rencana itulah yang diduga kuat sebagai kontrak politik antara Imam dengan Persebaya 1927.

Realisasi akan janji tersebut menguat setelah ditarik ke belakang, Februari 2014, Imam menggelar pertemuan dengan supporter fanatik klub asal Surabaya, Bonek alias Bondo Nekat. Hasilnya, Bonek sepakat akan memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Imam Nahrawi dalam Pemilu Legislatif yang di gelar pada 9 April 2014.

Mereka resmi menyatakan dukungannya kepada PKB, khususnya Imam Nahrawi yang saat



itu mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg).

“Imam Nahrawi sosok pemimpin yang bisa diterima anak muda, terlahir dari desa sukses di kota, tapi tak pernah lupa membangun desanya,” ujar Koordinator Bonek Daerah Sukolilo, Surabaya, David saat berdiskusi bersama Imam, Kamis (27/3) malam.

“Lahir batin, figur seperti beliaulah yang kami impikan, figur pemimpin muda yang visioner, punya semangat mengabdi dan bisa membangun motivasi anak muda,” ujar David.

Gerak-gerik mencurigakan Imam itu diendus PSSI. Anggota Executive Commisioner (Exco) PSSI, Gusti Randa, berpendapat upaya Menpora untuk memasukkan Persebaya 1927 ke ISL 2015 merupakan pemenuhan janji politik saat Imam mencalonkan diri sebagai Caleg dalam Pemilu 2014.

“Upaya itu adalah pemenuhan kontrak politik terhadap Bonek Persebaya 1927,” ungkap Gusti di Jakarta, Sabtu (25/4).

Saat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 2015 digelar di Surabaya, sekitar 7.000 Bonek yang diduga mempunyai ikatan politik dengan Menpora berunjuk rasa di Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, yang lokasinya tidak jauh dari Hotel JW Marriott, tempat digelarnya KLB PSSI 2015.

Dalam aksinya, Bonek menuntut agar Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) memperjuangkan hak Persebaya 1927 untuk bisa kembali mengarungi pentas ISL 2015.

“Kami membawa beberapa tuntutan, di antaranya mendukung Presiden RI melawan mafia FIFA demi kedulatan Indonesia, mendukung Menpora dan BOPI tegas terhadap PSSI dan PT Liga Indonesia, serta kembalikan hak-hak PT Persebaya Indonesia,” tegas Yanto Gerandong, Koordinator Demonstrasi Persebaya 1927. /Ant-M Zhacky Kusumo, Tri Harningsih

SBY Singgung Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme

Mantan Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono mengatakan janji kampanye Presiden Joko Widodo, salah satunya menyangkut revolusi mental, sebenarnya sudah pernah hidup pada abad ke-18.

Tema besar kampanye Jokowi ini lahir dari tiga tokoh pemikir, masing-masing Hegel, Karl Max dan Frederich Angle. Pada gilirannya, yakni Pilpres 2014 lalu, tema ini mendapatkan sanjungan dan apresiasi dari sana-sini.

Akan tetapi, yang perlu diketahui semangat revolusi mental adalah bahwa semangat ini adalah sebuah fundamen ajaran Marxisme yang menjadi Komunisme.

Demikian disampaikan SBY saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana Menuju Manusia Indonesia Progresif’ di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4).

“Kemudian Jokowi mengangkat revolusi mental. Apa maksudnya? Saya baca tulisan beliau, saya pahami yang dimaksudkan Jokowi tentang revolusi mental tidak sama sebenarnya dengan yang dicetuskan Marx, Hegel dan Angle,” kata SBY

SBY menuturkan Jokowi merubah semangat dan karakter revolusi mental. Ia mengakui memang ada satu dua hal yang berbeda dengan pemikirannya. Namun, SBY mengatakan dirinya menghormati pemikiran Jokowi, bahwa itu merupakan revolusi mental ala Jokowi.

“Kan ada istilah sesama bus kota dilarang mendahului,” canda SBY.

/Nebby Mahtubirrahman

Pinjam Perahu Milik Seteru

Andi Anwar Aksa gelisah dengan 'perahu' yang akan mengantarnya bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Barru tersebut gelisah dengan kondisi internal DPP Partai Golkar yang terpecah. Kondisi ini membuatnya terancam tidak dapat mengikuti Pilkada jika tidak bergerak cepat.

Maka, pada awal bulan lalu Andi langsung melakukan safari politik. Ia yang berstatus sebagai Ketua DPP Tingkat II Partai Golkar tersebut mendatangi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sejumlah partai yang didekati Andi bahkan masih berseteru di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya sudah mendaftar di PAN dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk diberikan rekomendasi," ujarnya saat dihubungi, Minggu (5/4).

Andi mengatakan di daerahnya semua partai sudah membuka penjaringan bakal calon. Hanya Partai Golkar saja yang belum membuka pendaftaran. "Saya harus persiapkan strategi sejak dini. Jangan sampai kami tidak dipakai setelah partai berpolemik. Makanya, saya mendaftar di berbagai partai," kata dia.

Sekalipun Golkar membuka penjaringan, calon pimpinan daerah juga akan kebingungan akan mendaftar ke kubu siapa. "Kader bingung mendaftar kemana. Meski nantinya Golkar telah membuka pendaftaran. Jika kedua kubu sama-sama membuka pendaftaran, jelas kami bingung juga mana akan diikuti. Kami berharap, konflik ini tidak berlarut-larut," harapnya.

Langkah serupa dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pangkep,

Sulawesi Selatan, Syamsuddin Hamid. Kader Partai Golkar ini telah mendaftar sebagai bakal calon ke lima partai, yaitu PDIP, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan. "Lima partai ini belum tentu semuanya akan mengusung saya. Makanya saya serahkan saja sepenuhnya kepada mereka," ujar Syamsuddin.

Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah juga dibingungkan dengan belum tuntasnya konflik di DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono ini. Sebagai Wakil Bupati Serang, Jawa Barat ia juga tengah menjajaki kemungkinan untuk menggunakan 'perahu' milik partai lain jika Golkar dilarang ikut Pilkada. "Ada beberapa alternatif. Pertama kalau kursi Golkar bisa digunakan ya digunakan. Tapi kalau itu tidak bisa digunakan, ya kami coba akses partai lain," ujar adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut.



Kegelisahan kepala daerah di sejumlah wilayah ini buntut dari dualisme kepemimpinan Partai Golkar. Hingga kini keduanya masih berhadapan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu awal pekan lalu KPU sudah membuka tahapan pertama dalam Pilkada serentak yang akan dimulai Desember tahun ini.

Sampai akhir masa sidang DPR pekan lalu belum menyekapati solusi terkait dualisme DPP Golkar dan PPP. Rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR tidak menghasilkan kesepakatan terkait konflik ini dalam usulan Peraturan KPU (PKPU). Rapat hanya menyarankan agar dua kubu yang berseteru cepat berdamai sebelum batas akhir pendaftaran tanggal 26-28 Juli. "Apabila parpol itu masih berselisih, maka harus mendasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo,



di Gedung DPR, Jumat (24/4).

Jika tetap tidak ditemukan solusi perdamaian maka KPU akan menggunakan keputusan hukum terakhir sebagai landasan pendaftaran. Namun solusi ini pun tidak menyelesaikan masalah. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan menilai jika hal itu dilakukan oleh KPU maka akan melangkah undang-undang. "Menurut kami, rekomendasi itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang bisa hanya kalau ada keputusan pengadilan tetap," ujar Fadli, dalam diskusi publik di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Fadli mengatakan, keputusan yang dapat dijadikan pedoman hukum hanyalah keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara putusan pengadilan sementara, prosesnya masih terus berlanjut. Menurut Fadli, yang menjadi masalah jika menggunakan putusan



Foto kiri: Petugas menyiapkan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Foto kanan: Peneliti Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan (kedua kanan) besama anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani (kanan), moderator Ahmad Baedowi (kedua kiri) dan Ketua Perludem Didik Supriyanto (kiri) berbicara dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (27/4).

sementara apabila putusan final pengadilan nantinya berbeda dengan putusan sementara. Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan gejolak antara masing-masing pihak yang bersengketa. "Bagaimana kalau putusan pengadilan tetap berbeda dengan putusan sementara. Ataupun hasilnya berbeda setelah proses kasasi di MA?" kata Fadli.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak layak diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, KPU sebaiknya konsisten dengan menggunakan keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai pedoman.

KPU sendiri sebelum rapat konsultasi dengan Komisi II DPR berpandangan partai yang dapat mengikuti Pilkada akan mengacu pada Undang-Undang Partai Politik. Yakni partai politik yang diakui oleh pemerintah berdasarkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. "Dalam rapat Panja Minggu lalu, kami sudah sampaikan skenario

apabila parpol menempuh upaya hukum di TUN, dan kejadian TUN menangguhkan pelaksanaan (keputusan) Kumham, maka kami nyatakan dalam PKPU bahwa parpol tidak dapat diterima pendaftarannya," kata Ida, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Kamis (16/4/2015) malam.

Ancaman tidak dapat ikut dalam Pilkada serentak juga menjadi pemikiran Ketua DPP Golkar versi Musal Ancol, Mahyudin. "Kalau mendekati masa pendaftaran dan proses sidang di PTUN-nya belum selesai, Pak Agung dan Ical harus bersedia bertemu untuk membicarakan masa depan Golkar. Kalau Golkar tidak ikut pilkada, paling berdosa mereka berdua. Tapi saya yakin Agung dan Ical adalah orang-orang bijaksana," tutur Wakil Ketua MPR ini.

Sementara itu PPP mengancam akan menempuh langkah hukum jika partainya dicoret dari penyelenggaraan Pilkada langsung. "Kalau dikeluarkan, PPP akan mengajukan uji materi terhadap PKPU itu ke Mahkamah Agung," kata anggota Komisi III dari Fraksi PPP Asrul Sani di Kompleks Parlemen.

Namun begitu Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengatakan, saat ini pihaknya telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak tahun 2015. "Untuk Pilkada serentak tahun 2015 ini, pertama, PPP tetap membuka pendaftaran dan itu

sudah dilakukan jadi pendaftarnya sampai tanggal 30 April mendatang," ungkap pria yang kerap disapa Romy ini di Ambon setelah membuka Muswil PPP Maluku, Senin (20/4)

Terkait kisruh Golkar dan PPP yang berimbang pada pembahasan PKPU tentang Pencalonan di DPR, Kemendagri tidak akan mencampurnya. Akan tetapi Kemendagri berharap pimpinan parpol masing-masing kubu dari dua partai tersebut pro aktif menyelesaikan konflik demi kepentingan nasional. "Kami tidak ikut campur soal itu (dualisme parpol). Kami hanya minta kepada parpol untuk lebih proaktif, mengedepankan kepentingan yang lebih besar seperti pilkada," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (21/4) pekan lalu.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu berharap demikian sebab penyelenggara Pilkada dihadapkan pada pilihan sulit atas konflik Golkar dan PPP. Satu sisi berharap keikutsertaan Golkar dan PPP dalam Pilkada, namun satu sisi terbentur aturan.

Dengan kondisi seperti ini, maka PKPU Pencalonan menjadi tidak tegas mendudukkan legalitas parpol peserta Pilkada. "Saya cukup optimislah, Golkar dan PPP selesai. Pemerintah tidak akan intervensi, itu putusan internal parpol. Karena bukan zamannya Kemendagri ikut campur, kita hanya mendukung menyukseskan pilkada," tegas Tjahyo.

Dualisme dua partai politik ini sangat dimungkinkan menimbulkan konflik ditingkat lokal. Selain itu Direktur Riset Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro menilai akan ada partai yang diuntungkan dengan kondisi ini. "Yang diuntungkan partai-partai lain," ujarnya.

PDI-P adalah partai yang paling diuntungkan dalam konflik ini. Pasalnya selama ini mesin politik Golkar terbukti kuat di sejumlah daerah. Hanya PDI-P yang memiliki mesin politik yang dapat mengimbangi Golkar dalam sejumlah pemenangan kepala daerah.

Pemerintah dan KPU sendiri telah



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kedua kiri) menghadiri peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4).

siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Tanggal 9 Desember 2015 menjadi tanggal pelaksanaan pemungutan dan pemilihan suara gelombang pertama dari tiga gelombang yang telah ditetapkan.

Pada gelombang awal, terdapat 269 daerah yang melaksanakan Pilkada. Yakni bagi daerah yang akhir masa jabatannya (AMJ) habis pada tahun 2015 dan semester awal (Januari-Juli) tahun 2016. Terdiri atas 9 Pilkada gubernur, 224 Pilkada bupati, dan 36 Pilkada walikota.

Gelombang kedua berlangsung pada Februari 2017 bagi kepala daerah yang AMJ-nya habis semester kedua 2016 (Juli - Desember). Gelombang kedua ini juga berlaku bagi kepala daerah yang AMJ-nya habis pada tahun 2017.

Sementara Pilkada gelombang ketiga diperuntukkan bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2018. Untuk pelaksanaan pilkada, dilakukan pada tahun itu juga.

Pemerintah bersama DPR terus

mempersiapkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada.

Ada 10 Peraturan KPU (PKPU) yang dikeluarkan. Peraturan itu adalah PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan, PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, PKPU tentang Pencalonan, PKPU tentang Kampanye, dan PKPU tentang Dana Kampanye. PKPU tentang Tata Kerja KPU Pusat, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, PKPU tentang Norma, Standar, Prosedur, serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan.

Selanjutnya PKPU tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, PKPU tentang Pemungutan dan Perhitungan, dan PKPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kemendagri menyebut sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 berada di tangan KPU. Sebab penyelenggara Pilkada itulah yang mengetahui secara teknis persiapan sehingga kesiapan peserta Pilkada.  Soemitra



Pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika - Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan pidato pada pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

Parlemen Asia-Afrika Serukan Kemerdekaan Palestina

Diplomasi Indonesia dengan negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika sudah saatnya diperkuat. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan penguatan hubungan antar parlemen di berbagai bidang. Dari bidang ekonomi, politik, sosial hingga bidang kebudayaan.

Keterlibatan negara-negara Asia-Afrika secara komprehensif juga perlu dikuatkan untuk menguatkan hubungan utara dan selatan dalam koridor kerjasama global. Diharapkan kerjasama ini bisa mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan global.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto mengenai gelaran Konferensi Parlemen Asia-Afrika (KPAA) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4).

Disampaikan, tantangan negara-negara Asia-Afrika ke depan sangat besar, karenanya dibutuhkan konsolidasi berkelanjutan guna memecahkan berbagai permasalahan yang muncul.

KPAA ditekankan Novanto, bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan pemikiran dan atau perspektif Parlemen Negara-negara Asia-Afrika dalam penajaman agenda pembangunan global paska 2015 dalam konteks New Asia-

Afrika Strategic Partnership (NAASP).

“Penyelenggaraan KPA ini merupakan *second track diplomacy* yang dilakukan Parlemen Indonesia untuk menguatkan diplomasi dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, KPAA membahas isu-isu strategis antara lain pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara Asia-Afrika hingga perlunya mendorong kemerdekaan Palestina.

Beberapa hal penting yang dihasilkan dari pembahasan dalam KPAA yang diikuti 33 perwakilan negara menghasilkan 25 poin kesepakatan (deklarasi). Ke-25 poin secara garis besar tertuang dalam lima pokok deklarasi.

Pertama, menyangkut kerjasama memperkuat peran parlemen dalam kerangka kerjasama selatan-selatan, promosi perdamaian, dan kemakmuran dunia. Ke dua, seluruh negara sepakat meneguhkan komitmen Dasasila Bandung dengan semangat solidaritas, persahabatan, dan kerja sama sebagai prinsip pokok.

Ke tiga, peserta konferensi menegaskan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan

kedaulatan wilayahnya sesuai pada 1967.

“Konferensi mengutuk keras seraya menuntut agar Israel membebaskan tahanan parlemen Palestina yang ditangkap semena-mena dan tanpa proses peradilan yang memadai,” kata Fadli.

Ke empat, konferensi juga menegaskan komitmen Parlemen Negara Asia-Afrika untuk terlibat sedini mungkin dalam agenda pembangunan global SDGs. Kelima, untuk mewujudkan kerjasama Asia-Afrika ke depan. Konferensi akan mendukung ide pembentukan Asia-Afrika Parliamentary Group.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, KPAA memiliki makna strategis bagi Indonesia melakukan diplomasi lapis ke dua guna menguatkan diplomasi pemerintah.

Agenda bersejarah ini perlu dijadikan fondasi hubungan lebih baik kedua kawasan, yakni Asia dan Afrika, dan juga dalam kerangka yang lebih luas yakni Selatan-Selatan.

“Kita komitmen bawa semangat KAA Bandung 1955, melalui konferensi ini kita ingin menguatkan jembatan Asia-Afrika,” tutupnya. *Soemitro*

HMP Ahok Tak Bisa Ditawar

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi bola liar yang membingungkan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Padahal, HMP itu sangat penting karena bisa berjung pada pemberhentian Ahok sebagai Gubernur.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, mengatakan bahwa hampir seluruh anggota DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menggulirkan hak menyampaikan pendapat (HMP), sebagai kelanjutan dari penggunaan angket DPRD yang menemukan beberapa kesalahan fatal Ahok.

Selain doyan teriak-teriak dan bicara tidak pakai etika, Ahok juga melakukan kesalahan dengan mengirim draf Perda tentang APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD. Draf APBD itu hanya di-print dari E-Budgeting, kemudian Ahok teriak-teriak bahwa pengiriman draf versi Pemprov DKI itu karena dalam draf Perda APBD yang dibahas bersama DPRD ada anggaran siluman.

Setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, ternyata APBD versi Gubernur DKI diketahui banyak kesalahan. Baik kesalahan substansial, teknis, landasan hukum, dan masalah keberpihakan pada rakyat. Alasan-alasan inilah yang kemudian memperkuat penelusuran DPRD melalui hak angket lantas diikuti hak menyatakan pendapat.

"Dalam 'terawangan gaib' saya, 105 anggota itu setuju HMP. Cuma kemudian ada partai pada tingkat DKI itu kan dikuasai oleh pada tingkat nasional. Nah, DPP-DPP inilah yang belum memberikan fatwa-nya kepada partai-partai di tingkat DKI yang belum setuju HMP," ujar Taufik



Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (kedua kanan), bersama Pengamat Politik Ray Rangkuti (kiri), Pakar Hukum Tata Negara Masnur Marzuki (kedua kiri) dan Pengamat Parlemen Lucius Karus (kanan) saat menjadi pembicara diskusi Aktual Forum di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

dalam diskusi rutin Aktual Forum, di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5).

Taufik mengakui bahwa HMP itu tidak mesti berujung pada 'pemakzulan' tapi juga bisa dengan memberikan peringatan. Namun arah menuju pemakzulan itu tentu lebih terbuka. "Bagi saya dari fraksi Gerindra, memandang setiap pelanggaran UU (bisa dimakzulkan). Kan dibunyikan juga di UU kalau Kepala Daerah bisa diberhentikan jika melanggar UU. Ya, tinggal diluruskan saja itu," ungkapnya.

Langkah menuju HMP sendiri tergolong masih cukup panjang. Sebelum HMP, harus digelar terlebih dahulu Rapat Pimpinan (Rapim). Kemudian setelah Rapim memutuskan lanjut, maka usulan HMP ini baru dibawa ke Badan

Musyawarah (Bamus). Dari bamus inilah nantinya akan ditentukanlah waktu Paripurna untuk HMP.

Untuk merealisasikan upaya ini, Taufik mengaku sedang mengajak semua fraksi di DPRD mendukung HMP. Ajakan itu pun dikhususkan kepada PDI-P.

"Kan kuncinya di PDIP. Semoga setelah diskusi ini ada bisikan baik untuk segera PDIP untuk mendorong HMP. Aneh memang ketika orang sudah terbukti melanggar UU lalu tidak di apa-apakan. Saya yakin, PDIP sedang melihat situasi," tegas Taufik.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat DKI, Ahmad Nawawi menegaskan bahwa sepuluh orang anggota Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI dipastikan akan menekan hak menyatakan pendapat ke Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).



Fraksi lain diharapkan juga hadir saat paripurna meski menolak HMP.

"Demokrat 10 orang semua tanda tangan untuk mendukung HMP. Fraksi-fraksi lain yang menghendaki HMP berkehendak agar segera dirapimkan. Jangan terlalu lama menggantung seperti ini," kata Ahmad Nawawi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ahmad meminta semua fraksi tetap hadir pada paripurna agar soliditas DPRD tetap terjaga. Jika fraksi lain tidak hadir dalam paripurna membahas HMP, dia khawatir banyak anggota DPRD juga tak mau hadir dalam paripurna membahas kebijakan lain yang tidak disetujui. "Jangan jadi kebiasaan tidak hadir. Misal tahu-tahu ada yang menolak, tidak hadir lalu tidak kuorum. Ke depan ada paripurna

lagi, mungkin terjadi ada yang tidak setuju maka tidak dating lalu tidak kuorum lagi. Ini mengganggu betul," ungkapnya.

Pada bagian lain, pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Ahok terlihat simpang siur karena DPRD belum matang dalam berpolitik.

Menurut Ray, legislator di Kebon Sirih lebih banyak dilatarbelakangi emosi ketika gulirkan angket, sehingga kelanjutan angket berpa HMP menjadi tersendat. DPRD pun kurang memperhitungkan kalkulasi politik dalam kebijakan ini.

"Buktinya, ketika reaksi publik terhadap wacana pengguliran HMP ternyata negatif, banyak anggota DPRD DKI yang terlihat cari 'pintu keluar' alias coba selamatkan diri. Misalnya banyak dari mereka yang bilang angket belum tentu berujung HMP," ujar Ray saat berbicara dalam diskusi Aktual Forum.

Kondisi ini, lanjut Ray, semestinya tidak terjadi jika DPRD DKI bisa bersikap tegas dan matang. DPRD DKI semestinya bulat, bahwa ketika sudah berani sepakat memakai hak angket, maka mau tidak mau harus diselesaikan lewat HMP.

"Karena mana ada angket yang tidak berujung ke HMP. Kalau sudah terbukti benar (ditemukan pelanggaran Ahok). Kalau engga mau berujung HMP ya pakai interpelasi saja dong harusnya," ucap Ray.

Dalam kondisi seperti ini, Ray menilai tepat kalau DPRD dianggap sedang menanggung malu. Sehingga untuk selamatkan wajah DPRD DKI, mau tidak mau harus gulirkan HMP.

Pengamat Hukum Tata Negara, Masnur Marzuki memiliki pendapat berbeda. Dia menilai HMP terhadap Ahok ibarat sebuah 'puzzle'. Persoalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah sangat benderang, namun DPRD tak juga menyebut pelanggaran yang dimaksud.

"HMP ini saya simpulkan semacam 'puzzle', gambarannya

sudah jelas tapi nggak mau sebut gambaran apa. Sudah mulai investgasi, paripurna sudah dibacakan, sudah jelas semua tinggal DPRD yang menyebut gambarnya," ujar Mansur.

Mansur mengakui bahwa hak angket tidak harus ditindaklanjuti menjadi HMP. Namun jika pelanggaran terhadap Undang-Undang sudah jelas dan nyata, menjadi aneh jika angket itu tetap didiamkan saja. "Aturan di Undang-Undang MD3 dan DPRD memang tidak ada kewajiban konstitusional yang menindaklanjuti hak angket. Tapi, DPRD punya hak. Hak angket, HMP, dan interpelasi," jelas Mansur.

Dijelaskan Mansur, ada perbedaan yang tegas antara hak angket dan HMP dan keduanya bukan satu kesatuan ataupun berkesinambungan. Angket menyimpulkan Gubernur telah sah secara politik melakukan pelanggaran, hak angket sudah tuntas. Kemudian ada kelanjutan bahwa Undang-Undang mengatur tentang HMP, walaupun HMP ini tidak diwajibkan.

Pada bagian akhir, Mansur menilai jika HMP gagal, maka DPRD akan menanggung risiko kehilangan legitimasi publik. Sebab DPRD sudah nyatakan Ahok bersalah, namun tidak ditindaklanjuti menjadi sebuah keputusan politik.

"Sekarang keputusan akhir tergantung dari internal DPRD sendiri. 106 orang berpolitik melawan satu orang yang tidak memiliki partai politik. Nah ini siapa pemenangnya?" tuntas Mansur.

Hal sama disampaikan Pengamat Parlemen, Lucius Karus. Dia menegaskan bahwa HMP adalah hak konsititusal DPRD yang bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Menurut Lucius, langkah tepat yang bisa dilakukan oleh DPRD DKI adalah tetap melakukan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan dugaan yang pernah dituduhkan kepada Gubernur Jakarta.

"Intinya agar tudungan ini tidak mengusik nurani DPRD DKI dan menjadi tuduhan abadi," tuntas Lucius. ■ Moh Sahlani

100 Hari, Jokowi-JK Mendapat Rapor Merah

Sehubungan dengan 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, skor akhir pemerintah adalah 560 dari skala 170-850, yang berarti kondisi pemerintahan Jokowi-JK cukup baik walau masih terdapat beberapa catatan merah.

Demikian seperti dikatakan Pengamat Politik Eep Saefullah Fatah dalam Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema "Pemimpin Muda dengan Jati Diri Ke-Indonesiaan," April 2015, di Bogor, yang diikuti aktivis mahasiswa dari 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Minggu (26/4).

"Terdapat beberapa catatan merah, seperti dalam isu pemilihan Kapolri dan pengendalian konflik KPK vs POLRI. Selain itu juga penilaian negatif juga diberikan dalam isu penunjukan anggota



Wantimpres dan perampungan birokrasi pemerintahan," ujar CEO PolMark Indonesia tersebut.

"Di sisi lain ada juga kebijakan yang positif, seperti penegakan hukum di laut, penarikan subsidi bahan bakar minyak, pembentukan satgas anti mafia migas dan reformasi perizinan usaha dan investasi", kata Eep.

Eep menjelaskan, Jokowi harus beradaptasi cepat dan belajar banyak, karena banyak hal yang dituntut publik dari Jokowi sebagai presiden, "Ada hukum alam yang tidak bisa dilawan, menjadi presiden adalah sesuatu yang berbeda dengan menjadi gubernur atau Wali Kota. Jika tidak belajar cepat, Jokowi akan ketinggalan".

"Pada saat menjadi presiden, kerja Jokowi terlihat tidak begitu terstruktur, hal ini berbeda ketika ia menjadi gubernur atau Wali Kota. Saat ini Jokowi bersikap terlalu simbolik," tegas Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia itu. WISNU YUSEP

Jokowi Tidak Setujui Pembangun Gedung DPR

Presiden Jokowi mengaku dirinya tidak mengetahui adanya anggaran untuk membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden pun meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut ke Setya Novanto sang ketua DPR.

"Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya *ndak* hapal," kilah Jokowi sebelum bertolak ke Kuala Lumpur,



Malaysia, Minggu (26/4). Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan gedung baru diketahui setelah Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4).

Jokowi seperti diucapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. WISNU YUSEP

JK Akui Ada Evaluasi Kabinet

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) tidak memungkiri jika pihaknya selalu mengevaluasi kabinetnya setiap hari. "Yang jelas selalu dievaluasi setiap hari," ucap JK di Jakarta, Senin (27/4).

Komentar JK untuk menanggapi adanya rumor tentang *reshuffle* sejumlah menteri dalam kabinet kerja karena menurunnya popularitas Pemerintahan Jokowi-JK berdasar salah satu lembaga survei.

"Kita nggak ikut-ikut lembaga itu, kita ikut pemerintah saja," pungkasnya.

Sebelumnya Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menyebut 48,5 persen publik tak puas dengan pemerintah Jokowi-JK. Lebih tinggi 4,5 persen dari masyarakat yang puas dengan pemerintah, yaitu sebesar 44 persen.

"Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 48,5 persen," jelas Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, di Jakarta, Minggu (19/4).

Kinerja Jokowi pun sama ikut memudar. Di hasil survei, masyarakat yang puas dengan yang tidak puas oleh kinerja Jokowi selama enam bulan ini, hanya terpaut tipis 0,4 persen.

"46,4 persen publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo," ujar Hanta.

Publik yang puas sebesar 47 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 6,6 persen.

Poltracking Indonesia mengambil sampel dari 1.200 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Dengan *margin of error* kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei wawancara dan tatap muka rentang 23-31 Maret 2015. Sumber dana internal yang dihimpun untuk survei publik. WISNU YUSEP



Yusril: Penetapan Ketum PBB Berlangsung Demokratis

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika pemilihan Ketua Umum PBB dan yang memenangkan dirinya berlangsung secara demokratis.

"Sebenarnya ini gak bisa dibilang aklamasi gitu aja, karena memang prosesnya seperti itu bahwa yang bisa maju ke pencalonan adalah mereka yang menghimpun 100 suara," jelas Yusril setelah acara Muktamar IV PBB di Cisarua, Bogor, Minggu (26/4).

Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB mengamanatkan setiap calon harus mendapatkan dukungan minimal 100 suara.



Mengingat di saat perhitungan hanya memunculkan dua nama, maka ditetapkan dua calon, yakni Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama.

Menurut Yusril setelah ditetapkan dua nama tersebut jika di antaranya tidak datang dan hanya tersisa satu maka tidak akan dilanjutkan ke tahap pemilihan ketum dan orang yang ada langsung disahkan sebagai ketum.

"Itu satu sisi demokratis dalam partai ini karena tahapan-tahapannya sudah terlalui," kilah Yusril.

Yusril mengatakan dirinya yakin alasan ketidakhadiran Rhoma Irama saat prosesi pernyataan kesiapan menjadi Ketua Umum PBB karena

Rhoma sudah melihat peluang yang dimilikinya untuk menjadi ketum, kecil.

"Artinya jika dilanjutkan ke putaran kedua akan sama saja hasilnya karena perbedaan suara yang jauh," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jika melihat posisi satu dengan rincian suara bagi Yusril 386, Rhoma 122 lalu urutan ketiga satu dan Hepi Trenggono dua. "Kan angkanya nggak signifikan dari suara total 514 abstain 3 suara, sehingga dipandang tidak perlu putaran selanjutnya," ujarnya.

Namun demikian kata Yusril, Rhoma tidak dinyatakan kalah karena masuk ke bursa calon dengan urutan ke-2.

"Tidak kalah, artinya sudah masuk daftar calon mundur lebih dulu, sistem yang di PBB itu menarik. Jadi yang menang gak merasa hebat dan yang kalah nggak merasa dipermalukan," jelas dia. /Wisnu Yusep

Kader Demokrat Tagih Janji SBY

Sejumlah kader yang merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat menagih janji Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemungkinan pencalonan kembali sebagai ketua umum.

Saat mendeklarasikan "Penyelamat Partai Demokrat" di Hotel Atlet Century, Senayan, Kamis (30/4), mereka mengingatkan pernyataan SBY dalam Kongres Luar Biasa di Bali beberapa waktu lalu bahwa ia tak ingin dipilih lagi sebagai Ketua Umum Demokrat.

"Janganlah saya yang jadi Ketua Umum lagi. Saya lebih tepat sebagai Pembina atau Ketua Dewan Pembina. Partai jangan tergantung dengan figur SBY. Saya harus hilang pelan-pelan," kata SBY dalam rekaman video yang diputar dalam acara deklarasi tersebut.

Ketua DPC Kabupaten Blitar Heru mengingatkan SBY sebaiknya dapat memegang janjinya dalam KLB dengan tidak lagi berebut kekuasaan

di Partai Demokrat dan mengecam jika nantinya mantan orang nomor satu di Indonesia itu terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

"SBY merupakan tokoh demokrasi di Demokrat, bahkan di Indonesia. Tapi SBY bukan lagi tokoh demokrasi di Indonesia kalau terpilih lagi secara aklamasi," kata Heru.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat I Wayan Gede Pasek Suardika mengungkap bahwa Anas Urbaningrum pun menagih janji SBY untuk tidak maju menjadi Ketua Umum lagi dan memilih menjabat di Dewan Pembina Partai.

"Kata Mas Anas, omongan pemimpin itu 'Sabdo Pandito Ratu', omongannya bisa dipegang," kata



Pasek.

Partai Demokrat akan menggelar Kongres III pada 11 hingga 13 Mei 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu agenda kongres adalah memilih Ketua Umum partai berlambang bintang merci itu. /Ant-Sukardjito



AYO BONGKAR KABINETMU JOKOWI

Megawati Soekarno Putri tidak sedang bulan madu di Bali. Meskipun hari itu Kamis, 9 April 2015 tepat satu tahun partainya menang dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Sejak mendapatkan mandat dari rakyat dengan perolehan 19 persen dalam Pileg, baru kali itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar hajat besar. Yakni Kongres, ke IV di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali.

Di depan podium Megawati dengan lantang membacakan pidato politiknya. Di depan Mega hadir Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga mantan Sekjen PDI-P. Anehnya

Jokowi hari itu melepas atribut Kepresidenan. Ia hanya menggunakan jaket warna merah tanpa logo PDI-P.

Dalam kesempatan itu Megawati menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Kongres tak ayal menjadi 'pengadilan' untuk Jokowi. Megawati memulai pidato dengan menyinggung adanya penumpang gelap dalam mobilisasi kampanye pemenangan Pilpres. "Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi

Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," ujarnya.

Kekuatan inilah yang disebutnya saat ini hendak menguasai sektor tambang dan Migas. Megawati juga menyebut kekuatan ini akan memperlemah BUMN sebagai pilar ekonomi negara. "Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," tegasnya.

Megawati secara lugas menyebutkan saat ini pemerintahan Jokowi-JK telah dikepung oleh kelompok anti partai yang terus

Foto atas: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (13/4).

Foto kanan: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan) memotong balon saat meresmikan acara Hari Kartini disaksikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kanan) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/4).

menghambat komunikasi pemerintah dengan koalisi partai pungusung. Ia merasa selama lima bulan pemerintahan baru tersebut dengan Kabinet Kerja sebagai pembantu Presiden tidak sejalan dengan ideologi partai pungusung.

Tidak sinkronnya kebijakan pemerintah ini karena kuatnya kelompok anti partai dalam kabinet. Megawati menyebutnya sebagai 'Kaum Oportunistis'. Siapa kaum oportunistis yang dimaksud Presiden Indonesia ke 5 itu menyebutkan dengan terang kriteria kelompok ini. "Mereka tidak mau berkerja keras membangun Partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara," tegasnya.

Pidato politik Megawati ibarat sebuah perintah kepada Jokowi sebagai kader partai untuk membenahi kabinetnya. Seketika pula kabar akan dilakukannya *reshuffle* dalam tubuh Kabinet Kerja mengemuka. Sejumlah Menteri yang masuk kategori "oportunistis" menjadi bidikan utama bongkar pasang kabinet Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi langsung merespon dengan diantaranya mengambil langkah dikumpulkannya seluruh anggota kabinet Senin (13/4) hingga larut malam. Pada malam itu fokus pembicaraan adalah rencana Jokowi

mengevaluasi kabinet kerjanya. Diprediksi evaluasi tersebut dinilai sebagai babak baru dimulainya *reshuffle* kabinet, demi memberikan jatah yang lebih besar kepada kader banteng untuk duduk di kabinet.

Seperti diketahui walaupun berhasil memenangkan Pemilu dan menghantarkan kader terbaiknya menjadi RI 1 tahun lalu, PDI-P hanya kebagian empat kursi kabinet jumlah tersebut sama seperti yang diperoleh partai anyar bentukan Surya Paloh, Nasdem.

Soal *reshuffle* pengurus DPP PDI-P non aktif yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan dirinya menyerahkan masalah *reshuffle* Kabinet Kerja langsung ke Jokowi sebagai presiden.

Puan mengaku dirinya tidak mau terlibat langsung terkait kocok ulang kabinet. "Kabinet itu merupakan prerogatif presiden," kilah Puan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/4).

Puan mengaku hingga kini belum ada pembahasan terkait masalah perombakan menteri sendiri. Dengan alasan itu, aku Puan sebagai pembantu presiden dirinya enggan membahasnya. "Kita enggak pernah bicara hal itu," ujar dia.

Reshuffle sendiri sempat menjadi pembahasan di Kongres IV PDI-P. Pengakuan ini datang dari Wakil Sekjen PDIP Bidang Program dan Pemerintahan Ahmad Basarah. "Salah satu materi yang dibahas dalam Kongres ke-IV adalah banyak menteri yang tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan," aku Ahmad Basarah, di Jakarta, (15/4).

Adapun pembicaraan pada kongres kata Ahmad adalah kinerja para menteri, apakah mereka sudah mendukung pemerintahan Jokowi-JK secara maksimal atau belum. "Kami identifikasi dan saat ini masih dalam proses identifikasi," jelas dia. Tak hanya itu, Basarah pun telah membisiki Presiden Jokowi terkait *reshuffle* kabinet.

Menurut Basarah, pihaknya sudah mengantongi nama-nama menteri yang teridentifikasi belum optimal dalam bekerja dan dapat dicarikan penggantinya, tetapi nama-nama itu tidak untuk dikonsumsi publik.

Kocok ulang anggota kabinet, juga mendapat dukungan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy. Menurut dia, tidak ada salahnya Jokowi melakukan *reshuffle*. "Apabila ada menteri yang kinerjanya di bawah standar dan tidak mampu menerjemahkan Nawacita secara maksimal, tidak ada salahnya presiden melakukan evaluasi menyeluruh," alasan dia di Ambon, Senin (20/4).

Reshuffle, sambungnya, merupakan hak prerogatif Jokowi karena diatur dalam undang-undang. Namun kata Romi, PPP dan partai koalisi pendukung pemerintah hanya mampu memberikan bahan evaluasi kepada Presiden terkait kinerja kabinet.

Saat disinggung soal menteri yang berasal dari PPP, Romi beranggapan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, sejauh ini sangat baik. Bahkan, dirinya mengklaim jika menteri asal PPP yang duduk di kabinet saat ini merupakan menteri dengan kinerja yang baik. ■ Dddy K



MELAWAN TRIOMACAN ISTANA



Sebutkan “kaum oportunist” dan “penumpang gelap” dalam kabinet Jokowi JK langsung direspon oleh Koalisi Partai Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pemerintah. Partai Hanura menuduh Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu yang masuk kategori penumpang gelap. “Saya kira yang beredar di masyarakat ada Trio Macan, ya kalau kemarin kan Luhut Panjaitan dari Golkar yang mengusung Prabowo-Hatta



barang kali,” kata Suding ketika dihubungi, Minggu 12 April 2015.

Istilah “Trio Macan Istana” berawal dari kritik politisi PDI-P Effendy Simbolon terhadap pembentukan kabinet. Menurutnya kabinet yang dibentuk Jokowi sesak dipenuhi oleh kelompok neoliberal yang berorientasi pada ekonomi pasar. Effendy menyebutkan nama Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri ESDM Sudirman Said. Diluar itu Effendy juga mengkritik masuknya Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian.

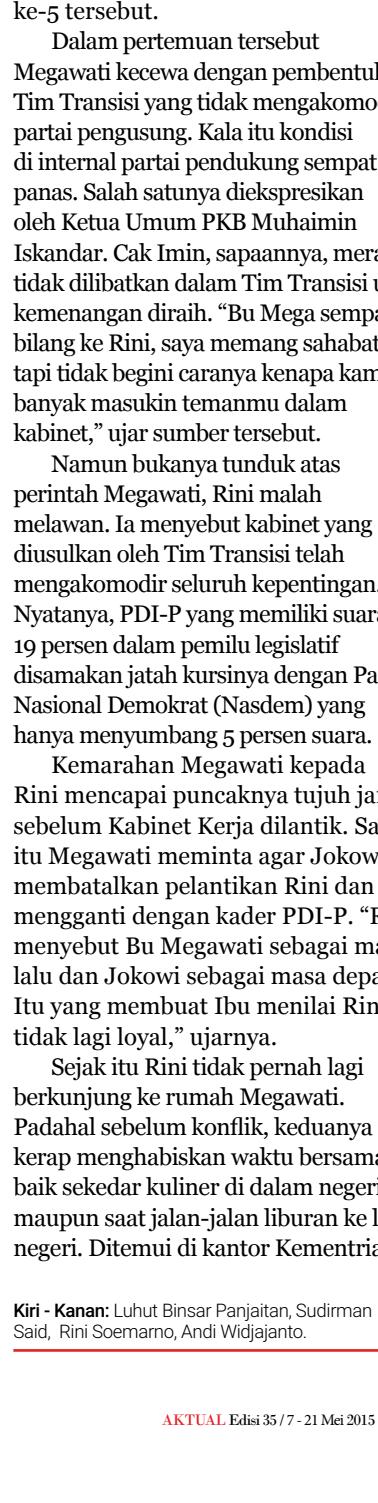
Suara Effendy tidak



sendiri di internal PDI-P. Sejumlah kader juga merasakan kekecewaan yang sama atas pilihan Jokowi. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu misalnya menjuluki kelompok ini sebagai “Brutus”.

Khusus untuk Rini Soemarno, dia sebenarnya adalah pihak yang paling tidak dikehendaki Megawati masuk dalam kabinet. Meskipun sempat sangat dekat dengan Megawati, ternyata Rini disebut pernah melakukan pengkhianatan terhadap Megawati.

Sumber Aktual
di internal partai menyebutkan perselisihan keduanya terjadi saat Megawati berkunjung ke Amerika pasca Pilpres. Rini yang berada di Indonesia melakukan manuver



dengan membentuk Tim Transisi. Tim yang dibentuk untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan baru Jokowi-JK.

Sepulang dari kunjungan ke Amerika, Megawati memanggil Rini ke kediannya Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Megawati menumpahkan kemarahananya kepada bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) saat dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Megawati kecewa dengan pembentukan Tim Transisi yang tidak mengakomodir partai pengusung. Kala itu kondisi di internal partai pendukung sempat panas. Salah satunya diekspresikan oleh Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar. Cak Imin, sapaannya, merasa tidak dilibatkan dalam Tim Transisi usai kemenangan diraih. “Bu Mega sempat bilang ke Rini, saya memang sahabatmu tapi tidak begini caranya kenapa kamu banyak masukin temanmu dalam kabinet,” ujar sumber tersebut.

Namun bukanya tunduk atas perintah Megawati, Rini malah melawan. Ia menyebut kabinet yang diusulkan oleh Tim Transisi telah mengakomodir seluruh kepentingan. Nyatanya, PDI-P yang memiliki suara 19 persen dalam pemilu legislatif disamakan jatah kursinya dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hanya menyumbang 5 persen suara.

Kemarahan Megawati kepada Rini mencapai puncaknya tujuh jam sebelum Kabinet Kerja dilantik. Saat itu Megawati meminta agar Jokowi membatalkan pelantikan Rini dan mengganti dengan kader PDI-P. “Rini menyebut Bu Megawati sebagai masa lalu dan Jokowi sebagai masa depan. Itu yang membuat Ibu menilai Rini tidak lagi loyal,” ujarnya.

Sejak itu Rini tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Megawati. Padahal sebelum konflik, keduanya kerap menghabiskan waktu bersama baik sekedar kuliner di dalam negeri maupun saat jalan-jalan liburan ke luar negeri. Ditemui di kantor Kementerian

Kiri - Kanan: Luhut Binsar Panjaitan, Sudirman Said, Rini Soemarno, Andi Widjajanto.

BUMN Rini tidak pernah mau komentar terkait dengan tuduhan ini.

Lain dengan Rini, pendapat miring tersebut langsung dibantah Luhut Binsar Panjaitan. Dirinya tidak merasa sebagai orang yang disebut oportunistis atau “penumpang gelap” seperti yang dituduhkan kepadanya. “Masa saya oportunistis? Masa saya prajurit dari bawah (disebut) oportunistis?” ujar Luhut di Jakarta Pusat, Jumat (10/4).

Menurut Luhut, sebagai prajurit dirinya memiliki martabat. Dirinya selalu menghormati Megawati sebagai orang yang pernah menjadi pimpinannya ketika saat menjabat sebagai Presiden RI Ke-5. “Saya prajurit yang punya *dignity*, saya menghormati Ibu Mega sebagai mantan bos saya dan sebagai mantan presiden,” kilah dia.

Informasi yang dihimpun *Aktual* di internal PDI-P memang sangat kecewa dengan pembentukan Kepala Staf Kepresidenan. Megawati menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah mendistorsi fungsi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dan berpotensi mengganggu hubungan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun demikian tidak mudah untuk menyingkirkan Luhut dari lingkaran pertama Istana. Kongsi bisnis antara Luhut dan Jokowi yang terjalin sejak lama menjadi salah satu faktornya. Seperti diketahui Jokowi dan Luhut memiliki usaha mebel bersama di PT Rakabu Sejahtera. Perusahaan ini merupakan milik anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming. Di perusahaan ini Luhut memiliki saham lewat PT Toba Sejahtera.

Undangan Makan Siang Kepada Pengamat

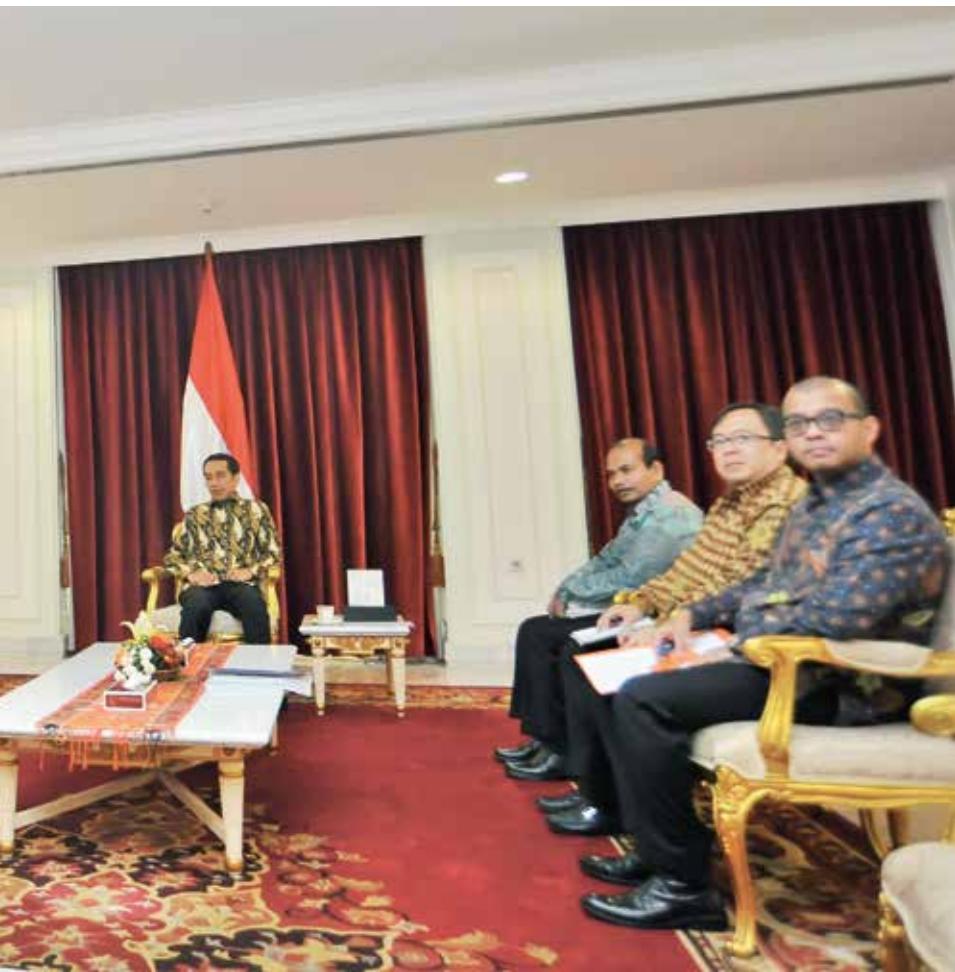
Makan siang dan *selfie* adalah jurus jitu Joko Widodo menyelesaikan masalah. Ia bahkan mengakuinya sejak menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bahwa jurus makan siang kerap menuntaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali ketika disorot terkait dengan bongkar pasang kabinet usai Kongres PDI-P.



Beberapa hari kemudian, Jokowi pun melayangkan undangan makan siang ke sejumlah pengamat politik dan akademisi dari berbagai lembaga dan universitas ke Istana Negara, Selasa, (14/4) pekan lalu. Yakni untuk mendapatkan masukan dari pengamat terkait dinamika politik yang berkembang dewasa ini. Mereka yang hadir memenuhi undangan tersebut, adalah peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikram Nusa Bakti, Hanta Yudha (Poltrack Institute), Nico Harjanto (Populi Center), Phillips Jusario Vermonte (CSIS), Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia), M Qodari (Indobarometer), dan Thamrin Tamagola (Universitas Indonesia). Bukan hal baru jika Jokowi memanggil satu-persatu para pengamat untuk berdiskusi, tetapi menjadi tidak biasa saat pemanggilan itu dilakukan bersamaan.

Sehubungan dengan undangan makan siang dari Jokowi, Yunarto pun angkat bicara. Menurut dia sejumlah topik yang menjadi pembahasan kala itu, diantaranya isu kenaikan harga bahan pokok, tren hasil survei termasuk diantaranya tren citra Jokowi dalam persepsi publik saat ini dan dinamika politik lainnya yang hingga kini masih memanas. “Kami hanya membaca secara makro mengenai efek kebijakan Jokowi terhadap persepsi publik. Juga tentang hasil survei yang memperlihatkan turunnya citra Jokowi, apakah disebabkan oleh naiknya harga bahan pokok atau masalah lain,” terang dia. Sayangnya Yunarto enggan merinci pokok pembahasan Jokowi dengan para pengamat politik.

Awalnya, cerita Yunarto, Jokowi enggan membahas soal hubungan



Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Kepala Bappenas Adrinof Chaniago (ketiga kanan), Menkeu Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) serta Seskab Andi Widjajanto (kanan) berdialog dengan Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan (dari kiri-kanan), Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalbar Cornelis, serta Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang membahas usulan program kegiatan strategis regional Kalimantan Tahun 2016, Jakarta, Rabu (15/4).

makan siang ke Istana adalah mereka yang dulunya dianggap berjasa membela Jokowi saat pertarungan memperebutkan RI-1 di Pilpres yang digelar tahun lalu.

“Presiden hanya menerima penjelasan dari mereka tentang hasil survei. Tetapi suasannya itu suasana rileks makan siang, tidak ada yang secara substantif. Presiden lebih menerima penjelasan dan saran apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden untuk mengantisipasi dinamika politik sekarang,” tutur Andi.

Dalam pertemuan tersebut sambung Andi, Jokowi lebih banyak memilih untuk mendengarkan setiap penjelasan yang dilontarkan pengamat. Tidak ada tanggapan signifikan yang diberikan Jokowi dalam perbincangan tersebut.

Andi juga menegaskan Presiden hingga saat ini masih tidak memiliki rencana untuk merombak kabinet. “Kami menteri, Seskab, nunggu Presiden. Prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri ada di Presiden, bukan di partai,” tegasnya.

Namun desakan dari internal PDI-P untuk melakukan *reshuffle* terus disuarakan. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Dwi Ria Latifah misalnya menginginkan Presiden segera membenahi kabinet. “Lebih cepat lebih baik, kan ada survei yang menyebut beberapa menteri tidak cakap itu perlu diganti,” ujarnya.

Informasi yang diterima *Aktual* PDI-P bahkan sudah menyiapkan nama untuk mengganti Andi yakni mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung. Pram dinilai sebagai sosok yang senior dan dapat menjebatani Presiden dengan para pembantunya dalam kabinet. ▀ *Moh Sahlan*

kepartaihan dan koalisi. Namun karena ada desakan dari salah seorang tamu, akhirnya topik tersebut juga menjadi pembahasan pada acara tersebut, walaupun Jokowi sendiri lebih banyak terdiam.

“Ada sindiran sedikit masalah hubungan dengan koalisi. Soal hubungan koalisi itu dilontarkan pengamat,” jelas Yunarto.

Seperti dituturkan oleh Thamrin Tamagola dalam pertemuan itu rekannya Ikrar Nusa Bhakti kecewa dengan perlakuan PDI-P dalam Kongres Bali yang merendahkan martabat Presiden sebagai petugas partai. “Ikrar yang paling vokal menyampaikan keprihatinan bahwa pilihan rakyat, pilihan kita semua yang persentasenya lebih dari 50 persen diperlakukan seperti itu oleh parpol yang perolehan suaranya hanya 19 persen. Mendengarkan itu Pak Jokowi

mengangguk-ngangguk, dia biarkan dulu kita semua bicara,” ucap doktor di bidang sosiologi media ini.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno beralasan jika pertemuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan komunikasi yang sinergis antar kementerian dengan publik.

Sedianya, tambah Pratikno, pertemuan yang sebelumnya direncanakan digelar di Kantor Kemensetneg. Tetapi karena Presiden Jokowi memiliki waktu senggang saat jam makan siang, acaranya pun dipindahkan ke Istana Negara. “Pak Presiden juga bilang, ‘daripada saya makan sendirian’, begitu dan saya pikir juga dari pada hanya saya yang makan sama teman-teman tadi,” terang Pratikno.

Sementara itu, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, para pengamat politik yang diundang

GOLKAR MASUK GUSUR SIAPA?

Buruknya kinerja tim ekonomi pemerintah pimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berimbang luas. Rakyat sudah tercekik oleh mahalnya harga kebutuhan pokok akibat kebijakan melepas harga bahan bakar minyak (BBM) ke mekanisme pasar.

Kinerja buruk tim ekonomi pemerintah membuat banyak pihak berang, termasuk Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Gara-gara kinerja tim ekonomi yang buruk, Presiden Jokowi dinilai mengabaikan konsep Trisakti dan Nawa Cita dalam menjalankan pemerintahan.

Kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi-JK justru membuat harga-harga mahal dan daya beli masyarakat menurun, nilai tukar rupiah anjlok, sedangkan swasembada pangan tak kunjung terrealisasi. Tak heran jika desakan agar Jokowi segera mengganti tim ekonomi semakin kencang.

“Kalau ada *reshuffle*, maka yang pertama harus diganti tentunya tim ekonomi. Kebijakan ekonomi dengan melepas harga BBM ke harga pasar sudah menyengsarakan rakyat,” ujar Politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka dalam sebuah kesempatan di Jakarta, April 2015.

Tim ekonomi kabinet Jokowi-JK diisi kalangan non-parpol yang menyebut diri sebagai kaum profesional. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Prekonomian) Sofyan Djajil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan, kinerja tim ekonomi Jokowi-JK memang sudah harus dievaluasi karena dalam enam bulan pemerintahan sudah banyak menelurkan kebijakan tidak bagus. Secara khusus, Anggota Komisi XI



Foto kanan: Menko Perekonomian Sofyan Djajil (kedua kiri), Mendag Rachmat Gobel (ketiga kiri) bersama Menteri Kabinet Kerja bersiap mengikuti rapat terbatas bidang perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4).





[1] Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar.

[2] Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrovi.

[3] Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri

untuk masuk kabinet. Ingat, kalaupun Ical sudah bicara begitu berarti sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Sekarang tinggal kembali pada Presiden Jokowi, mau nangkap sinyal itu atau tidak?" terangnya.

Misbakhun menambahkan, selama ini sikap Golkar di DPR sudah banyak mendukung kebijakan Jokowi, khususnya yang sesuai dengan kepentingan rakyat. "Malah soal dukungan di DPR, justru KMP yang lebih banyak mendukung program Jokowi dibanding Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Soal APBN-P, kemudian penyertaan modal negara dan sebagainya kita dukung," terang Misbakhun.

Desakan untuk membongkar Kabinet Kerja juga diutarakan Ketua DPP relawan Pro Jokowi (Projo). Tak tanggung tanggung ada 14 nama menteri yang disebut Projo layak untuk dicopot. Namun ia tidak menyebut nama-nama. "Nanti akan kita serahkan pada Presiden," ujarnya.

Perombakan kabinet juga diinginkan oleh masyarakat secara umum tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia. Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015. Hari ini juga adalah hari yang tepat untuk mengevaluasi satu semester kinerja pemerintahan Jokowi-JK karena tepat satu semester setelah Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu. Survei ini menggunakan metode *multistage random sampling* dengan jumlah sampel 1200 responden dan *margin of error* +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sebanyak 41,8 % publik setuju dilakukan *reshuffle* (gabungan sangat setuju 5,8% dan cukup setuju 36%), dan hanya 28% yang tidak menghendaki terjadinya perombakan (sangat tidak setuju 3,9% dan kurang setuju 24,1%), sementara 30,2% tidak tahu/tidak jawab. Menanggapi hal itu Wapres Jusuf Kalla menyebut tidak menggunakan survei sebagai dasar evaluasi kinerja.

Namun tetap saja derasnya isu pergantian kursi Menteri sudah dirasakan oleh anggota kabinet.



Bahkan sebelum Kongres PDI-P sejumlah menteri seperti informasi yang dihimpun Aktual sudah ancam-ancam jika terkena *reshuffle*. Waktu Golkar kubu Agung dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM sudah banyak yang mengira akan tersingkir," ujar sumber Aktual di Istana Negara.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengeluarkan SK untuk kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono memang mengguncang kabinet. Pasalnya kubu Agung langsung mendeklarasikan diri gabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Gabungnya Agung bukan tanpa timbal balik. Tiga Pos Menteri disebut-sebut sudah disiapkan untuk Golkar sebelum akhirnya kubu Aburizal Bakrie menggantikan Agung dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara terpisah, Labor Institute Indonesia menyebut empat nama yang layak direshuffle, yakni Menaker Hanif Dakhiri, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Analis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, mengatakan empat menteri ini tidak profesional



dalam menjalankan tugas memimpin kementerian.

Khusus Menteri ESDM Sudirman Said, Andy menyebut dia sangat layak dicopot karena kebijakan yang dibuat tidak membela kepentingan rakyat. Bahkan Sudirman mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu Minerba yang berisi tentang pembatalan atas kewajiban perusahaan tambang membangun *smelter*. Padahal pabrik *smelter* ini akan menguntungkan negara dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

"Sudirman Said juga terbukti tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang kenaikan harga BBM sebanyak dua kali, sehingga beban ekonomi masyarakat semakin berat," jelas Andy.

Setali tiga uang, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menunjukkan kinerja yang kurang profesional sehingga harus dicopot. Nyaris tidak ada terobosan kebijakan yang dilakukan Rini terhadap pengembangan BUMN. Dia malah melakukan politisasi terhadap perusahaan pelat merah papan atas dengan menempatkan orang-orang tidak memiliki rekam jejak bagus sebagai komisaris di sejumlah BUMN.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina

Hendri Satrio mengatakan bahwa ada tiga menteri yang kinerja di bawah standar. Yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

"Menteri Pertanian layak diganti karena tidak ada gebrakan apa-apa soal swasembada pangan. Impor beras dan sebagainya masih saja terjadi dan ini dilakukan di saat panen. Terus ada lagi kasus penarikan 1300 traktor dari petani di Ponorogo, Jawa Timur padahal itu sudah diberikan saat kunjungan presiden. Ini maksudnya apa," ucapnya.

Bukan hanya kelompok profesional yang terancam akan dicopot jika Presiden menghendaki. Sejumlah Menteri dari Partai pun terancam akan kehilangan kursinya di Kementerian. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya disebut akan kehilangan satu kursi. Hal ini dikarenakan partai pimpinan Muhammin Iskandar tersebut kurang membela PDI-P saat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dari tiga menteri yang duduk di kabinet hampir semuanya memiliki kemungkinan untuk diganti. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar misalnya disebut akan diganti lantaran sempat konflik dengan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait Desa. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi juga dibidik setelah memperkeruh citra pemerintah dalam konfliknya dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sementara itu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri disorot saat gagal mencegah eksekusi hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menanggapi rencana bongkar kabinet tersebut dengan cepat. Menurutnya harus ada kriteria yang ditetapkan Presiden dalam mencopot pembantunya. "Kalau boleh usul *reshuffle* memerlukan ukuran jelas. Walaupun itu ranah politik, harus ada ukuran jelas. Kenapa di-*reshuffle*, nanti kalau terlalu sering juga jadi problem," ujarnya.

Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mendapatkan rapor baik dari Presiden Jokowi sempat menyatakan ingin mundur dari Kabinet. Tekanan politik yang dihadapi pengusaha bidang perikanan dan penerangan ini disebut sebagai pemicunya. Namun Susi mengurungkan niatnya. "Capek didemo, ditekan. Capek saya. Kadang-kadang ingin jadi ibu saja. Jadi ibu yang nggak urusi pekerjaan," ujarnya, 13 Februari lalu. ■ Soemitra



Ada yang Hilang di Dakwaan Sutan

Sutan Bathoegana Siregar tidak sedang sakit gigi. Mantan Ketua Komisi VII DPR tersebut siap menjalani sidang perdananya, Senin 20 April. Meskipun tak sakit gigi Sutan memilih banyak diam. Padahal saat hadir dalam sidang sepekan sebelumnya Sutan yang sakit gigi banyak bicara. Hari itu dakwaan untuk Sutan dibacakan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Si "Ngeri-Ngeri Sedap" itu didakwa berlapis oleh jaksa. KPK memaparkan dakwaan terkait dengan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi politisi Partai Demokrat itu. Salah satunya terkait dengan penerimaan uang Tunjangan Hari

Raya (THR) dari mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini sebesar 200 ribu USD pada bulan Juli tahun 2013.

Jaksa menyebut uang yang diperuntukkan untuk seluruh pimpinan dan anggota Komisi VII tersebut diserahkan oleh Rudi melalui rekan Sutan di Partai Demokrat dan di Komisi VII Tri Yulianto. Menurut keterangan Rudi, penyerahan tersebut diawali saat keduanya buka puasa di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Rudi menyampaikan adanya permintaan dari Sutan kepada dirinya untuk menyiapkan uang THR yang akan dibagikan kepada anggota dan

pimpinan Komisi VII DPR. "Melalui saya saja nanti saya sampaikan," ujar Tri seperti dibacakan Jaksa.

Rudi lantas sepakat dengan saran Tri yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan tanggal 26 Juli 2013 di Toko buah 'All Fresh' Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Di tempat itulah Rudi menyerahkan uang dalam ransel hitam kepada Tri Yulianto.

Dua hari setelah penyerahan tepatnya hari Minggu tanggal 28 Juli barulah Rudi bertemu dengan Sutan di ruangan Bima Sena Gedung The Dharmawangsa Jalan, Brawijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. "Dalam pertemuan tersebut terdakwa

Terdakwa kasus gratifikasi pembahasan penetapan APBN-P 2013 Kementerian ESDM, Sutan Bathoegana menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/4).

Foto kanan: Sartono Hutomo

memperkenalkan Deni pengusaha yang ikut tender di SKK Migas,” ujar Jaksa.

Namun jaksa tidak menyebut apa hubungan Deni dalam kasus ini. Bahkan jaksa tidak menyebut dengan lengkap siapakah nama Deni yang dimaksud dalam dakwaan. Penelusuran *Aktual* mengerucut pada Presiden Direktur dari PT Rajawali Swiber Cakrawala (RSC) Deni Karmaina. Pengusaha bidang energi sempat dicekal oleh KPK bersamaan dengan pencekalan terhadap mantan Menteri ESDM Jero Wacik.

Deni sebelumnya banyak disebut oleh Sutan saat ia diperiksa oleh penyidik KPK tahun lalu. Dalam pengakuan Sutan, di depan penyidik tanggal 27 November misalnya Sutan menyebut Deni yang dikenalnya sebagai teman Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Tersangkutnya Ibas dan Deni berawal dari telepon dari Eka Putra kepada Sutan. Eka adalah staf ahli politisi senior Partai Demokrat Sartono Hutomo yang juga paman Ibas.

Sutan mengatakan, ketika menjawab via telepon tersebut, dirinya bicara terlebih dahulu kepada seorang yang mengaku berprofesi pegawai. “Pak Sutan, saya Eka stafnya Pak Sartono. Ini Sekjen mau bicara,” kata Eka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sutan.

Tak lama, Eka kemudian mengalihkan telepon tersebut kepada seorang pria yang mengaku bernama Sartono. Masih menurut BAP, Sutan hari itu tidak bisa bicara atau melakukan pertemuan, karena sedang memimpin rapat. Sutan pun menawarkan bertemu besoknya. “Kalau besok saya dan Pak Sekjen keluar kota,” ucapan Sutan menirukan jawaban Sartono.

Namun, Sartono mengatakan bahwa esok harinya Sekjen akan diwakili Eka dan temannya. Sutan memberikan respon, dengan memberikan lokasi pertemuan yang kebetulan dirinya juga akan menghadirkan acara buka bersama di

Hotel Crown, Jakarta. “Saya katakan ‘Kalau mau bertemu besok saya ada acara buka puasa di Crown,’ jelas Sutan.

Lebih lanjut, Sutan memaparkan keesokannya (hari pertemuan), ia mengakui ditemui oleh Eka dan seseorang beranama Deni di Hotel Crown sekitar pukul 15.00 WIB dalam acara buka bersama antara Komisi VII dengan mitra kerjanya. “Ketika ditemui Eka dan Deni. Eka mengatakan ‘Ini teman Ibas’ sambil menunjuk Deni.”

Lalu, saya jawab, “Oh Ya, ada apa?” tanya Sutan ketika itu. Eka pun mengatakan, “Ini Bang, ada kerjaan.” Singkatnya, Eka meminta Sutan untuk Rekin (PT Rekayasa Industri) menang, Pak Rudi oke karena takut jadi masalah di Komisi VII,” papar Sutan menirukan Eka. Dalam BAP pun, Sutan mengaku sempat marah. Dengan langsung membentak Eka dan Deni.

“Kalau benar Rudi ngomong begitu, saya akan keluarkan Rudi dari ruang acara buka puasa, karena itu tidak benar.”

Melihat hal itu, Eka mengatakan, “Mami minta bantuan dukung Rekin,” ujar Eka.

Deni memang sempat dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Namun ia mangkir. Setelah dua kali dipanggil lembaga anti rasuah tersebut tidak lagi memanggil Deni. Kedekatan Deni dan Ibas saat keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di

SMA 39 Cijantung.

Keduanya juga

membangun kongsi saat menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ibas, adalah

Wakil Ketua Umum

(WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

bidang promosi internasional, pariwisata, seni dan budaya.

Sementara Deni Karmaina adalah anak buah Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas di pos yang sama. Deni memegang bidang Pengembangan Eco-wisata.



Si Biru di Selat Makassar

Langkah KPK yang tidak mendalami keterlibatan Deni sangat janggal. Terlebih jika dilihat proyek yang diincar oleh Deni berkaitan dengan perusahaan Migas asal Amerika Serikat, Chevron. Dari Sutan lah akhirnya terbongkar persekongkolan di proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). Proyek eksplorasi gas laut dalam ini dikembangkan Chevron Indonesia Company (Cico). Di Mega proyek di Selat Makassar itu Sutan diketahui mengawal PT Timas Teknik sementara Deni mengawal PT Siapem Indonesia. SKK Migas memutuskan Timas yang memenangkan proyek ini.

“Pak Rudi ingin tahu karena nilainya besar, nanti Pak Rudi yang mengesahkan. Pak Deni berharap yang menang Siapem, sehingga seharusnya Timas dikalahkan dengan alasan itu dia bawa dokumen-dokumen ke SKK, dan karena (nilai) itu besar saya laporan ke Pak Kepala, itu yang menentukan Pak Kepala,” seperti dikatakan oleh Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Gerhard dan Sutan tidak memaparkan proyek apa yang diperebutkan dengan Ibas. Gerhard cuma menyebut peranan PT Chevron dalam perkara ini. “Ini mengenai pengadaan konstruksi ‘offshore’ di Chevron yang mulia,” ujarnya.

Sumber *Aktual* menyebut PT Siapem sengaja dikawal oleh Deni untuk bisa menang. Nantinya ketika proyek ini sudah ditangan, PT Siapem akan mengalihkan proyek ini ke BUMN PT Rekayasa Industri. “Ini modus lama, sangat tipikal. Dari BUMN itu nanti *fee* dibagi rata,” ujar sumber.

Dari penelusuran *Aktual* ternyata Mega proyek yang dikenal dengan sebutan IDD Gendalo-Gehem ini memang sudah diincar tangan kotor sejak tahun 2008. Saat ini Kepala BP Migas Raden Priyono menyetujui proyek yang yang dibagi menjadi lima lapangan lima yakni lapangan gas

Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha dan Gandang. Setidaknya ada 28 sumur bawah laut yang akan diekplorasi.

Namun sebelum dieksplorasi Cico harus melakukan *Front End Engineering Design* (FEED), yaitu studi lengkap mengenai suatu proyek yang dikerjakan oleh sekelompok konsultan. Kongkalikong proyek IDD Gendalo-Gehem ini kemudian terciptah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tender FEED diduga dilakukan dengan tidak wajar. Ada upaya menggondol uang negara dari pembayaran FEED yang masuk dalam bagian *cost recovery*.

Akhir 2009 BP Migas menggelar lelang FEED. Pada pembukaan tahap pertama, cuma ada satu peserta lulus syarat administratif dan teknis, yakni PT Worley Parsons (Australia). Peserta lain, PT Technip Indonesia (berbasis di Prancis), tidak lulus sehingga tender dinyatakan gagal. Pada Januari 2010, lelang diulang lagi, diikuti tiga peserta. Technip dan Worley kembali lulus tahap administrasi.

Technip menawar USD 26,78 juta, lebih mahal ketimbang Worley senilai USD 20,99 juta. Pada akhir April, Chevron merekomendasikan Technip sebagai pemenang tender kepada BP Migas. Lembaga ini sebenarnya meminta negosiasi harga ulang. Tapi nilai kontrak turun tipis menjadi USD 26,03 juta. Worley didiskualifikasi karena melakukan kesalahan administrasi meskipun melakukan penawaran lebih murah.

Investigasi sempat dilakukan oleh tim BP Migas yang dipimpin oleh Kepala Pengembangan Laut Dalam BP Migas Iwan Renaldi Soedigdo. Diduga terjadi *mark up* harga FEED mencapai lima kali lipat. Selain itu ada dugaan kesengajaan PT Worley mengalah dalam tender. Disparitas harga penawaran Techip dan Worley yang mencapai USD 6 juta akan dibagi rata oleh para pihak. Hal inilah yang membuat Iwan akhirnya mundur dari BP Migas, karena gejolak hati nurani.

Sepanjang tahun 2011-2013

KPPU terus melisik pemufakatan yang merugikan negara ini. Pasalnya ongkos FEED akan masuk sebagai bagian *cost recovery* yang akan dibayar negara. Pada Tanggal 25 April 2013 KPPU baru memutuskan hasil investigasinya. Keputusanya PT Chevron dan PT Worley terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5/1999 Tentang Anti Monopoli.

Dalam putusan yang diterima oleh *Aktual*, Cico diwajibkan membayar denda dengan nilai Rp2,5 miliar. Penelusuran *Aktual* juga menemukan kejanggalan. Yakni adanya nama yang sama dalam dua perusahaan yang terkait dengan tender IDD Gendalo-Gehem. Nama itu adalah Bambang Setiaji Kusumo yang tercatat sebagai salah satu komisaris di PT Technip Engineering Indonesia pemenang tender FEED. Nama yang sama juga muncul dalam data komisaris PT Siapem Indonesia, perusahaan yang dikawal oleh rekan Ibas untuk memenangkan proyek fasilitas produksi pasca FEED selesai akhir tahun 2013 lalu.

Selain hilangnya nama Ibas dalam

dakwaan Sutan, jaksa juga tidak menyebutkan peran mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Padahal Karen adalah pihak yang terkait dalam rangka tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Sutan sebagai dakwaan primer. Yakni penerimaan uang sejumlah USD300 ribu untuk pembahasan APBN-P Tahun 2013.

Uang yang dimintakan dalam Surat Dakwaan bernomor: DAK-05/24/03/2015, pertama Sutan didakwa telah menerima uang sebesar USD 140 ribu dari Waryono Karno saat itu menjabat Sekjen

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kasus ini, Sutan juga disebut pernah melakukan komunikasi dengan Waryono di Restoran Edogin, Hotel Mulia Senayan, Jakarta (27/5/2013).

Uang tersebut dikumpulkan oleh



TINO OKTAVIANO/AKTUAL

Waryono dengan meminta kepada Rudi Rubiandini. Rudi juga yang kemudian meminta kepada Karen melalui telepon. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Karen.

Sementara pada dakwaan kedua, Sutan didakwa telah menerima duit USD 200 ribu yang diberikan oleh Kepala SKK Migas kala itu dijabat Rudi Rubiandini sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian terjadi sekitar Juli 2013 dan diterima Sutan melalui anak buahnya Iriyanto Muchyi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sutan juga dituduh telah menerima Rp 50 juta dari Jero Wacik saat menjabat Menteri ESDM.

Selain itu, Jaksa KPK juga mendakwa Sutan telah menerima Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G dari Direktur PT Dara Trasindo Eltra (DTE) Yan Achmad Suep serta menerima satu buah tanah dan bangunan seluas 1.194,38 m² yang berlokasi di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Kota Medan dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri, Saleh Abdul Malik, mantan terpidana korupsi. Sebagai hadiah atas jasa Sutan karena membantu Saleh memperoleh remisi di tahun 2012.

Atas dakwaan tersebut, dengan tegas Sutan membantah semua tuduhan yang dituangkan dalam eksepsi yang dibacakan Sutan sendiri. "Tentang tuduhan menerima Rp 50 juta dari Jero Wacik, itu tuduhan yang dibuat-buat," sanggah Sutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, (20/4) dalam eksepsi sebanyak 13 lembar yang ditulis di atas kertas dobel folio dengan tulisan tangan dan diberi judul 'Mahalnya Arti Sebuah Kejujuran'.

Terkait dengan masalah tersebut, Sutan mengatakan jika dirinya tidak pernah datang sendiri ke Kementerian ESDM. Jika pun datang kata Sutan, dirinya hanya untuk



memenuhi undangan kedinasan dan membawa tamu yang akan menemui Jero. "Saya tidak pernah meminta atau mengharapkan sesuatu kalau berkunjung ke ESDM," kata Sutan.

Bahkan secara terang-terangan dalam persidangan Sutan mengaku, jika dirinya dijadikan korban oleh KPK. "Saya ini korban jargon KPK 'Jujur itu hebat', tapi saya jujur kok malah diperlakukan," kilah Sutan.

Padahal, menurut pengakuan Sutan, selama ini dirinya kerap membantu KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi, diantaranya saat pembahasan DPR terkait pengawasan KPK pada era Antasari Azhar.

"Komisi VII yang salah satunya pimpinannya adalah saya, kami nyatakan bahwa Komisi VII mendukung 100% rencana pencegahan KPK tersebut tanpa izin sama sekali," cetus dia.

Hingga saat ini, Sutan mengaku jika masih belum percaya jika harus duduk di kursi pesakitan.

"Saya telah menyelamatkan uang negara Rp 4 triliun dan Rp 1,4 triliun, tapi kok malah dihadiahi oleh KPK sebagai tersangka? Karena KPK tak pernah mau kalah, sehingga terus-menerus mencari-cari kesalahan saya," bela Sutan.

Terkait dengan penyerahan uang melalui Iriyanto Muchyi dan Iqbal, dalam pembelaannya Sutan menyebut dirinya tidak pernah berkommunikasi atau bertemu

dengan kedua orang yang disebut dalam dakwaan adalah pihak yang mengantarkan uang USD140 ribu dari Kementerian ESDM.

Tak hanya itu saja, Sutan juga membantah adanya penerimaan-penerimaan gratifikasi yang diterima dari sejumlah pihak, termasuk adanya pemberian mobil Alphard oleh Direktur PT Dara Trasindo Eltra, Yan Ahmad Suep. Sutan menyebut bahwa awalnya dia dengan Yan melakukan tukar tambah antara dua mobil Sutan dengan mobil Alphard 2.4 Tipe G.

Saat itu, kata Sutan, dirinya tengah melawat keluar negeri, secara otomatis yang mengurus administrasinya adalah Yan. Namun tukar tambah itu kemudian batal, dan Sutan menyebut dia sudah mengembalikan semua dana Yan yang telah terpakai.

Sedangkan pada dakwaan Jaksa KPK yang menyebut Sutan menerima tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya No 87 Tanjungsari Kota Medan oleh Komisaris PT SAM Mitra Mandiri, Saleh Abdul Malik, juga dibantahnya. Sutan menyebut rumah itu hanya dipinjamkan saat dirinya bertarung pada Pilgub Sumatera Selatan.

Sutan dan Saleh sendiri sudah saling mengenal saat keduanya sama-sama duduk menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Namun nasib sial menghampiri Saleh, karena harus meringkuk dibui karena diperlakukan hukum akibat melakukan korupsi. Sebagai sahabat Sutan pun turun langsung membantu Saleh untuk memperoleh remisi.

Sebagai balas budi, Saleh pun menghadihiai Sutan sebuah rumah ukuran 18 x 66,8 meter atau seluas 1.194,38 meter persegi pada awal 2012. Diperkirakan harga rumah yang tercatat atas nama istri Sutan, Unung Rusyatie tersebut senilai Rp 2,4 miliar.

Dalam eksepsinya, Sutan kemudian memohon kepada Ketua Majelis Hakim, Artha Theresia untuk bisa membebaskan dirinya dari semua dakwaan KPK yang tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada atas nama keadilan. ■ Dddy K

Wapres: Kasus Novel Bukan Kriminalisasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan saat bertugas di Bengkulu merupakan perkara biasa saja sehingga tidak perlu dibesarkan.

"Ini suatu perkara yang menurut saya biasa saja, karena tidak mungkin juga ada masalah yang kemudian dibiarkan saja tanpa diperiksa oleh polisi," kata Wapres Kalla usai bertemu Kapolri Badrodin Haiti dan jajarannya di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (1/5).

Oleh karena itu, Wapres mengimbau supaya penahanan dan penangkapan Novel tidak dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kriminalisasi itu kalau tidak ada kasusnya lalu dibuat-buatkan

kasus. Tetapi kalau ini ada kasusnya, kemudian diperiksa, itu pasti bukan kriminalisasi," kata Wapres.

Novel Baswedan ditangkap petugas Bareskrim, karena dua kali mangkir dari pemeriksaan atas kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap seseorang pada 2004.

Novel ditangkap di rumahnya di kawasan Kelapa Gading Jumat dini hari pukul 00.30 WIB.

Surat perintah penangkapan Novel diregistrasi dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum yang memerintahkan Bareskrim untuk membawa Novel ke kantor polisi.

Surat tersebut menyatakan agar segera dilakukan pemeriksaan, karena Novel diduga keras bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP.



Kejadian perkara tersebut berlangsung pada 18 Februari 2004 di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu, dengan pelapor bernama Yogi Hariyanto.

Pada Februari 2004, Polres Bengkulu menangkap enam pencuri sarang walet, setelah dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di pantai, keenamnya ditembak sehingga satu orang tewas.

Novel yang saat itu berpangkat inspektur satu (iptu) dan menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu, dianggap bertanggung jawab karena melakukan penembakan tersebut. /Ant-Netby Mahbubirrahman

Setelah Lulung, Giliran Ahok Diperiksa Polisi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung memenuhi panggilan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (4/5) pekan lalu. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2014.

Dalam kasus ini, Bareskrim diketahui telah menetapkan dua tersangka masing-masing Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex merupakan pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat, sementara Zaenal merupakan pejabat pembuat komitmen di Suku Dinas Dikmen Jakarta Pusat.

Usai pemeriksaan, Lulung mengatakan dirinya tidak diperiksa



penyidik melainkan sekedar memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya tidak diperiksa. Saya hanya dimintai keterangan sebagai saksi," katanya.

Di saat bersamaan, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pertemuan dilakukan

untuk koordinasi sebelum dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap Ahok.

"Tadi saya ketemu Gubernur untuk tindak lanjut kasus karena nanti akan meminta keterangan beliau dan stafnya," katanya di Mabes Polri mengenai materi pertemuannya dengan Ahok, Senin (4/5).

Penyidik, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan memeriksa Ahok dan beberapa stafnya dalam kasus

dugaan korupsi pengadaan UPS. Sebab dalam perkara ini, Ahok merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi pengadaan UPS.

Lokasi pemeriksaan sendiri ditekankan Budi bisa di Bareskrim atau Balaikota. Hal ini nantinya akan ditentukan penyidik setelah melakukan koordinasi dengan jadwal kerja Gubernur. /Moh Sahlan

Kejagung Isyaratkan Sasar Petinggi TVRI



Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membidik jajaran petinggi TVRI untuk dijadikan tersangka baru, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan program siap siar TVRI tahun anggaran 2012.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Maruli Hutagalung membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi senilai Rp47,8 miliar tersebut.

Dia mengaku, tim yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan, dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) Kejaksaan, tengah menelisik pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat dan menikmati hasil dari korupsi tersebut.

"Tunggu saja (tersangka baru), kita terus sisir dengan periksa saksi dan tersangka," kata Maruli di Jakarta, Jumat (1/5).

Dijelaskan Maruli, pemeriksaan saksi dan tersangka untuk mendapatkan informasi dan keterangan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus itu.

Ia mengisyaratkan, berdasarkan keterangan saksi dan tersangka yang dikumpulkan penyidik, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus yang menyeret komedian Betawi Mandra Naih sebagai pesakitan.

"Ya sabar, lihat nanti saja, kita tidak perlu terburu-buru, ada itu (tersangka baru) tapi tunggu, nanti juga kita informasikan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi apakah tersangka baru tersebut dari jajaran pejabat TVRI, Maruli menjawab diplomatis, yang jelas, kata Maruli, tim penyidik

akan terus mengungkap kasus pengadaan 15 paket program siap siar yang dimenangkan oleh 8 rekanan itu.

"Tunggu saja, nanti kita umumkan, tenang siapaun yang ikut terlibat harus ikut bertanggungjawab," pungkasnya.

Dalam pengembangan yang dilakukan, penyidik belum lama ini pernah memeriksa dua saksi yakni, Direktur Keuangan TVRI, Eddy Machmudi yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur Utama PT Lunar Jaya, Pie Tien.

Keduanya diperiksa mengenai koronologis perencanaan anggaran, termasuk penunjukan Yulkasmir (tersangka) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pembayaran atau transfer uang yang diduga berasal dari TVRI untuk kegiatan pekerjaan pengadaan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Tony T Spontana menegaskan, pengembangan kasus di lingkungan TVRI masih terus dilakukan oleh jaksa penyidik Gedung Bundar.

Dia menuturkan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka dan satu orang saksi.

"Tiga tersangka. Di antaranya Mandra, Direktur PT Media Art Image Iwan Chaermawan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yulkasmir dan satu saksi Andi Diansyah yang merupakan staf PT Viandra Production," papar Tony di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (30/4) kemarin.

Terkait agenda pemeriksaan ketiga tersangka dan satu saksi tersebut, lanjut Tony, diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Direktur Program dan Bidang TVRI, Irwan Hendarmin.

"Pemeriksaan mengenai dugaan ada tidaknya keikutsertaan Tersangka IH dalam mengambil andil memenangkan perusahaan milik Tersangka M dan Tersangka IC dalam kegiatan Pengadaan Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Tahun Anggaran 2012 termasuk aliran uang yang diterima setelah PT. Viandra Production dan PT. Media Arts Image

menjadi pemenang untuk beberapa paket pekerjaan," pungkasnya.

Sekedar informasi, penyidik Pidsus Kejagung akhirnya meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi program siap siar TVRI senilai Rp 47 miliar tahun anggaran 2012 ke penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka.

Keempat tersangka yakni pelawak kondang Mandra Naih selaku Direktur Viandra Production, lalu Iwan Chermawan Direktur PT Media Art Image dan Yulkasmir, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga pejabat teras di PT TVRI dan Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Bidang LPP TVRI Tahun 2012. Dari keempat tersangka itu hanya Irwan Hendarmin yang belum dilakukan penahanan.

Keempat tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20/2001 dengan ancam 20 tahun penjara. *(Nebby Mahtubirrahman)*

Jaksa Agung Tak Takut Peringatan Presiden Prancis

Jaksa Agung RI HM Prasetyo menegaskan dirinya tidak gentar dengan peringatan sekaligus ancaman dari Presiden Prancis yang akan memberi sanksi diplomatik ke Pemerintah Indonesia hingga menggalang kekuatan negara-negara Uni Eropa dan Australia.

Lebih lanjut Prasetyo mengatakan eksekusi mati tetap dijalankan terhadap sejumlah terpidana hukuman mati hingga seluruh syarat teknis dan yuridis terpenuhi.

"Eksekusi mati jalan terus. Tekanan seperti ini sudah biasa terjadi. Sama seperti sebelum-sebelumnya," jelas Prasetyo saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/4).

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prancis, Francois Hollande memberi peringatan keras sekaligus ancaman kepada pemerintah Indonesia jika warga negaranya, Sergei Atlouh selaku terpidana mati jadi dieksekusi. *(Wisnu)*



Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK, Mencekik Leher Rakyat

Senin, 6 April lalu, Stasiun Cikoya Kabupaten Bogor dan Stasiun Tenjo Kabupaten Tangerang memblokir rel kereta api. Ratusan warga pengguna setia kereta api ekonomi marah. Kenaikan tarif KA dan Commuter Line menjadi penyebabnya.

Tangga peron atau sarana penumpang untuk naik ke kereta yang terbuat dari besi jadi sasaran massa. Tangga itu dirobohkan hingga menutup jalur rel. Demikian halnya rel bekas yang berada di Stasiun Tenjo. Praktis kereta tidak bisa melalui jalur tersebut.

PT Kereta Api memutuskan untuk menghentikan perjalannya hanya sampai di Parungpanjang. KRL Commuter Line relasi Tanah Abang - Maja dan kereta ekonomi relasi Angke - Rangkasbitung diputuskan begitu menyusul aksi di Stasiun Cikoya dan Stasiun Tenjo.

Pemblokiran berlangsung sejak pukul 06.00 Wib. Selanjutnya, pendemo meminta kesediaan warga yang juga calon penumpang tujuan Tanah Abang maupun Angke membubuhkan tandatangan. Poinnya satu, tarif kereta ekonomi maupun

Commuter Line turun.

Sepekan sebelumnya aksi, 1 April 2015, PT KAI (Persero) mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif kereta api Kelas Ekonomi Jarak Sedang dan Jarak Jauh. Ada empat alasan utama kenapa tarif kereta dinaikkan.

Dalam keterangan tertulisnya awal bulan ini, fluktuasi harga bahan bakar minyak menjadi salah satu penyebabnya. Alasan kedua adanya perubahan pedoman perhitungan tarif. Dari sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri No 28 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri No 69 Tahun 2014. Ketiga, karena ada perubahan margin dalam perhitungan biaya operasional KA ekonomi yang semula 8 persen menjadi 10 persen.

Alasan terakhir karena fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah, khususnya terkait impor suku cadang kereta api.

Khususnya kereta ekonomi relasi Angke - Merak yang masuk kategori transportasi kereta jarak sedang, mengalami kenaikan hingga 60 persen. Dari tarif sebelumnya sebesar Rp 5.000 menjadi Rp 8.000.

Prosentase kenaikan bahkan mencapai 150 persen untuk kereta

Dua petugas mengganti tulisan di papan yang berisi informasi perjalanan kereta api di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Rabu (1/4).

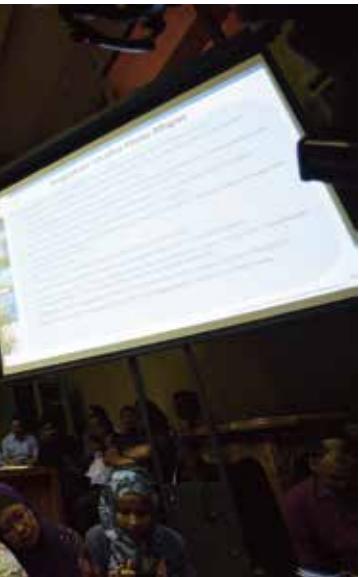
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetijpto (kiri), Direktur Utama PLN Sofyan Basir (tengah) dan Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso (kanan) mengikuti rapat kerja antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4).

relasi Angke Rangkasbitung. Dari tarif sebelumnya sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 5.000.

Menanggapi aksi tersebut, Manajer Humas PT Kereta Api Commuter Jabodetabek, Eva Chairunisa, dalam keterangannya kepada wartawan menepis aksi blokade rel di Stasiun Cikoya dan Stasiun Tenjo karena kebijakan kenaikan tarif baru. Aksi dilakukan karena warga menginginkan kereta ekonomi tidak berhenti di Stasiun Cikoya dan Stasiun Cicayur.

“Keterlambatan terjadi akibat adanya demonstrasi dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi unjur rasa dengan memblokir jalur rel di Stasiun Cikoya dan Stasiun Tenjo yang menginginkan KA Lokal tetap berhenti di Stasiun Cicayur dan Cikoya,” katanya.

Pada saat yang sama, 2 April, PT Pertamina secara resmi juga menaikkan harga elpiji 12 kg. Kenaikan



sebesar Rp 666,67 per kg atau sekitar Rp 8.000 per tabung menjadikan harga elpiji 12 kg yang awalnya Rp 134.000 per tabung menjadi Rp 142.000 per tabung untuk harga agen.

Alasannya, disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang karena dipicu kerugian yang dialami perseroan. Khususnya akibat harga BBM tidak mencapai harga keekonomian. Untuk mengantisipasi kerugian, manajemen Pertamina memutuskan menaikkan harga gas elpiji 12 kg.

Lalu, harga BBM sejak pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla juga naik-turun. Tercatat, sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, harga BBM sudah lima kali mengalami penyesuaian.

Awalnya, pada November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM. Pada Januari 2015, pemerintah kembali menurunkan harganya. Masih di bulan Januari, atau dua pekan berselang, harga BBM turun lagi. Kemudian pada awal Maret 2015, harga BBM kembali naik dan terakhir pada 28 Maret lalu harganya kembali dinaikkan.

Untuk harga terakhir, BBM jenis premium untuk daerah penugasan Jawa Madura dan Bali (Jamali) naik sebesar Rp 500, dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400 per liter. Di luar

Jamali, pemerintah menetapkan kenaikannya menjadi sebesar Rp 7.300 per liter. Untuk jenis solar subsidi tercatat naik Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter

Pegangan PT PLN (Persero) terhadap nilai tukar Rupiah terhadap dolar dan dampak dari kenaikan BBM serta inflasi juga mempengaruhi tarif dasar listrik (TDL). Hingga kini, PT PLN memang tidak pernah mengumumkan secara resmi soal penetapan tarif listrik baru.

Rencana kenaikan TDL tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Sesuai Permen tersebut, TDL akan dilakukan penyesuaian tarif setiap bulan. Khususnya TDL rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 volt ampere (VA). Sedianya, pemberlakuan kenaikan berlaku pada 1 Januari 2015 lalu, namun ditunda.

Kebijakan demi kebijakan di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi membuat

rakyat semakin terjepit. Sebab dampaknya secara langsung membuat harga-harga kebutuhan pokok masyarakat terkerek naik.

Masyarakat kecewa dengan pemerintahan hasil Pilpres 2014 yang baru berjalan 6 bulan. Survei Poltracking Indonesia mencatat 66,6 persen publik kecewa dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Kenyataan demikian sangat beralasan sebab masyarakat kecewa dengan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita.

Hasil sigi nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 23-31 April 2015 itu disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, Minggu (19/4) lalu.

Kekecewaan publik di bidang ekonomi tertinggi dan diikuti kekecewaan di bidang hukum dan keamanan, berturut-turut 55,6 persen, dan 50,7 persen. Khusus kekecewaan di bidang ekonomi, ditekankan Hanta, disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya BBM. ■ Soemitro

Rincian Kenaikan Tarif KA Antar Kota (Jarak Jauh)				
Nama Kereta	Tujuan	Harga Awal	Harga Sekarang	Prosentase
KA Kertajaya	Pasar Senin - Pasar Turi	Rp 50.000,-	Rp 90.000,-	80%
KA Brantas	Pasar Senin - Kediri	Rp 55.000,-	Rp 90.000,-	100%
KA Kutojaya Utara	Pasar Senin - Kutoarjo	Rp 40.000,-	Rp 80.000,-	100%
KA Bengawan	Pasar Senin - Purwosari	Rp 50.000,-	Rp 80.000,-	60%
KA Progo	Pasar Senin - Lempuyangan	Rp 50.000,-	Rp 75.000,-	35%
KA GBM Selatan	Pasr Senin - Surabaya Gubeng	Rp 50.000,-	Rp 110.000,-	100%
KA Matarmaja	Pasar Senin - Malang	Rp 65.000,-	Rp 115.000,-	77%
KA Tawangjaya	Pasar Senin - Semarang Poncol	Rp 45.000,-	Rp 65.000,-	44%
KA Tegal Arum	Jakarta Kota - Tegal	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	100%
KA Serayu	Jakarta kota - Purwokerto	Rp 35.000,-	Rp 70.000,-	100%
KA Mantab	Pasar Senin - Madiun	Rp 55.000,-	Rp 130.000,-	136%

Rincian Kenaikan KA Perkotaan (Jarak Sedang)				
Nama Kereta	Tujuan	Harga Awal	Harga Sekarang	Prosentase
Merak Jaya	Merak - Angke	Rp 5.000,-	Rp 8.000,-	60%
Patas Merak				
Banten Ekspres	Purwakarta - Jakarta Kota	Rp 3.000,-	Rp 6.000,-	100%
Cilamaya Ekspres				
Cepat Purwakarta	Angke - Rangkasbitung	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-	150%
Lokal rangkas				
Ekonomi Lokal	Cikampek - Jakarta Kota	Rp 2.500,-	Rp 5.000,-	100%
Jatiluhur				
Walaha Ekspres	Jakarta Kota - Purwakarta	Rp 3.000,-	Rp 6.000,-	100%
Ekonomi Lokal				

Blusukan Itu Berbuah Kemelaratan

Masuk dari satu pasar ke pasar lain, berdialog dengan pedagang kecil, kemudian diakhiri makanan di warung pinggir jalan. Kerja politik yang disebut blusukan itu sangat intensif dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014.

Kesan sebagai pemimpin rakyat marginal dan terpinggirkan juga disandang Jokowi, terutama saat blusukan itu dibumbui janji-janji manis yang membuat hati rakyat. Bekas Wali Kota Solo ini pun secara meyakinkan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia hingga 2019 mendatang.

Kisah heroik enam bulan silam itu seolah tinggal kenangan. Dalam waktu beberapa

bulan kepemimpinannya, Jokowi sukses menenangkan hati rakyat meski rakyat tercekik oleh kenaikan harga-harga bahan pokok yang harus mereka beli. Jeritan rakyat pun tidak terdengar meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik setelah dilempar mengikuti harga pasar.

"Rakyat Indonesia memang penyabar, memaafkan, sekaligus kadang pelupa. Tapi jangan



Ilustrasi Perbandingan Harga Sebelum dan Sesudah Jokowi Presiden

Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014. Banyak perubahan kebijakan ekonomi yang berubah dibanding kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai gambaran, berikut ini perubahan harga-harga komoditas itu.

Energi		
Jenis Komoditas	Harga Sebelum Jokowi	Harga Saat Jokowi
Premium	Rp 6.500,- /liter (subsidi)	Rp 8.500,- /liter (subsidi dicabut/ fluktuatif harga pasar)
Solar	Rp 5.500,- /liter (subsidi)	Rp 7.500,- /liter (subsidi Rp1.000,- liter, harga fluktuatif)
Gas Elpiji 12kg	Rp 124.000,- /tabung (rata-rata/ tergantung daerah)	Rp 141.000,- /tabung (rata-rata/ tergantung daerah)
Gas Elpiji 3kg	Rp 12.750,- /tabung (rata-rata/ tergantung daerah)	Rp 16.000,- /tabung (rata-rata/ tergantung daerah)

Kebutuhan Pokok (Kisaran Rata-rata Nasional/ fluktuatif)		
Jenis Komoditas	Harga Sebelum Jokowi	Harga Saat Jokowi
Beras	Rp 8.966,- /kg	Rp 9.933,- /kg
Gula	Rp 11.289,- /kg	Rp 11.548,- /kg
Minyak Goreng	Rp 11.607,- /liter	Rp 11.206,- /liter
Daging Sapi	Rp 99.489,- /kg	Rp 101.442,- /kg
Daging Ayam	Rp 30.132,- /kg	Rp 27.185,- /kg
Telur Ayam	Rp 20.636,- /kg	Rp 19.568,- /kg

salah, rakyat kita tak bisa selamanya dibodoh-bodohi," ujar ulama Nahdlatul Ulama (NU) KH Nuril Arifin Husen alias Gus Nuril dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir April 2015.

Jokowi memang berprestasi membuat rakyat diam meski sejak November 2014 harga BBM Premium dinaikkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 (kini harga BBM fluktuatif mengikuti harga pasar). Rakyat juga diam ketika imbas kenaikan harga komoditas strategis itu sudah menggrogoti harga kebutuhan pokok dan menggerus dapur dan daya beli mereka.

Harga kebutuhan pokok seperti beras, rempah-rempah, sayur-mayur, gula, daging, dan lauk-pauk lainnya semakin melejit.

"Namanya harga pasar, sekali naik ya tidak mau turun lagi. Biar juga harga BBM turun dan Presiden blusukan, kita beli kebutuhan di pasar yang harganya tetap saja segitu (mahal)," ujar Sufiah, seorang pedagang Warung Tegal (Warteg) yang diwawancara di Kalibata, Jakarta Selatan.

Gus Nuril menyebut sikap diam masyarakat ini sebagai sebuah ironi yang menyesakkan dada. Rakyat yang hidup di pasar-pasar, perkampungan miskin dengan keuangan pas-pasan, tidak pernah dianggap pahlawan. Namun kenapa orang yang seolah-olah rakyat kecil dan seolah-olah peduli pada jeritan rakyat sangat dielu-elukan?

"Rakyat miskin dan terlantar katanya dipelihara oleh negara. Tapi kenapa banyak orang miskin dan terlantar di jalanan justru dihinakan. Sementara pemerintah yang berkewajiban memelihara justru bangga dan tetap merasa terhormat? Sungguh fakta ironis," tuntas Gus Nuril. ■ Moh Salhan

PASANG SEKARANG!

50%

DISKON PASANG IKLAN DI MAJALAH AKTUAL & AKTUAL.CO
SELAMA JAKARTA FAIR 2015, 29 MEI - 5 JULI 2015

aktual
News Online - Internet TV - Magazine

48
JAKARTA
FAIR
KEBAYORAN
2015

Timor Leste Kembangkan 3 sektor Utama Investasi

Pemerintah Timor Leste saat ini sedang mengembangkan tiga sektor utama untuk menambah jumlah investor yang masuk. Ketiga sektor tersebut dipilih berdasarkan prinsip *comparative advantage* (keunggulan komparatif) yaitu pertanian, pariwisata, dan perminyakan.

Wakil Menteri Keuangan Timor Leste, Helder Lopes, mengatakan, ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang atraktif bagi investor. Menurutnya, ketiga sektor tersebut terus dikembangkan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

"Itu semua sedang kita atur secara baik supaya kalau orang mau tanam modal mereka enggak usah pusing-pusing dengan permasalahan ini," ujar Helder saat wawancara khusus dengan *Aktual* di Jakarta, Kamis (30/4).

Saat ini, pemerintah Timor Leste sedang mengembangkan komoditi kopi organik sebagai salah satu komoditi ekspor unggulan. Menurutnya, kopi organik di Timor Leste memiliki ciri khas tersendiri.

"Tapi sampai saat ini jumlahnya masih belum banyak, ini yang mau terus kita tingkatkan," ujar Helder.

Dia menjelaskan, kopi organik tersebut telah menyentuh pasar internasional, seperti Australia dan beberapa negara Eropa.

"Bahkan Starbucks di AS beberapa ada dari kopi organik kami juga, channelnya masuk melalui Australia."

Helder juga mengatakan bahwa pemerintah Timor Leste terus menjaga komoditi ekspor tersebut tetap mementingkan kualitas. "Kalau kualitas, kita kecil sekali jumlahnya.

Ini yang sedang kita kembangkan, kita cari comparative advantagenya."

Lebih lanjut dikatakan Helder, saat ini terdapat dua kelompok investor di Timor Leste, yaitu investor khusus untuk proyek pemerintah dan riil investor.

"Untuk investor proyek biasanya mereka ke Timor Leste untuk mencari proyek, misalnya jalan raya, setelah selesai proyeknya mereka bisa kembali lagi. Tapi ada juga investor riil yang mereka menanam modal di sana," kata dia.

Cara Mendorong Investasi Masuk

Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah Timor Leste untuk mendorong investasi masuk yaitu dengan mengevaluasi dan melakukan reformasi struktural pada pemerintahannya, seperti hukum perpajakan, investasi, dan lahan.

"Kita telah me-reform pajak kita dari tahun 2008 dengan membuat hukum perpajakan kita yang lebih baik, misalnya corporating tax kita hanya 10 persen, yang mana hal itu terendah di region. Kita juga berikan tax holiday bagi beberapa negara," jelasnya.

Helder mengatakan pihaknya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, seperti membangun infrastruktur. Selanjutnya, framework untuk membangun ekonomi ke depan yang berdasarkan pilar pada sektor ekonomi pertanian, pariwisata, dan perminyakan.

"Satu hal yang ingin saya katakan disini adalah saya ingin meletakkan konsep pembangunan ekonomi kami dalam konsep regional, karena kami ingin masuk ASEAN dan ASEAN Economic Community. Dan sekarang yang

Helder Lopes

perlu kami lakukan adalah terus melanjutkan bagaimana kami mempersiapkan diri supaya kalau kami diterima di ASEAN kami memanfaatkan pasartersebut dengan benar untuk ekonomi kami, ketimbang kita masuk tapi belum ready dan jadi bumerang."

Selain itu, kondisi ekonomi yang baik pun terus dijaga, salah satunya yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi di Timor Leste pada kuartal terakhir 2014 berada di kisaran 3 persen. Angka tersebut jauh berkurang jika dibandingkan dengan laju inflasi Timor Leste tahun 2012 yang mencapai 8,2 persen dan tahun 2013 hingga 10 persen.

"Sampai sekarang tetap kita jaga di kisaran 3 persen inflasinya.



Setelah kami evaluasi, inflasi ini menurun karena apresiasi dolar AS, harga-harga di sana jadi lebih murah. Kedua yaitu faktor harga minya dunia yang murah. Ke depan, bottleneck infrastruktur kita agar supply barang bisa lebih lancar."

Inflasi yang relatif rendah tersebut menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Namun, kata dia, kondisi saat ini tidak membuat pendapatan meningkat.

"Inflasi turun tapi pendapatan enggak meningkat. Kita mau dorong supaya inflasi turun tapi juga pendapatan rumah tangga meningkat. Sekarang masalah terbesar kita adalah informal sektor, banyak yang bekerja di bidang pertanian hanya untuk memenuhi

kebutuhan makan saja."

Penerimaan Negara

Anggaran pemerintah Timor Leste saat ini hampir 90 persen masih didapat dari penjualan minyak, sedangkan 10 persen dari pajak. Menurut Helder, penerimaan tersebut saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Dia mengatakan, eksplorasi minyak yang selama ini dilakukan pemerintah Timor Leste hasilnya tidak langsung digunakan, namun disimpan di Petroleum Fund.

"Semua hasilnya kita taruh di sana, setiap tahun kita hanya mengambil 3 persen dari uang itu ke budget, lalu ditambah lagi dengan

pajak. Jadi sekarang kita punya uang di Fund itu sudah sekitar USD17 miliar, cukup substansial karena budget kita hanya sekitar USD1,5 miliar," jelas dia.

Helder menambahkan saat ini masalah negaranya bukan dari faktor uang, namun kemampuan pemerintah untuk menggunakan uang. Pihaknya tidak ingin memiliki kapasitas uang, namun tidak tahu cara membelanjakannya secara efektif.

"Tapi sejauh ini ada koordinasinya. Kita dari Kementerian Keuangan selalu merekomendasikan kementerian lainnya untuk melakukan anggaran sesuai dengan kemampuan mereka, jangan sesuai ambisi," pungkasnya. ■ Nicha Muslimawati

Kemenhub Anggarkan Rp20 Miliar Untuk Mudik Gratis 2015



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk program mudik gratis bagi pesepeda motor yang diangkut dengan kapal pada Idul Fitri 2015.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan, dana tersebut dipakai untuk menggerakkan dua kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan dua kapal pertambahan TNI AL.

"Kita anggarkan 'doubled' tahun ini Rp20 miliar, nanti ada empat kapal dari Pelni dan Kapal TNI AL," ujar

Bobby di Jakarta, Rabu (29/4).

Dengan adanya empat kapal tersebut, lanjut Bobby, pihaknya bisa meningkatkan kapasitas pemudik dari 5.100 pemudik pada Idul Fitri 2014 menjadi 10.000 pemudik pada

Idul Fitri 2015. "Artinya kita sudah ada persiapan, dengan anggaran yang 'doubled', kita harapkan cukup untuk menampung pemudik," jelasnya.

Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut pun menerapkan mudik gratis dua tahap, yakni tahap pertama atau pemberangkatan akan dimulai pada 13 Juli (H-4) dan 15 Juli (H-2), sementara kepulangan ke Jakarta akan dilakukan pada 22 Juli (H+5) dan 24 Juli (H+7) Idul Fitri 2015.

Manajer Komunikasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Akhmad Sujadi sebelumnya mengatakan pihaknya akan

mengerahkan dua kapal, yakni Kapal Ciremai dan Kapal Dobonsolo yang mampu mengangkut 2.000 sepeda motor dan 10.000 penumpang.

Sujadi mengatakan tujuan utama mudik Idul Fitri tahun ini masih sama seperti Idul Fitri 2014, yakni menuju Semarang. Selain itu, dia mengatakan Pelni juga merombak 17 kapal, masing-masing tipe 2.000 delapan kapal dan 1.000 sembilan kapal dengan menghilangkan kelas kabin atau kelas eksekutif menjadi seluruhnya kelas ekonomi.

Sujadi memprediksi penumpang Idul Fitri tahun ini mengalami penurunan sekitar lima hingga 10 persen karena adanya instruksi Kementerian Perhubungan untuk maksimal keterisian 135 persen. "Tapi kami mengajukan hingga 200 persen karena masih aman untuk masuk," katanya.

Tak berbeda dengan Idul Fitri 2014, tahun ini pun Pelni mengerahkan 25 kapal, di antaranya Tipe 2.000 delapan kapal, tipe 1.000 sembilan kapal, tipe 500 tiga kapal, tipe 3000 satu kapal, tipe Ro Ro tiga kapal dan jetliner satu kapal Sujadi mengatakan lintas-lintas terpadat, di antaranya Surabaya, Makassar, Ambon, Nunukan, dan Nusa Tenggara Timur. /Ismed Eka Kusuma

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menyusahkan Pengusaha

Pemerintah telah menerapkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan memberi kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan bagi investor. Namun ternyata banyak investor yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengeluh karena sistem ini bertele-tele dan melelahkan.

"Banyak yang mengeluh soal pelayanan terpadu satu pintu. Di Jakarta saja kami menerima 200 aduan, padahal Jakarta adalah tolak ukur dalam implementasi kebijakan pemerintah," kata Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Nofel Saleh Hilabi di Jakarta, Selasa (28/4).

Rata-rata keluhan pengusaha

itu menyangkut izin tempat usaha. Pasalnya, kebanyakan pengusaha-pengusaha skala kecil maupun menengah yang membuka usahanya di wilayah pemukiman akan tetapi ketika mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di PTSP, izin tersebut tidak dikeluarkan karena lokasi tidak sesuai peruntukan.

"Padahal sebelum adanya PTSP ini, pengusaha yang mengurus surat izin tersebut tidak ada masalah," cetusnya.

Akibat dari tidak keluarnya izin tersebut, Nofel mengaku akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran yang meningkat lantaran pengusaha tidak diberikan izin untuk berusaha. Selain



itu, pengusaha yang tidak memiliki izin tempat usaha juga tidak bisa mengembangkan usahanya karena tidak akan mendapatkan akses ke perbankan.

"Jadi secara tidak langsung PTSP ini telah mematikan dunia usaha karena banyaknya usaha yang tidak bisa melanjutkan perizinan dan tidak punya kepastian usaha," tuntasnya. /Moh.Sahlan

BI: Kewajiban Pembayaran ke IMF Bukan Utang

Bank Indonesia (BI) menyatakan kewajiban pembayaran oleh otoritas moneter tersebut ke International Monetary Fund (IMF) bukan merupakan utang.

"Pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi dan Pak SBY terkait kewajiban pada IMF tidak salah. BI punya kewajiban pada IMF tapi bukan utang," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs di Jakarta, Selasa (29/4).

Peter menegaskan, posisi kewajiban sebesar 2,8 miliar dolar AS tersebut bukan utang kepada IMF dalam bentuk pinjaman yang selama ini dikenal. "Kewajiban



tersebut adalah alokasi SDR (special drawing rights) yang timbul sebagai konsekuensi kita sebagai anggota IMF. Seluruh anggota IMF mendapat alokasi SDR tersebut," ujarnya.

Sebagai anggota IMF, lanjut Peter, Indonesia membayar iuran sehingga kita memperoleh alokasi SDR sesuai kuota dan dicatat sebagai bagian cadangan devisa. "Secara teknis pencatatan, alokasi tersebut

jugadapat sebagai kewajiban kita," kata Peter.

Sejak 2009, pencatatan teknis alokasi SDR tersebut dilakukan dalam kewajiban pada IMF. Hal tersebut juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF, karena alokasi tersebut sebagai konsekuensi keanggotaan, maka akan tetap muncul sepanjang Bank Indonesia masih menjadi anggota.

"Berbeda dengan pinjaman ketika krisis 98 yang memang bisa dilunasi setelah kita punya kemampuan tanpa harus keluar dari keanggotaan," ujar Peter.

Utang Indonesia kepada IMF saat tahun 1998, dilakukan untuk kebutuhan neraca pembayaran yang tergerus akibat krisis. Pinjaman tahun 1998 tersebut (USD9,1 miliar) telah dilunasi seluruhnya pada 2006.

/Tri Harningsih

Privatisasi Tiga BUMN Bakal Mulus

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR bersepakat untuk menjalankan program privatisasi BUMN melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.

Tiga BUMN itu adalah PT Antam (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Mayoritas fraksi di DPR meminta agar pemerintah berupaya menghentikan adanya kepemilikan saham asing di perusahaan BUMN yang melantai di bursa saham.

"Kami minta agar saham asing secara effort dijaga agar tidak ditambah. Ini memang nggak wajibkan, karena kami sadar pemerintah tak punya kewenangan untuk itu," kata ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4).

Menteri BUMN Rini Soemarno tampak kegirangan karena permohonan rights issue tiga BUMN disetujui DPR. "Kami sangat berterimakasih. Kami akan

melakukan usaha agar kepemilikan saham asing tidak bertambah," katanya.

Porsi kepemilikan saham pemerintah di Antam saat ini sebesar 65%. Rencananya Antam akan memperoleh dana segar Rp 4,39 triliun lewat rights issue. Sebanyak Rp 3,5 triliun merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan setoran publik Rp 1,89 triliun. Dana ini akan dipakai membiayai proyek FeNi di Halmahera Timur dan Anode Slide.

Adapun porsi kepemilikan saham pemerintah di Adhi Karya sebesar 51%. Kemudian Pemerintah akan menyuntik Rp 1,4 triliun melalui dana PMN, dan dana publik Rp 1,345 triliun. Dana sebanyak itu akan dipakai membiayai proyek transportasi massal perkotaan, Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek.

Untuk Waskita Karya, kepemilikan saham pemerintah mencapai 66,02%. Perusahaan konstruksi ini akan digelontori dana PMN Rp 3,5 triliun dan dana publik Rp 1,8 triliun. Dana itu untuk membangun tol di Pulau Jawa dan



Sumatera serta bangun transmisi listrik 500 KV di Sumatera.

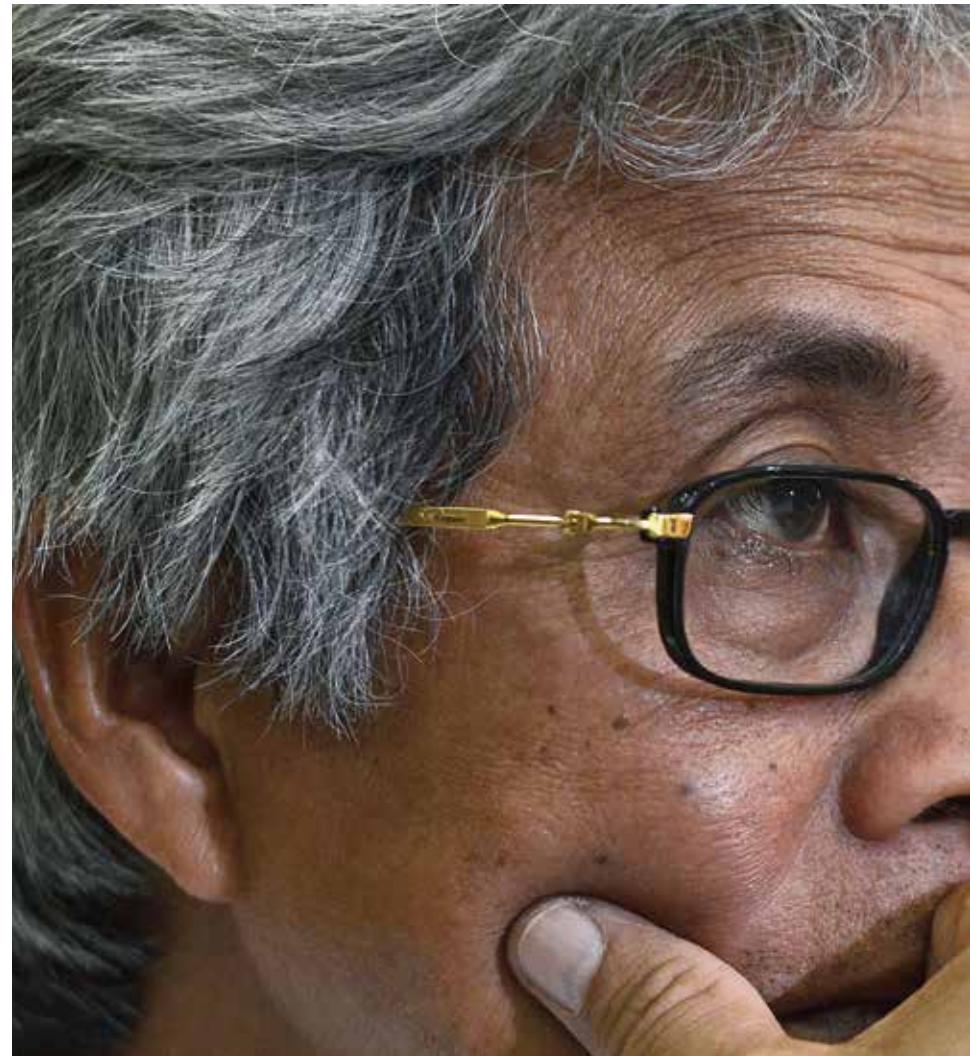
"Program rights issue untuk Adhi Karya dan Waskita Karya akan dilaksanakan pada akhir Juli 2015 sedangkan Aneka Tambang ditargetkan bisa berjalan pada triwulan III-2015," ucap Rini. /Moh Sahlan

Pertamina Ketularan Petrobras

Jalan utama di Sao Paolo, Brasil penuh dengan manusia 15 Maret lalu. Bukan sedang memeriahkan karnaval tahunan yang sangat terkenal di Negeri Samba tersebut. Namun kali ini mereka melakukan aksi demonstrasi besar yang meminta Presiden Dilma Rousseff mundur dari jabatanya. Dilma dituduh terlibat dalam skandal kasus korupsi di National Oil Company (NOC) Petrobras. Perusahaan Migas terbesar di Amerika Latin ini disebut merugi hingga Rp26 Triliun akibat skandal korupsi yang dilakukan saat Dilma menjabat sebagai *chairwoman* dan Menteri ESDM Brasil pada 2003-2010.

Menanggapi tuduhan tersebut Dilma membantah terlibat dan mendukung penuntasan penyidikan kasus korupsi yang menyeret 40 politisi itu. Seperti dikutip dari BBC, modus suap yang dilakukan pejabat Petrobras meliputi pemberian persentase dari proyek pembangunan infrastruktur migas yang dibangun oleh Petrobras. Mantan Direktur Petrobras Paulo Roberto Cosata yang bekerja di perusahaan itu pada 2004-2012 mengatakan kepada penyelidik mengenai adanya politisi yang menerima komisi sebesar 3 persen dari nilai kontrak selama periode tersebut.

Kasus korupsi yang merugikan perusahaan negara terbesar di Brasil itu membenamkan negara dalam jurang resesi. Padahal pada tahun 2013 Brasil yang tergabung dalam BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok), sempat diprediksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai salah satu dari lima negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di



dunia. Pendapatan per kapita Brasil pada 2013 tercatat 11.173 dollar AS atau berada di posisi ke-60 (menurut IMF).

Kondisi serupa kali ini dialami oleh PT Pertamina sebagai NOC milik Indonesia. Akhir pekan lalu Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto nampak tertunduk malu di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kerugian yang dialami Pertamina di dua bulan pertama tahun 2015. "Waktu itu kami menjual rugi BBM ke pasar," kata Dwi dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu, 22 April 2015.

Pertamina sendiri mengakui kerugian tersebut merupakan titik nadir Pertamina sepanjang sejarah bisnis migas di Indonesia. "Sepanjang sejarah, Pertamina tidak pernah

membukukan kerugian, serupiah pun tidak. Tetapi bulan Januari ini kerugian mencapai USD35 juta," ujar Vice Senior Marketing Pertamina, Suhartoko di Terminal BBM Malang.

Pertamina beralasan laba bersih minus Rp2,7 triliun pada Januari-Februari 2015 karena kerugian bisnis hilir yang mencapai USD368 juta. Kerugian tidak bisa dihindari meskipun dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) periode Januari-Februari 2015 laba ditargetkan USD280 juta. Faktor lain yang dijadikan kambing hitam Pertamina adalah penerapan harga jual BBM penugasan dan PSO yang ditetapkan oleh pemerintah tidak selalu mengacu pada formula yang telah ditetapkan, tetapi



Foto kiri: Dwi Soetjipto

Foto kanan: Hafisz Tohir

juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pertamina terpaksa menjual mahal BBM kepada konsumen karena Pertamina adalah perusahaan negara.

Sontak Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir tidak tinggal diam menerima alasan pertamina tersebut. Berdasar RKAP yang disusun, Pertamina mengalami target tercecer mencapai USD700 juta. Padahal sampai bulan Februari, Pertamina mengalami kerugian USD212 juta atau sekitar Rp2,7 triliun. Menurutnya, pertamina merugi USD1 miliar (Rp13

triliun kurs Rp13.000) hingga akhir tahun jika tidak merubah perhitungan dengan cara yang efisien.

“Januari-Februari 2015 Pertamina mengalami kerugian USD212 juta (Rp2,7 Triliun). Kalau kita hitung target keuntungan Pertamina per bulan Maret itu USD500 juta. Artinya ada target yang tercecer USD712 juta,” ujar Hafisz.

Menurutnya, Pertamina telah merugi USD712 juta berdasarkan perhitungan kerugian dari laba bersih USD210 juta ditambah dengan target yang tidak tercapai USD502 juta. Jika bulan Desember dirata-rata maka Pertamina bisa menelan kerugian hingga USD1 miliar.

Guna menutupi kerugian dan mengejar target sesuai dengan RKAP, Pertamina memutar otak lebih dalam untuk melakukan berbagai macam efisiensi. Namun, efisiensi yang dilakukan tidak memandang bulu, menjadikan rakyat sebagai korbananya. Pada Triwulan I 2015 Pertamina mengaku telah berhasil mencapai efisiensi sebesar USD46,25 Juta yang kontribusi dari seluruh lini di Pemasaran dan Niaga.

“Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh dari program *Sales Marketing Excellence, Supply Chain Excellence, Shipping Excellence, Losses Control* yang didukung dengan sistem informasi teknologi (IT) yang terintegrasi di setiap proses bisnis di Pertamina,” kata Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro.

Pada akhir Maret, Bos Pertamina kembali mengaku telah meraup untung USD28 Juta atau sekitar Rp336 miliar. Rinciannya, realisasi pendapatan Januari-Maret 2015 mencapai USD10,67 miliar, beban pokok penjualan USD9,67 miliar,

beban usaha USD 449 juta, laba usaha USD550 juta. Sehingga laba bersih mencapai USD28 juta dengan EBITDA USD932 juta.

Wacana untuk melakukan efisiensi yang lain adalah dengan mengurangi konsumsi premium, atau jika bisa menghapuskan premium seperti yang telah direkomendasikan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri. Pertamina menegaskan saat ini Indonesia masih mengimpor premium dikarenakan kapasitas kilang yang dimiliki Indonesia hanya mampu memenuhi 40 persen kebutuhan BBM.

“Sebanyak 60% nya lagi dari luar negeri dengan jumlah 10 juta barel per bulan. Kapasitasnya akan sangat jauh berkurang 50% dari kebutuhan impor yang 60%,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang.

Ahmad juga menjelaskan soal Pertalite. Bahan baku Pertalite terdiri dari produk kilang domestik yakni nafta yang memiliki kadar RON 70, kemudian dicampur High Octane Mogas Component (HOMC) RON 92.

Berdasarkan informasi yang digali *Aktual*, BBM jenis Pertalite akan dibuat atau *di-blending* pada fasilitas tangki PT TPPI di Tuban, Jawa Timur. PT TPPI ini akan dijalankan dengan memproduksi nafta dan sedikit HOMC. Namun bahan baku terbesar HOMC merupakan bahan impor. Belum lagi Pertalite ini merupakan jenis BBM yang belum pernah ada di dunia. Lebih parah dari Premium, Pertalite tidak ada *benchmark* harganya. Sedangkan HOMC (high octane mogas component)

memiliki oktan tinggi yang bila



dicampur nafta yang oktan rendah jadi Pertalite dengan komposisi tertentu.

Premium yang disuplai ke indonesia, kadar oktannya banyak yang sudah 90, harganya sama dengan premium. Jika Pertamina memakai skema Pertalite ini, untungnya bisa mencapai USD22 per barrel. Siapakah di belakang semua ini?

Dwi Soetjipto disarankan mundur sebagai Dirut Pertamina

Kerugian dua bulan pertama tahun 2015 membuat Komisi VII DPR RI mempertanyakan kepemimpinan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan menyarankannya mundur. Sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia, Pertamina seharusnya dipimpin oleh orang yang mengerti migas, dan seluk beluk permasalahan di Pertamina.

“Secara pribadi, Dwi memang tidak cocok karena tidak memiliki latar belakang migas. Mengurus Pertamina berbeda dengan mengurus semen. Kalau biasanya ngurus yang kering-kering, tiba-tiba harus ngurus yang licin, khawatir bisa kebleset,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad Fahrial di Jakarta.

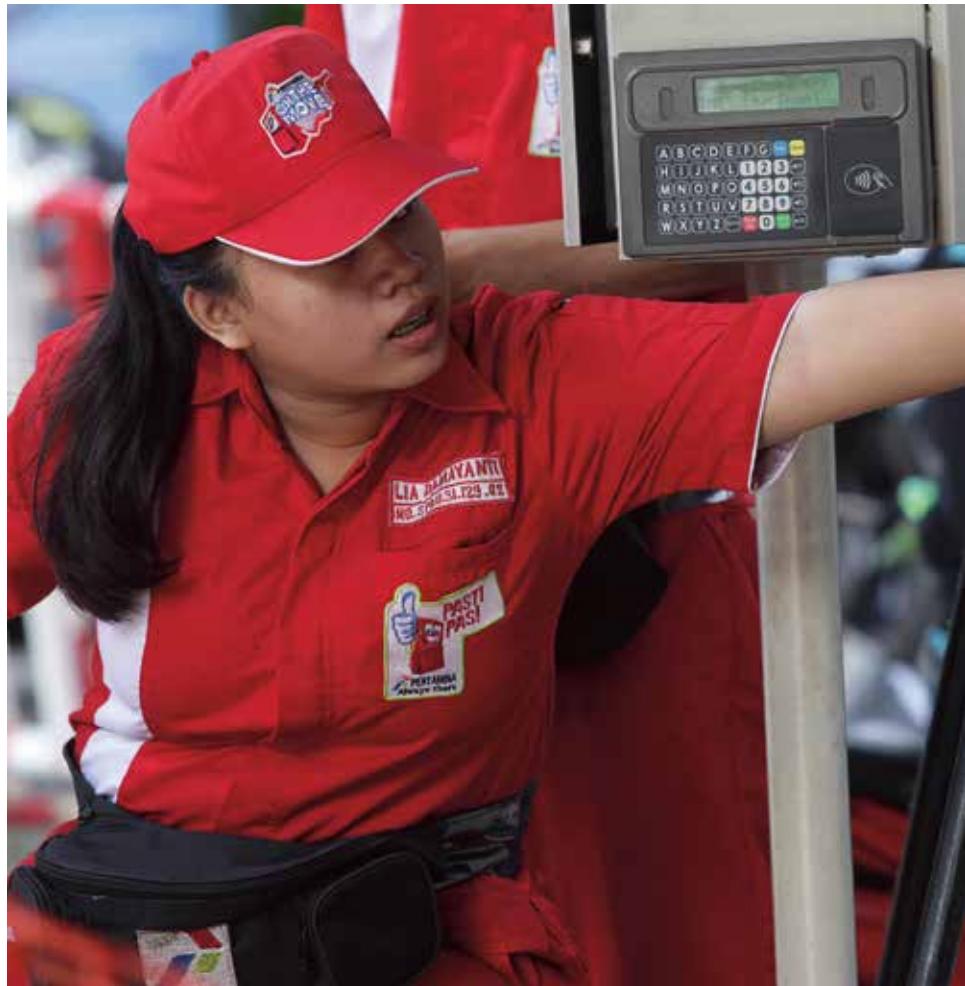
Dia prihatin dengan kerugian triliunan di Pertamina. Dia mempertanyakan sebab kerugian akibat stok minyak 2014. Atau ada motif lain?

“Sangat sulit jika orang tak paham migas memimpin Pertamina. Dikhawatirkan malah akan terus merugikan perseroan. Kalau memang merasa tidak sanggup silahkan mengundurkan diri,” tutupnya.

DPR-pun akan menggulirkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah kerugian Pertamina sebesar Rp2,75 triliun selama Januari-Februari 2015.

Jajaran Direksi Pertamina Terancam Dipidakan

Kerugian Pertamina Rp2,7 triliun yang mencuat ke permukaan membuat gaduh jajaran Direksi Pertamina, bahkan DPR menuntut mundur



Dirut Pertamina Dwi Soetjipto serta memancung jajaran direksi lainnya. Komisi VI DPR RI menilai setiap kebijakan terkait penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) telah merugikan masyarakat.

“Nenek-nenek juga tahu yang menentukan BBM itu Pertamina, Pemerintah. Anda (Direksi Pertamina) telah mendzolimi masyarakat. Hukumannya pancung,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Primus Yustisio kepada direksi Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Jakarta.

Menurutnya, dengan menentukan harga mahal, tindakan Pertamina tersebut telah mendzolimi masyarakat. Padahal seharusnya sebagai bagian dari pemerintah, Pertamina tidak

sepatautnya menyusahkan rakyat. Selain itu, seharusnya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut UU Perseroan harus bisa meraup keuntungan dan memberikan sumbangan besar kepada APBN seperti halnya Petronas milik Malaysia. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia, perusahaan negara justru mengeruk kekayaan rakyatnya sendiri agar bisa dikatakan ‘untung’.

“Konteks UU Perseroan dan BUMN mestinya mengikat pada BUMN yang berbentuk persero. Harus ada audit BPK untuk menelisik lebih jauh apakah dalam kerugian Pertamina ada tindakan memperkaya diri sendiri dan orang lain,” ujar Analis Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia), Kusfiardi.

Jika ditemukan unsur tindakan



Foto atas: Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani pembeli di Jakarta, Kamis (16/4).

Foto kanan: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Victor Simanjuntak (kanan) didampingi Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol. Rikwanto (kiri) di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/4).

memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka sudah seharusnya diproses melalui hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan investigasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjeratnya dengan dasar memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian perusahaan negara. Jika kerugian perseroan timbul karena tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) maka bisa dikenai



delik tipikor. Namun jika kerugian korporasi dikarenakan situasi yang dianggap lazim akibat kondisi pasar, maka bisa saja dari hasil audit BPK jajaran manajemen dicopot akibat buruknya kinerja.

“Yang lebih pas untuk Pertamina ya buruknya kinerja direksi dan manajemen. Paling dekat harus ada tindakan terhadap direksi dan manajemen Pertamina tersebut. Bisa dengan copot direksi bahkan sampai level manajer,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait kerugian pertamina yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, Mabes Polri menyatakan akan melakukan penyelidikan apabila sudah ada laporan yang diterima Bareskrim. Jika laporan kerugian yang dibebankan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu timbul karena tindakan yang memenuhi unsur pidana, pihaknya akan bertindak cepat untuk mendalami penyebab kerugian perusahaan pelat merah tersebut.

“Kalau ada laporan kenapa tidak. Pokoknya kalau ada laporan,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak.

Apabila ada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka itu akan menjadi pintu masuk pihanya menelusuri kerugian

pertamina. Apakah sambung dia, dalam audit nanti terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang atau memperkaya diri sendiri dan orang lain.

“Nanti kalau mencari (kerugian negara) itu dari analisa. Harus ada laporan dari BPK baru iya (penyelidikan). Harus ada laporan lho,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara soal kerugian yang didera Pertamina. Pihaknya tengah melakukan kajian mengenai aspek pencegahan korupsi di sektor pertambangan, dan Pertamina menjadi salah satu badan usaha yang dikaji.

“Kalau (kajian pertambangan) berhubungan pasti dengan Pertamina dan SKK Migas. Dan kebijakan masuk kajian, karena Pertamina termasuk operator,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Namun KPK belum akan masuk terlalu jauh menelusuri kerugian Pertamina yang begitu besar. Kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Sedangkan di tahun ini, KPK merambah kajian tersebut ke beberapa sektor lagi. Kajian tersebut, tentunya juga dengan mengandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait. Dalam waktu dekat ini, KPK akan mengembangkan kajian tersebut di Jakarta. ■ Dhanu Akbar, Ismed Eka



PLTN Terganjal Masalah Politis

Indonesia sudah lama merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), namun semua berhenti di tataran wacana.

Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Arnold Soetrisnanto, menyebut banyak pihak yang kepentingannya terganggu jika pembangkit berdaya tinggi ini direalisasikan.

“Pembangunan PLTN di negara kita masih terganjal masalah politis terkait popularitas. Presiden Jokowi bersama kabinetnya butuh penguatan, bahwa pembangunan PLTN itu penting,” kata Arnold di temu dalam sebuah acara di kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Selasa (28/4).

Rencana pembangunan PLTN di Indonesia sudah ada sejak 1957. Bahkan pada 2006-2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad untuk membangun PLTN, Namun rencana itu menguap begitu saja.

Soal sumber daya manusia (SDM), Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto menyebut Indonesia tidak perlu khawatir, karena banyak lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) yang siap bekerja untuk mengembangkan pembangkit PLTN.

“Sejarah persiapan PLTN sudah cukup panjang. Tentu kemampuan SDM kita pun siap dalam menguasai teknologi nuklir,” ucap Djarot. /Moh Sahlan



DOK AKTUAL

Pertalite Munculkan Mafia Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menilai pengadaan BBM jenis pertalite menciptakan rente baru yang otomatis memunculkan mafia baru. Ari Soemarno dan kroni diduga sebagai dalang Pertalite.

“Kalau premium itu diganti pertalite yang bikin siapa, apakah memunculkan mafia baru, bagaimana cara bikinnya, itu menciptakan rente baru. Jangan tergesah-gesahlah. Kita juga masih curiga. Terus pengusaha SPBU siap enggak,” ujar Bambang di DPR, Jakarta, Senin (27/4).

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa munculnya Pertalite akan berakibat pada kenaikan BBM. Padahal belum ada pembicaraan dengan Komisi VII DPR belum mendapat laporan tentang siapa yang memproduksi Pertalite, berapa ongkosnya, dan sebagainya.

“Makanya kami (Komisi VII) mengimbau pemerintah, hati-hati karena secara ekonomi sulit dilaksanakan, secara bisnis akan muncul rente baru,” tutur Bambang, seraya menambahkan banyak pemain lama yang bermain dalam tender pertalite.

“Minyak keahlian khusus, orangnya punya knowledge yang bagus. Pemainnya terbatas ya itu-itu aja, itu pemain lama, ya kita tahu luh.”

Sumber terpercaya Aktual mengatakan bahwa BBM jenis Pertalite akan dibuat atau diblending pada fasilitas tangki PT TPPI di Tuban, Jawa Timur. PT TPPI ini akan dijalankan dengan memproduksi nafta dan sedikit HOMC. Namun bahan baku terbesar HOMC merupakan bahan impor.

Belum lagi Pertalite merupakan jenis BBM yang belum pernah ada di dunia, lebih parah dari premium, pertalite tidak ada benchmark harganya. Sedangkan HOMC (high octane mogas component) memiliki oktan tinggi yang bila dicampur nafta yang oktan rendah jadi Pertalite dengan komposisi tertentu. Premium yang disuplai ke Indonesia, kadar octane-nya banyak yang sudah 90, harganya sama dengan premium.

“Jika Pertamina memakai skema Pertalite ini, untungnya bisa mencapai USD22 per barrel. Yang mampu melakukan ini hanya Ari Soemarno dan kroninya,” ujar sumber Aktual. /Ismed Eka Kusuma

Petrogres-Husky Teken MoU Jual Beli Gas

PT Petrokimia Gresik (Petrogres) dan Husky-CNOOC Madura Limited menandatangani perjanjian jual-beli gas untuk pabrik amoniak-urea kedua yang akan segera dibangun di Gresik, Jawa Timur.

"Pabrik amoniak-urea II ini sangat penting bagi kami guna memenuhi kekurangan amoniak yang selama ini dipenuhi dari impor," kata Dirut Petrogres Hidayat Nyakman pada penandatanganan perjanjian jual beli gas antara Petrogres dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) di Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan saat ini kapasitas produksi amoniak yang ada hanya 445.000 ton/tahun, padahal Petrogres membutuhkan 850.000 ton amoniak/tahun untuk bahan baku pupuk urea dan NPK Phonska.

"Untuk menutupi kekurangan amoniak tersebut, kami impor dari PT Pupuk Kalimantan Timur dan Iran," kata Hidayat.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli dan pasokan gas dari HCML tersebut sangat penting untuk menjamin bahan baku untuk pabrik amoniak-urea II yang diperkirakan membutuhkan investasi 661 juta dolar AS.

"Dengan adanya pabrik kedua, kami bisa menghemat 16 juta dolar AS/tahun untuk transportasi (shipment) saja," kata Hidayat.

Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan biaya pengapalan amoniak yang mencapai 40 dolar AS/ton dan volume impor sebesar 400.000 ton/tahun.

Rencananya pabrik amoniak-urea II mulai beroperasi sekitar Agustus - Oktober 2017 dengan kapasitas produksi amoniak mencapai 200 ton/hari atau 669.000 ton/tahun dan pupuk urea sebesar 1.725 ton/hari atau setara dengan 570.000 ton/tahun.

"Kami mengharapkan HCML

bisa memenuhi target, agar bisa memasok gas bersamaan dengan rampungnya pembangunan pabrik amoniak-urea II," ujar Hidayat.

General Manager HCML Huang Chunlin mengatakan pihaknya akan berupaya memenuhi target tersebut. Saat ini tender pengiriman gas telah dilakukan, termasuk proses izin dari SKK Migas.

"Memang hal-hal itu butuh waktu, tapi kami berusaha memenuhi jadwal (pasokan gas) tersebut," katanya.

Berdasarkan kontrak perjanjian jual beli yang ditandatangani tersebut, HCML akan memasok gas ke pabrik amoniak-urea II milik Petrogres sebesar 85 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan harga kontrak sebesar 6,5 dolar AS/ MMBTU dan ada eskalasi kenaikan harga dengan sekitar 2,5 - tiga persen per tahun.

Untuk membangun pabrik kedua, Petrogres mendapat kredit antara lain dari BNI 46 sebesar Rp1 triliun dan CIMB Niaga sebesar Rp1,5 triliun. Hidayat berharap akan mendapat tambahan kredit dari bank nasional lainnya sebesar Rp1-1,5 triliun lagi.

"Pembiayaan sebagian besar 70 persen dari sejumlah bank, dan sisanya 30 persen dari internal," ujarnya.

Ia mengatakan dengan pembangunan pabrik kedua, maka total kapasitas produksi urea Petrogres mencapai sekitar satu juta ton per tahun, sehingga akan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pupuk urea di Jawa Timur yang mencapai 1,2 juta ton/tahun, di samping pupuk majemuk dan pupuk lainnya seperti SP-36, ZA, dan KCL.

Petrogres merupakan salah satu anak perusahaan induk BUMN pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Selain Petrogres,



ada empat BUMN pupuk lainnya dibawah PIHC yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda. /Ant-Ismed Eka Kusuma

Distribusi LPG 3 Kg Melalui 'Kartu Sakti' Bakal Bemasalah

Pemerintah berencana membatasi pembelian gas elpiji kemasan 3 Kilogram (Kg) dengan menggunakan Kartu Indonesia Sejahtera atau Kartu Sakti Jokowi. Terkait hal ini, pengamat Kebijakan Energi, Sofyan Zakaria menilai rencana itu berpotensi memunculkan masalah baru.

Menurut Zakaria, jangankan distribusi LPG 3kg, proses pemberian bantuan langsung pemerintah melalui Kartu Sakti saja masih bemasalah dan sering tidak tepat sasaran. "Pengguna elpiji 3 kg itu mencapai angka 57 juta kepala keluarga. Kalau Pemerintah tidak mampu, ini akan timbul masalah," kata Sofyan di Jakarta, Jumat (27/3).

Dari pada sibuk dengan masalah distribusi elpiji, akan lebih aman jika pemerintah menentukan besaran subsidi tetap bagi elpiji kemasan 3 kg. Pemerintah harus punya keberanian mengoreksi harga saja.

"Koreksi harga, kasih batasan misalnya pemerintah hanya akan mensubsidi Rp2000/kg. Harganya disesuaikan dengan harga pasar. Tapi tetap ada subsidi," jelas Zakaria. /Moh Sahlan



Asian African Conference
Commemoration
Indonesia 2015

Asian African S

Strengthening So to Promote World

Jakarta, Indonesia, 22-



Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan saat membuka Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4).

Summit

Youth-South Cooperation and Peace and Prosperity

23 April 2015



Jokowi Memukau Dunia Tanpa Data

Manuk dadali... manuk panggagahna
Perlambang sakti... Indonesia Jaya
Manuk dadali... pangkakoncarana
Resep ngahiji... rukun sakabehna

Lantunan lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta ini berdengung nyaring menggelegar. Lagu berjudul Manuk Dadali yang berarti burung Garuda itu mengiringi langkah kaki 21 kepala Negara dan utusan terhormat Negara lain saat menghadiri Puncak Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 24 April 2015. Meski tak paham artinya, para peserta KAA cukup terhibur menyimak lantunan Manuk Dadali. Lagu ini oleh penciptanya ditujukan untuk melukiskan keperkasaan burung Garuda sebagai lambang kejayaan Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut peserta KAA dengan senyum mereka. Dalam acara pembukaan Asian-African Summit yang merupakan puncak rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4) seluruh kepala negara peserta konferensi hadir. Jokowi ada barisan kursi terdepan dalam acara tersebut. Di sebelah Kanan Jokowi duduk Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping. Sementara di sebelah kiri duduk Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Posisi duduk Jokowi yang diapit oleh dua kekuatan besar ekonomi di kawasan Asia hari itu cukup menyita perhatian media massa. Terlebih kedua negara kerap bersitegang dalam sejumlah permasalahan.

Salah satunya terkait dengan konflik tapal batas di Laut China Selatan. Usai bersalaman dengan keduanya Jokowi terlihat sangat akrab dengan Jinping. Bahkan tampak keduanya tertawa bersama. Hanya sekali Abe berbincang dengan Jokowi selebihnya Jinping mendominasi pembicaraan tersebut.

Presiden lantas membuka acara dengan membacakan pidato kenegaraannya dengan mengingatkan latar belakang digagasnya KAA oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno 60 tahun silam. Ketidakadilan yang ditimbulkan dari dominasi negara kaya menjadi titik tekan dalam pidato Jokowi. Ia lantas mengkritik Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang dinilainya tidak mampu mengurai ketidakadilan dunia. “Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin ketara ketika PBB tidak berdaya,” ujarnya.

Ketidakadilan tersebut terjadi selama 60 tahun sejak KAA pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Salah satu yang dicontohkan Jokowi adalah ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan oleh masyarakat dunia. “Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina, kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka,” tegasnya.

Heroisme pidato Jokowi menyampai puncaknya saat ia menyerang tiga lembaga keuangan dunia. Yakni International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). “Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang,” kata Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta konferensi.

Jokowi menginginkan terbentuknya kekuatan ekonomi baru untuk mematahkan dominasi tiga



lembaga yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu. “Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk hilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain,” ujarnya.

Kritik Jokowi terhadap lembaga keuangan dunia ini menjadi perhatian utama KAA. Pujian pun dituai Presiden usai pidato. Wakil Ketua DPR Fadli Zon memuji keberanian mantan Walikota Solo ini atas keberaniannya menyerang IMF dalam forum internasional. “Pidato Pak Jokowi soal IMF, ADB itu adalah suatu pidato yang saya harus akui cukup keras dan tegas. Hampir tidak pernah diucapkan presiden-presiden sebelumnya,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Bahkan banyak kalangan yang menyebut penampilan Jokowi seperti Soekarno saat mengkritik Amerika dan koloninya. Ungkapan “Inggris kita linggis Amerika kita setrika” sebanding dengan kritik Jokowi terhadap PBB dan lembaga keuangan global tersebut. “Saya menilai Jokowi adalah Soekarno kecil. Kalau kita lihat dari pidatonya, mengingatkan kita sosok Soekarno meski dengan gaya dan konteks yang berbeda di zamannya,” kata Peneliti senior dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi di

S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 1h
Jika pernyataan Presiden Jokowi tsb tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yg berbohong. Kehormatan bagi saya mutlak. *SBY*

S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 1h
Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*

S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 1h
Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*

kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2015).

Mendapatkan puji, Jokowi malah “mengoreksi” pidatonya sendiri. “Siapa yang bilang anti (red-IMF), kita masih pinjam ke sana kok. Siapa yang kritik, itu sebuah pandangan,” ujar Jokowi di Jakarta sebelum bertolak ke Malaysia, Minggu (26/4/2015).

Menyebut Indonesia masih utang kepada IMF membuat Presiden Indonesia ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara. SBY mengoreksi pernyataan Jokowi tersebut. “Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tersebut salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada 2006 lalu. Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka dan berdaulat untuk merancang pembangunan ekonomi kita,” kata SBY melalui akun Twitternya @ SBYudhoyono, Selasa (28/4).

Bahkan SBY menyebutkan pada tahun 2012 lalu saat pejabat IMF berkunjung ke Indonesia, pemerintah sudah dapat menegakkan kepala karena tidak dibebani utang. “Sejak tahun 2007, saya (dulu sebagai presiden) menerima kunjungan tiga pemimpin IMF dengan kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih,” ujarnya.

Pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, SBY bahkan diminta untuk menaruh dana di IMF untuk membantu negara yang mengalami krisis sehingga tangan Indonesia

Foto kiri: Susilo Bambang Yudhoyono

Foto kanan: Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/4).

berada di atas. Dia yakin Jokowi yang waktu itu sudah menjabat di pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta paham tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. "Jika pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yang berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak," pungkas SBY.

Kicauan SBY ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto. Mantan pengamat militer ini menyebut hingga saat ini masih memiliki utang kepada lembaga keuangan dunia IMF. "Pak SBY benar, tahun 2006 memang kita tak memiliki utang dengan IMF tapi muncul lagi tahun 2009," kata Andi di Istana Negara, Selasa, 28 April 2015.

Menurut Andi, negara melalui Bank Indonesia berutang pada tahun 2009 pada IMF sebesar USD 3,093 miliar. Kini, utang tersebut telah berkurang, per Februari 2015 tinggal USD 2,79 miliar. Adapun, utang BI tersebut dalam bentuk mata uang *Special Drawing Right* (SDR).

SDR adalah instrumen yang dikembangkan oleh IMF sejak 1969. SDR merupakan aset cadangan devisa yang dapat digunakan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara. "Utang IMF itu utang moneter untuk jaga cadangan devisa kita, bukan utang fiskal untuk membangun," kata dia.

Koordinasi Kabinet Kerja terbukti lemah dalam polemik utang ini. Tidak menunggu lama Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro langsung mengoreksi pernyataan Andi. Menurut Bambang data yang disampaikan Andi bukan merupakan utang negara. "Pemerintah Indonesia tidak utang ke IMF. Itu dari Bank Indonesia sebesar USD 2,79 miliar dalam rangka pengelolaan devisa,



jadi bukan utang yang harus dibayar," ujar Menkeu Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/4).

Menko Bambang menjelaskan bahwa dana siaga sebesar USD 2,79 miliar sebagai imbalan karena menjadi keanggotaan IMF dan bisa ditarik sewaktu-waktu jika membutuhkan. Hingga saat ini, lanjut Menteri Bambang, bank sentral tidak pernah menarik dana siaga tersebut sehingga tidak menjadi utang untuk Indonesia. "Jadi kuota alokasi *special drawing rights* (SDR) dari IMF untuk semua negara anggota IMF, jadi *standby loan* (bisa dipakai bisa tidak). Jadi Indonesia masih baik dan tidak usah dipakai. Ini fasilitas ke semua anggota," tuturnya.

Kembali munculnya utang IMF dalam catatan bank sentral karena Indonesia sebagai negara anggota mendapat kuota pinjaman siaga sebesar SDR 1,98 miliar atau setara USD 3,1 miliar. Pada Buku Statistik Utang Luar Negeri April 2015 dari BI, posisi kuota pinjaman IMF yang belum ditarik Indonesia per Februari 2015 sebesar USD 2,8 miliar. "Secara kaidah akuntansi bukan dicatat di titipan tapi kewajiban. Ini bukan utang karena tidak memiliki jangka waktu kapan harus dikembalikan," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun akhirnya buka suara. Ia menegaskan saat ini Indonesia memang tidak memiliki utang kepada IMF. "Ya memang kalau bank, pemerintah itu enggak ada lagi utang pemerintah. Saya baca memang ada catatan di BI sebagai kewajiban BI sebagai anggota IMF," ujar Wapres JK sesaat sebelum kembali ke tanah air dari Bandara International Langkawi, Malaysia, Selasa (28/4/2015) malam.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut lantas menengahi polemik penting tidaknya IMF, ADB dan Word Bank di Indonesia. Menurutnya pernyataan Presiden hanya merupakan usulan agar negara di Asia dan Afrika tidak tergantung terhadap lembaga keuangan tersebut. "Presiden hanya mengatakan jangan bergantung pada tiga bank itu," katanya.

Solusi untuk mengurangi ketergantungan itu tampak dari wajah Jokowi yang terus menebar senyum kepada Xi Jinping. Sebuah solusi yang disebut oleh sejumlah pihak akan menjadi IMF nya Asia. Dimana menjadi awal dari arah pandang Indonesia yang selama ini ke Amerika berpaling untuk menghadap Tiongkok melalui Asian Infrastructure Asia Investment Bank (AIIB). ■ Wahyu Romadhoni, Moh Sahlain

Presiden Joko Widodo tengah berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) dan Perdana menteri Jepang, Shinzo Abe (kanan) sebelum pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4).



Komitmen Tiongkok

AACC2015



AIIB adalah lembaga keuangan global yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden RRT, Xi Jinping saat pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Oktober 2013 di Bali. Namun saat itu Indonesia

yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum tergabung sebagai anggota. Tiongkok menjadi pemilik modal terbesar dalam AIIB dengan nilai USD50 miliar.

Pada tanggal 24 Oktober 2014 Tiongkok mengundang 21 negara yang

akan menjadi anggota AIIB untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Beijing. Hadir dalam kesepakatan tersebut 9 negara dari ASEAN dan Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Baru pada tanggal 24 November 2014 Indonesia melalui Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menandatangani kesepakatan dengan AIIB di Kantor Kementerian Keuangan. Duta Besar China untuk Indonesia XieFeng ikut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut. Salah satu sasaran AIIB adalah memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan.

AIIB mencuri mata dunia. Setelah Indonesia menjadi anggota ke 22 hingga Senin (6/4/2015) sudah 47 negara telah ditetapkan untuk bergabung AIIB termasuk China, India, Indonesia, Israel, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru.

Selanjutnya, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Thailand, Vietnam, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Luksemburg, Swiss, Austria, Turki, Korea Selatan, Brasil, Rusia, Georgia, Belanda, Denmark, Australia, Mesir, Finlandia, Kyrgyzstan dan Swedia.

Amerika Serikat dan Jepang memilih untuk tidak bergabung dalam lembaga ini. Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengaku negaranya masih mengambil pertimbangan untuk bergabung. Jepang, kata Aso, masih meragukan kredibilitas AIIB dalam memberikan sumber pendanaan pinjaman. Bahkan, Aso mendesak negara-negara lain untuk berpikir dua kali sebelum bergabung di AIIB. "Kami telah meminta untuk menjamin keberlanjutan utang, dengan mempertimbangkan dampaknya

Sejumlah alat berat digunakan untuk meratakan batu kali pada persiapan peletakan batu pertama lokasi awal pembangunan jalan tol Sumatera di Bakauheni, Lampung, Minggu (26/4).

terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami bisa (mempertimbangkan untuk bergabung) jika ada jaminan soal itu," kata Aso kepada wartawan setelah pertemuan kabinet, dikutip Reuters, Kamis 20 Maret 2015.

Banyak analis keuangan global menilai keputusan Amerika Serikat dan Jepang lebih dikarenakan pandangan yang menilai AIIB sebagai pesaing dominasi Asian Development Bank (ADB) dimana Jepang dan Amerika merupakan pemilik modal terbesar dalam lembaga tersebut. Bahkan pejabat Tiongkok menyebutkan AIIB bukan hanya akan menggusur dominasi ADB namun juga IMF di Asia.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan komitmennya terhadap AIIB saat KTT APEC di Beijing Maret lalu. Usai menggelar pertemuan tertutup di sela-sela acara dengan Jinping, Jokowi mempertegas komitmennya. "Indonesia menyokong AIIB dan berharap lembaga itu menjadi alat untuk stabilitas ekonomi," kata Presiden Joko Widodo seusai bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, sebagaimana dikutip AFP.

Komitmen Indonesia langsung dibalas oleh Pemerintah Tiongkok dengan penandatangan pinjaman senilai USD 50 miliar atau setara dengan Rp 646,9 triliun. Penandatangan dilakukan disela-sela KAA ke 60 di Jakarta. Pendanaan tersebut berasal dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sebagai fasilitator kredit AIIB. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan, pinjaman tersebut bersifat jamak atau *multiyears* dan akan diberikan kepada BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.

Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang mengandeng Tiongkok antara



lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Dana sebesar USD 10 miliar akan disalurkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Pinjaman USD 10 miliar ke PLN akan digunakan untuk bangun transmisi dan beberapa pembangkit listrik," kata Rini di Gedung DPR, Kamis (23/4) malam.

Sebesar USD 3,5 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera. Dana tersebut akan dicairkan dalam bentuk obligasi. Rini mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan dilibatkan. BUMN Aneka Tambang juga akan

mendapatkan dana dari pinjaman tersebut untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter).

Sementara itu untuk pembangunan pelabuhan di Sorong akan dilakukan oleh PT Pelindo II yang modalnya juga berasal dari pinjaman tersebut. PT Wijaya Karya (Persero) juga dipastikan akan menangani pembangunan kereta cepat atau yang disebut Light Rail Transit. Penandatanganan kerjasama pembangunan kereta cepat tersebut dilakukan saat KAA. Pemerintah Tiongkok menunjuk konsorsium China Railway untuk menuntaskan proyek ini.

Dalam proyek ini Kementerian BUMN menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN bersama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT



dibutuhkan dalam proyek tersebut mencapai Rp 60 triliun. Dengan skema pendanaan sebesar 74 persen oleh BUMN, sisanya pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.

Informasi yang dihimpun *Aktual* menyebutkan pemerintah menolak hasil studi JICA setelah salah satu butir rekomendasinya meminta pemerintah membentuk BUMN khusus untuk proyek tersebut. Namun Rini membantah, ia menyebut Jepang masih memiliki peluang investasi kereta cepat. "Masih ada peluang 50:50," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago juga menegaskan pemerintah memberikan peluang yang sama pada dua negara. Ia menampik Indonesia lebih condong ke Tiongkok dibanding ke Jepang. "Kami tidak punya hak melarang melakukan studi kelayakan. Silakan lakukan studi asal tidak meminta ganti rugi," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).

Pilihan pemerintah menggandeng Tiongkok untuk proyek infrastruktur mendapat komentar kritis dari sejumlah kalangan. Maklum, reputasi Tiongkok dalam menggarap proyek infrastruktur tergolong buruk dan amburadul dibanding negara seperti Jepang, Jerman, maupun negara barat lainnya.

Contohnya proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau *fast track programme* tahap I. Kabarnya, kapasitas produksi listrik itu hanya 30-50 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Perancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75 persen-80 persen.

Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek *fast track programme* tahap I tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang yang dipakai. Contoh lain adalah proyek pengadaan TransJakarta yang ternyata ditemukan banyak unit dan komponen yang rusak dan berkarat.

LEN (Persero), PT Industri Kereta Api (INKA), dan juga PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Sementara itu konsorsium Tiongkok dipimpin oleh China Railway International Co. Ltd., China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation Ltd., dan China Railway Signal and Communication Corp.

Kesepakatan kerjasama ini kemungkinan akan menyingkirkan investasi Jepang pada bidang yang sama. Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi kelayakan tahap I, dari tiga tahap yang direncanakan. Hasil studi JICA menyebutkan total investasi yang

"Kita bertanya-tanya, apa iya Tiongkok ini unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara. Sebab selama ini kan ada beberapa proyek pengadaan dari sana (Cina) yang bermasalah," kata pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo.

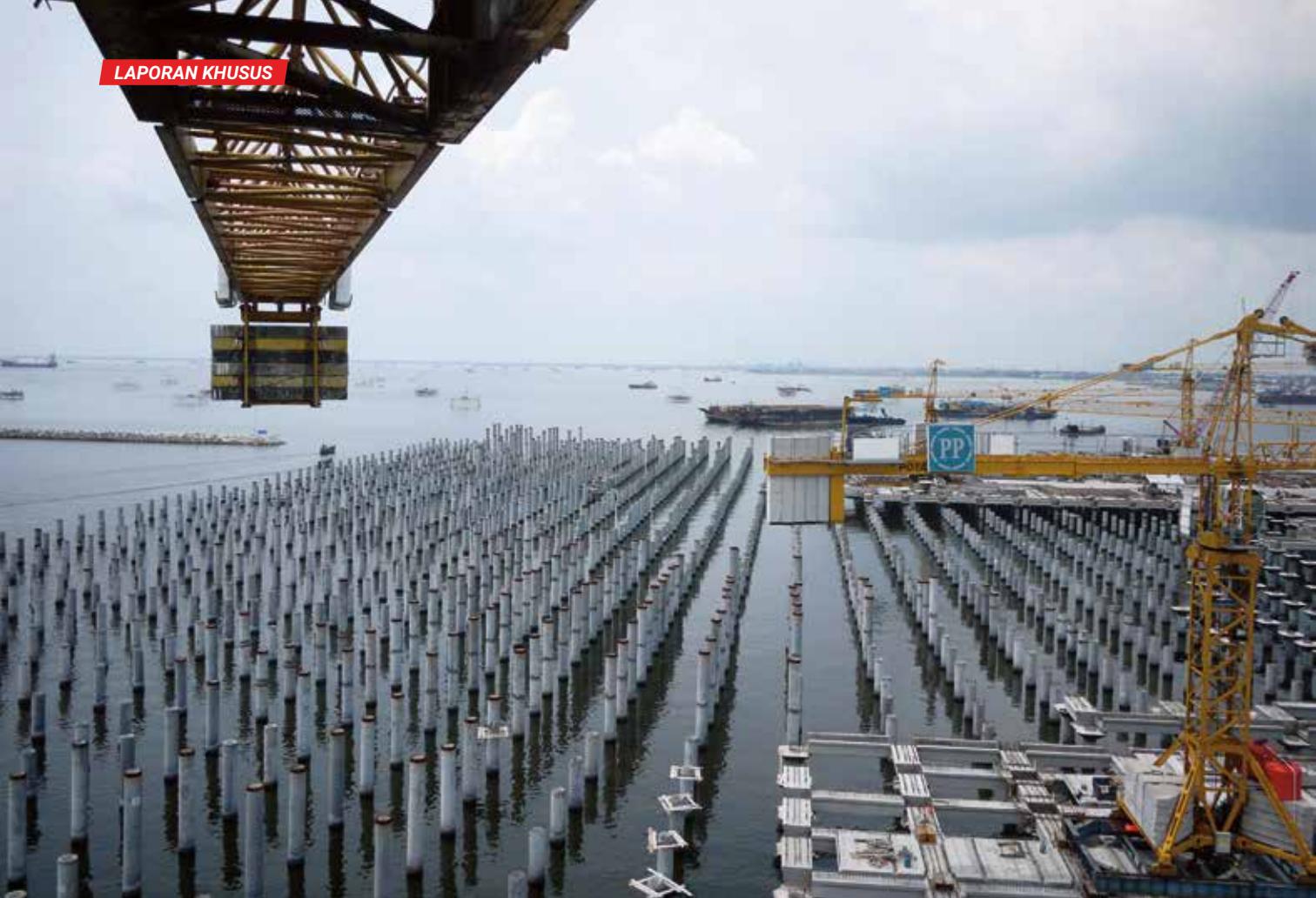
Ekonom dari Universitas Airlangga, Tjuk Kasturi Sukiadi mengingatkan, pemerintah jangan senang dulu atas rencana pinjaman sebesar USD50 miliar atau sekitar Rp650 triliun dari Cina. Harus diselidiki dan didalami dulu, apa maksud dan tujuan Cina menggelontorkan dana besar itu untuk Indonesia.

"Ini soal bisnis, (Tiongkok) pasti ada maunya dari setiap kegiatan yang dilakukan," ujar Tjuk Kasturi.

Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan, teknologi pembangkit listrik dari Tiongkok memang kerap memiliki kapasitasnya tak sesuai harapan dibanding teknologi dari Jepang, Jerman, maupun Korsel. Namun harga teknologi pembangkit Cina lebih murah dibanding teknologi pembangkit listrik Jerman, Jepang.

Namun entah mengapa usai penandatangan MoU dengan China, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe memilih tidak ikut Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung yang digelar 23 April lalu. Menurut Juru Bicara Acara Konferensi Asia-Afrika, Yuri Octavian Thamrin, Abe memilih pulang ke negaranya karena akan menggelar rapat parlemen yang harus ia pimpin.

Saat Abe pulang itulah, Jokowi dan Jinping berjalan bersama dari Hotel Savoy Homann menuju Gedung Merdeka dalam perayaan Peringatan 60 Tahun KAA. Didampingi Ibu negara keduanya tampak akrab berbincang sambil mengenang penyelenggaraan KAA tahun 1955. Konferensi yang sejatinya digagas Soekarno mempertegas sikap non blok. Gerakan yang disebut Mohammad Hatta sebagai upaya "mendayung diantara dua karang". ■ Wahyu Romadhoni, Moh Sahlain



Awas, Siasat Tiongkok

Kalau tidak mewaspadai dari segi tujuan strategis Tiongkok menguasai geopolitik Jalur Sutra termasuk di Indonesia, melalui kedudukannya sebagai investor dalam pembangunan pelabuhan dan bandara, Tiongkok akan menguasai sistem pengamanan maritim Indonesia, melalui penguasaan akses pelabuhan dan bandara.

Hasil akhir Konferensi Asia-Afrika sebagai produk konsensus berupa tiga dokumen: *Bandung Message*, Kemitraan baru Asia-Afrika dan soal Kemerdekaan Palestina, memang membuka berbagai kemungkinan baru ke depan. Apalagi Pidato Presiden pada pembukaan KTT Asia-Afrika Jokowi menggarisbawahi masih berlangsungnya ketidakadilan

internasional khususnya di bidang ekonomi. Serta serangan frontalnya terhadap tiga lembaga ekonomi internasional (World Bank, International Monetary Fund dan Asian Development Bank),

Namun pertemuan antara Jokowi dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRC) Xi Jinping, di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAFA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Rabu (22/4) lalu, sungguh mengundang kekhawatiran. Yang bisa-bisa, mementahkan kembali kerangka pemikiran Pidato Presiden Jokowi yang jika menelisik substansi dan isinya, harus diakui masih dijewi oleh Dasa Sila Bandung 1955.

Betapa tidak. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin memastikan RRC dalam pembangunan infrastruktur

di Indonesia, yang meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35 ribu megawatt.

Memang kesepakatan RI-Tiongkok ini terkait bantuan pembangunan infrastruktur, namun dalam skema Tiongkok dalam penguasaan geopolitik Jalur Sutra, yang mana Indonesia termasuk mata rantai penting yang menjadi sasaran strategis Tiongkok, perlu disadari bahwa kolonialisme model baru sering muncul dalam wujud investasi asing untuk penaklukan suatu negara.

Inilah yang disebut serangan asimetris terhadap suatu bangsa.

Namun sialnya bangsa yang diserang kerap tidak menyadarinya. Investasi dalam bentuk infrastruktur pelabuhan justru sangat berbahaya bagi kondisi geopolitik suatu bangsa, karena akan terkait dengan sistem pengamanan maritim pelabuhan. Begitu investor asing, dalam hal ini Tiongkok berhasil menguasai sistem dan mekanisme untuk mengatur pengamanan maritim Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), maka bencana geopolitik tak terhindarkan lagi.

Ya, bencana geopolitik di Indonesia secara massif dan sistematis. Efek jangka pendeknya, Tiongkok akan mendatangkan ribuan tenaga kerjanya sendiri dan sudah dapat ditebak akan berbondong-bondong migrasi secara massal dari Tiongkok, tetapi atas nama atau dengan *cover* investasi asing. Buktinya mana? Tiongkok telah melakukan hal serupa di Afrika. Ia sangat berpengalaman soal migrasi besar-besaran tersebut.

Sedangkan dampak jangka menengahnya? Apa boleh buat, negeri ini niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenisnya dari Tiongkok dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) para pekerja tersebut. Ya, impor tak terbendung. Impor pun semakin meluas, dan sudah barang tentu impor menggerus devisa negara.

Lantas, dampak jangka panjangnya seperti apa? Di sinilah agenda tersembunyi Tiongkok bisa terbaca. Tiongkok akan memperoleh hak mengelola pelabuhan-pelabuhan yang dibangunnya minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan oleh Tiongkok. Silahkan bayangkan sendiri, apabila simpul-simpul strategis sebuah bangsa terkait transportasi untuk distribusi barang dan jasa dalam kendali asing.

Bisa-bisa bangsa ini kelak bakal menjadi tamu di negeri sendiri, atau lebih tragisnya lagi, juga akan menjadi penonton atas geliat asing mengeksplorasi segala sumberdaya di bumi nusantara ini.

Bicara soal penguasaan pelabuhan, inilah yang dilakukan Belanda (baca: VOC) ketika menanam benih-benih kolonialisme di Indonesia. Penjajahan Belanda di bumi nusantara khususnya di tanah Jawa, bermula ketika kapal-kapal dagang kompeni Belanda VOC yang bersenjatakan meriam, berikut kapal frigat pengawalnya, hilir-mudik dari dan ke berbagai wilayah nusantara, mencari pos-pos persinggahan untuk mengisi logistik dan persediaan air tawar, serta tentu saja kebutuhan akan dok untuk perbaikan kapalnya.

Namun di sinilah benih-benih kolonialisme ditanam oleh Belanda. Meski lambat namun pasti, pos persinggahan tersebut berkembang jadi benteng dan bandar kota, yang pada perkembangannya dimulailah sistem sewa pinjam, kemudian berlanjut menjadi penguasa koloni.

Strategi Tiongkok dalam menanam dan menebar benih kolonialisme gaya baru terhadap Indonesia, jelas patut diwaspadai mengingat Tiongkok memang jagonya perang asimetris, dengan menggunakan sarana sarana non militer untuk penaklukkan sebuah bangsa. Dan mereka punya ahlinya Perang Asimetris, Sun Tzu.

Ada sebuah panduan dari Sun Tzu yang pastinya dihayati betul oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Berkata Sun Tzu: Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran bukanlah puncak kecakapan. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah sebenarnya puncak kecakapan.

Inilah sisi rawan dari kesepakatan RI-Tiongkok di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta beberapa waktu lalu. Kesadaran geopolitik pemerintahan Jokowi-JK harus mendasari kerjasama strategis dengan negara asing, tak terkecuali dengan Tiongkok. Apalagi, geopolisi

silang Indonesia yang meniscayakan 50 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia, itulah yang sedang diperebutkan oleh para adidaya, khususnya antara Amerika Serikat versus Tiongkok. Dan sepertinya, saat ini pemerintahan Jokowi cenderung berpaling ke Tiongkok. Pertanyaan kunci adalah, apa pertimbangan strategis yang mendasari keputusan untuk bekerjasama dengan Tiongkok?

Maka, melalui kerjasama bilateral RI-Tiongkok inilah, pidato Jokowi di depan peserta KTT Asia-Afrika yang menegaskan perlunya kerjasama antar negara Asia-Afrika atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan akan diuji oleh sejarah.

Jika pada praktiknya keputusan yang mendasari Jokowi untuk berpaling ke Tiongkok semata-mata atas dasar pertimbangan keuntungan ekonomi, maka Indonesia berpotensi untuk tergadai melalui skema investasi asing yang dilancarkan Tiongkok.

Dan Tiongkok, memang sudah menyiapkan anggaran tak terbatas untuk melancarkan skema kolonialisme berkedok investasi asing ke pelbagai negara, termasuk Indonesia. Tiongkok saat ini punya cadangan devisa 3 triliun dolar AS. Dan 1 triliun di antaranya akan diinvestasikan dalam bentuk aset di luar negeri (*Geoff Hiscock, Earth Wars*).

Jika rencana ini benar-benar dilakukan, berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dialokasikan untuk jadi sasaran investasi dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Masalahnya adalah, apakah pemerintahan Jokowi-JK cukup memahami konstelasi global sehingga memahami betul nilai strategis Tiongkok di abad 21 ini, dan bagaimana membangun kerjasama strategis yang setara dan saling menguntungkan?

Bagi Tiongkok, penguasaan pelabuhan agaknya memang amat penting dalam perhitungan geopolitik dan geostrategi mereka. Sedemikian

rupa pentingnya, sehingga negeri tirai bambu itu begitu terobsesi untuk menguasai wilayah-wilayah yang punya akses ke pelabuhan di beberapa negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Rupanya, selain pertimbangan strategis untuk mengimbangi pengaruh militer AS di kawasan Asia Pasifik saat ini, Tiongkok pun punya trauma sejarah dengan Inggris di masa lalu, sehingga menguasai pelabuhan identik dengan penguasaan kedaulatan wilayahnya.

Hal ini bisa ditelusuri kembali melalui cerita seputar meletusnya Perang Candu pertama antara Inggris dan Tiongkok pada 1839-1842. Semua itu bermula ketika komisioner perdagangan luar negeri kekaisaran Tiongkok Lin Zexu memutuskan untuk mengakhiri perdagangan dengan diplomasi dan kemudian secara paksa, menyita dan menghancurkan 20 ribu peti opium yang ditemukan di gudang-gudang pedagang asing di Guangzhou pada Juni 1839.

Tindakan otoritas politik kekaisaran Tiongkok itu mengundang kemarahan Inggris, sehingga meletuslah Perang Candu pertama. Akibatnya, pasukan Inggris kemudian menduduki Shanghai dan mengepung Guangzhou dan pelabuhan Tiongkok lainnya.

Berdasarkan ketentuan penyerahan Tiongkok, lima pelabuhan dibuka untuk perdagangan internasional dan pulau Hongkong diserahkan kepada Inggris. Perang Candu kedua (1856-1860), Tiongkok kembali menderita kekalahan, sehingga Inggris mendapat tanah tambahan di Semenanjung Kowloon ke koloni Inggris di Hongkong.

Sedemikian pentingnya pelabuhan bagi Tiongkok, tergambar melalui fakta bahwa enam dari sepuluh pelabuhan kontainer tersibuk di dunia ada di Tiongkok, yang dipimpin oleh Shanghai dengan 29,1 juta TEU (satuan unit setara 20 kaki) pada 2010; Shenzhen dan Guangzhou bersama-sama menangani 45 juta setahun. Hongkong yang berdekatan

menangani 23 juta TEU. Bahkan Singapore yang pernah memimpin perekonomian dunia (28 juta pada 2010) sekarang berada di peringkat kedua dalam alur distribusi dan keluaran kontainer tetapi tetap merupakan pelabuhan tersibuk di dunia dalam total tonase pengiriman.

Bahkan Jepang pun sudah tergeser oleh Tiongkok. Pada 1989, pelabuhan Kobe Jepang berada di peringkat kelima pelabuhan kontainer top dunia dan Yokohama dan Tokyo berada di top 20. Pada 2010, tidak ada satupun pelabuhan Jepang di antara top 20.

Maka tak heran jika Tiongkok memandang amat penting untuk menjaga jalur laut ke Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, dan pelabuhan Tiongkok lainnya agar tetap terbuka dan bebas dari segi keamanan laut. Hal ini selaras dengan doktrin String of Pearl Tiongkok yang gagasan dasarnya adalah sebagai doktrin penguasaan maritim kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah-wilayah yang melewati Laut Tiongkok Selatan.

Maka, Laut Tiongkok Selatan menjadi penting dan vital bagi Tiongkok, utamanya sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, khususnya untuk tanker minyak dan *bulk carrier* khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Saat ini sebagai salah satu negara pengguna energi/migas terbesar di dunia, Tiongkok amat mencemaskan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 km (500 mil) di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 km (1,5 mil) lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok seperti halnya juga dengan Amerika, Rusia, Jepang dan India, menyadari betul bahwa saat ini sekitar 70 persen dari perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan seperempat

perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka.

Dengan demikian, di tengah perekonomian Tiongkok yang semakin digdaya saat ini, Laut Tiongkok Selatan dipandang Beijing sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, terutama untuk tanker minyak dan *bulk carrier* khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Tiongkok. Apalagi Tiongkok menyadari betul bahwa sepetiga minyak mentah yang diperdagangkan di dunia melewati perairan Laut Tiongkok Selatan.

Maka itu tak heran jika Tiongkok saat ini terlibat sejumlah sengketa perbatasan terutama Spartly (Nansha) dan Paracel (Xisha), dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Adapun di kawasan utara, di Laut Tiongkok Timur, Tiongkok bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku (yang di Tiongkok dikenal sebagai Diaoyutai).

Informasi yang berhasil dihimpun oleh *Aktual*, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sempat menyinggung tentang Silk Road Economic Belt (SERB) in Asia and Maritime Silk Road Point (MSRP).

Bayangkan jika Indonesia begitu saja menerima skema kerjasama pembangunan infrastruktur kemanitiman berdasarkan skema SERB dan MSRP, maka Tiongkok akan membantu pembangunan infrastruktur di pulau-pulau besar di Indonesia. Sehingga sebagai imbalannya, Tiongkok sebagai investor pada perkembangannya ke depan akan menguasai akses pelabuhan-pelabuhan dan galangan kapal di Indonesia.

Berdasarkan pada tawaran kerjasama Tiongkok berdasarkan skema SERB dan MSRP, apakah kerjasama tersebut bersifat saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok?

Ini penting mengingat kenyataan bahwa Tiongkok memang mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah yang



Aktivitas truk mengangkut peti kemas di Pelabuhan Pantoloan Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (9/4). Kemendagri memberikan penguatkan kebijakan kepada daerah-daerah yang telah ditetapkan masuk dalam zona KEK seperti Palu (Sulteng), Bitung (Sulut), Sei Mangkei (Sumut) dan Mandalika (NTB) untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung.

berada di jalur Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk menguasai Jalur Sutra Maritim, Tiongkok punya doktrin kemaritiman yang dikenal dengan String of Pearl.

Jika tawaran Tiongkok berdasarkan skema SERB dan MSRP tersebut disetujui mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim tersebut justru kontra produktif dari tujuan strategis kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

Sengketa perbatasan Tiongkok dengan Vietnam, bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu (*triggering factor*) berkobarnya perang terbuka antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat kenyataan bahwa saat ini Vietnam secara aspiratif berbagi ketakutan yang sama dengan beberapa negara ASEAN yang merupakan sekutu tradisional AS seperti Filipina, Malaysia dan Brunei.

Berkenaan dengan hal tersebut,

maka rencana Tiongkok untuk membangun kerjasama ekonomi dengan Indonesia dengan menanam investasi di Bitung, Sulawesi Utara, kiranya patut diwaspadai. Seusai pertemuan antara Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Duta Besar Tiongkok H.E. Liu Jianchao, Tiongkok akan menetapkan Indonesia sebagai wilayah target investasinya. Bahkan bukan itu saja. Tiongkok ingin masuk dalam satu kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia.

Dan sasaran Tiongkok untuk diintegrasikan melalui skema KEK adalah Bitung, Sulawesi Utara. Di Bitung, salah satu kota di Sulawesi Utara, Tiongkok akan membangun kawasan perindustrian secara menyeluruh, berikut infrastrukturnya seperti pelabuhan dan bandara, dalam satu kompleks. Jika kita tidak berhasil mengetahui agenda-agenda tersembunyi Tiongkok, maka bisa dipastikan akan menjadi bencana geopolitik bagi Indonesia.

Prakiraan akan bercokolnya kepentingan strategis militer Tiongkok dibalik skema KEK, terlihat dari beberapa indikasi. Antara lain adalah:

Pertama, ambisi Tiongkok membangun sendiri infrastrukturnya terutama bandara udara dan pelabuhan laut. Pola ini hampir mirip saat Tiongkok membangun pelabuhan-pelabuhan laut pada

beberapa negara pesisir (tepian) di Kawasan Jalur Sutera (laut) sebagai implementasi String of Pearl, strategi handalnya untuk mengamankan “energy security” (ketahanan energi)-nya;

Kedua, secara kultur, agama dan ras (maaf), langkah Tiongkok membangun KEK di Bitung kemungkinan tidak bakal ada penolakan secara signifikan dari masyarakat sekitarnya, bahkan cenderung diterima dengan tangan terbuka karena dinilai justru bisa meningkatkan perekonomian wilayah timur;

Ketiga, letak Bitung di antara dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III, dimana secara geoposisi cukup strategis, karena selain Sulawesi Utara dianggap pintu gerbang Indonesia (dari Timur) menuju Asia Pasifik, ia juga dapat mengendalikan dua ALKI sekaligus;

Keempat, pembangunan KEK di Bitung, kemungkinan selaras dengan “welcome”-nya Timor Leste terhadap militer Tiongkok, sebagaimana dikatakan oleh Xanana Gusmao. Artinya kelak akan ada interaksi secara masif antara Bitung dan Timor Leste melalui ALKI III-A;

Kelima, inilah kontra-strategi Tiongkok dalam rangka membendung gerak laju Amerika (AS) di Asia Pasifik, kendati “aura” Paman Sam sebenarnya lebih dulu menebar di Indonesia Timur baik via pangkalan militer di Philipina, dan lainnya maupun melalui World Ocean Conference (WOC) 2009 di Menado. Itulah jawaban (sementara), “Kenapa Tiongkok memilih Bitung?”

Dari kajian geopolitik, sepertinya Sulawesi cq Bitung hendak dijadikan semacam proxy war antara Tiongkok versus AS. Keduanya hendak-saling berebut pengaruh sebagaimana terjadi di banyak negara Afrika, Tiongkok via “Pendekatan Panda”, sedang Paman Sam -seperti biasa-melalui penyebaran (pangkalan) militernya.

Pertanyaannya kini, “Bagaimana nasib geopolitik Indonesia nantinya?”



Kemlu Dikebiri, Jokowi Tutup Telinga

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertekad untuk memantapkan perannya sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional.

Satu dari tiga misi demikian tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemlu 2015 - 2019. Renstra diteken Menlu Retno Marsudi, 6 April 2015 lalu, dalam Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/B/RO/IV/2015/01.

Gelaran Peringatan Konferensi

Tingkat Tinggi Asia-Afrika ke-60 di Bandung dan Jakarta, 19 - 24 April 2015 kemarin, menjadi momentum strategis untuk mewujudkan misi tersebut. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Duta Besar, Yuri Thamrin, menyebut Asia dan Afrika sebagai kawasan yang paling dinamis dewasa ini.

Saat membuka pertemuan tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting/SOM) KAA, Minggu, (19/4) pekan lalu, sebagaimana dikutip dari laman kemlu.go.id, Yuri mengungkapkan bagaimana besarnya

penduduk di kawasan ini yang mencapai 75 persen dari total jumlah penduduk dunia.

Sejumlah tantangan pun muncul, dari isu terorisme, perubahan iklim, rasisme, xenophobia, dan intoleransi. Sebab itu negara-negara Asia-Afrika perlu memperkuat solidaritas dan visi mengenai peningkatan kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Momentum strategis KAA di Bandung dan Jakarta tetap dipegang meski Kemlu posisinya dalam kepanitiaan 'hanya' sebagai Ketua Bidang Substansi Panitia KAA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkannya demikian dan memberikan pucuk kepanitiaan kepada Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut yang juga Kepala Staf Kepresidenan ditunjuk Jokowi



Foto kiri: Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi berjalan berjalan bersama staff sebelum mengikuti sesi pembukaan sidang Plenary 1, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015, di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4).

Foto kanan: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan pidato pembuka pada acara Asia Africa Smart City Summit (AASCS) 2015 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4).

melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015. Penunjukan yang kemudian menuai kritik publik.

"Ini semua serba tertutup, seharusnya SC (*Steering Committee*) atau panitia nasional dipegang Menlu Bu Retno Marsudi. Nah Walikota daerah (Ridwan Kamil) sebagai OC," tegas Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit di Jakarta, Senin (13/4).

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 3/2015, dikutip laman *setkab.go.id*, penanggungjawab kepanitiaan nasional KTT Asia-Afrika berada ditangan Luhut Pandjaitan. Sekretaris I dipegang Sekretaris Kemenko Polhukam, Sekretaris II dipegang Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara.

Panitia Bidang Subtansi dipimpin Menteri Luar Negeri dengan wakil-wakilnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menristek dan Pendidikan Tinggi, Menkes, Mensos, Mendag, Menteri ESDM, Mentan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkop dan Usaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Kabinet.

Bidang Pelaksana dipimpin

Mensesneg dengan wakil-wakilnya Menkeu, Menteri PUPR, Menhub, Menteri BUMN, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar dan Wamenlu. Sementara Bidang Pengamanan dibawah kendali Panglima TNI dibantu wakil ketua yakni Kapolri.

Bidang Media dan Hubungan Masyarakat yakni Menteri Komunikasi dan Informatika dengan wakilnya Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun Bidang *Side Events* diserahkan kepada Menteri Pariwisata dan wakil-wakilnya Kepala BKPM, Walikota Bandung dan Ketua KADIN.

Menurut Hendrajit, susunan kepanitiaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik karena tidak umum. Apalagi, hingga kini pemerintah tidak pernah terbuka mengenai anggaran penyelenggaraan KAA.

Padahal, KAA merupakan ajang besar sekaligus pertaruhan kepemimpinan Presiden Jokowi. Bila diawali dengan penunjukan demikian, ia khawatir anggapan publik mendapatkan pemberian dari Istana. Bawa Jokowi disetir oleh pihak-pihak di lingkungan Istana.

KAA juga bisa menjadi ajang

pembuktian pemerintahan Jokowi kepada rakyat Indonesia. Apakah mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan antek atau kepanjangan tangan kepentingan asing di Indonesia. KAA menjadi sarana masuknya kepentingan asing secara lebih masif.

"Kalau Presiden sadari, semestinya kepanitiaan tidak seperti ini. Ingat, Konferensi Asia Afrika juga ajang pembuktian bahwa Jokowi bukan komparador asing," kata Hendrajit.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan peran-peran strategis kementerian dalam KAA seharusnya diberikan secara adil oleh Presiden. Begitu halnya peran kementerian-kementerian lainnya.

Kemlu misalnya, sejatinya mempunyai wilayah strategis dalam penyelenggaraan KAA sehingga selayaknya diberi porsi lebih oleh Presiden.

"Kan ada kementerian yang mempunyai wilayah strategis, ya mestinya berbagi perannya harus adil," tegasnya kepada *Aktual*, Selasa (21/4) pekan lalu.

Meski begitu, politisi PAN yang juga putra Amin Rais itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab pembentukan kepanitiaan KAA merupakan domain pemerintah. Terpenting, panitia yang sudah ditunjuk bekerja dengan baik dan maksimal.

"Menteri atau kementerian apa yang akan diberikan tanggungjawab, itu Presiden yang mengatur dan memutuskan. (Tapi) kalau ada keluhan dari kementerian lain ya harus didengarkan. Jangan menutup telinga," demikian Hanafi. ■ *Soemitra*



Gedung Merdeka Bocor Panitia KAA Panik



Panitia memanfaatkan alat seadanya untuk membersihkan ruang sidang Konfrensi Asia Afrika yang basah oleh air hujan, Bandung, Senin 18 April 1955.

Roeslan Abdul Ghani (Cak Roeslan) kaget bukan kepalang saat menerima laporan dari pemimpin regu penjaga Gedung Merdeka. “Pak, lapor! Gedung Merdeka bocor. Di bagian ruang sidang pleno. Payah Pak! Basah di mana-mana. Air menggenang di lantai,” kata si pemimpin regu dengan suara gugup.

Kekagetan Cak Roeslan, begitu dia biasa disapa, bukan tanpa alasan. Itu hari Gedung Merdeka tengah menjadi pusat perhatian dunia. Sebab di sanalah untuk pertamakalinya para delegasi dari 29 negara di Asia dan Afrika berkumpul merumuskan nasib bersama. Gedung yang bocor bukan hanya akan mengganggu jalannya sidang, tapi juga bisa mencoreng nama baik Indonesia sebagai tuan rumah. Apalagi Cak Roeslan yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Luar Negeri tengah dipercaya menjadi Sekretaris Konfrensi Asia-Afrika (KAA).

Awan hitam mulai menyelimuti langit Kota Bandung sesaat setelah sidang Konfrensi Asia Afrika (KAA) diskors dari pukul 13.00 siang sampai pukul 15.00 sore. Ketika itu para delegasi KAA baru saja meninggalkan Gedung Merdeka usai mendengar pidato pembukaan dari Presiden Sukarno dan penunjukan aklamasi Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua KAA. Tak terkecuali Cak Roeslan yang kembali ke penginapannya di Hotel Trio. “Begini saya datang di tempat penginapan saya di Hotel Trio, maka sekonyong-konyong hujan turun dengan amat derasnya disertai guntur dan halilintar,” kenang Cak Roeslan dalam *The Bandung Connection*.

Mendengar laporan tak mengenakan itu Cak Roeslan yang sedang santap siang langsung meninggalkan meja makan. Buru-buru dia masuk ke mobil bersama dua orang stafnya (Moh. Sabar dan Alex Marentek) untuk mengecek keadaan. Sesampainya mereka di Gedung Merdeka genangan air

sudah ada di mana-mana. Bocor paling parah ada sisi barat gedung. Air terus mengalir dari atas. “Tempat duduk delegasi bagian barat dan balkan bawah untuk para menteri dan pembesar-pembesar lain basah kuyup. Lantai di bawahnya tergenang air,” kata Cak Roeslan menggambarkan keadaan.

Beruntung para petugas dari Departemen Pekerjaan Umum juga sudah tiba di lokasi. Perkiraan mereka bocor disebabkan genteng yang merosot. Tapi untuk naik ke atas atau juga belum dimungkinkan karena lebatnya hujan. Menjelang pukul 14.00 WIB hujan reda. Beberapa karyawan Departemen Pekerjaan Umum naik ke atap melalui tembok luar sebelah gedung.

Sementara itu Cak Roeslan dan belasan petugas lain berjuang keras mengeringkan area dalam gedung yang basah terkena air. Memanfaatkan alat seadanya, berbagai cara mereka lakukan agar Gedung Merdeka kembali layak digunakan untuk bersidang. “Sambil melepaskan celana, jas, kemeja, kaos kaki, sepatu, dan hanya mengenakan celana dan kaos dalam saja kami semua mengepel lantai, mengeringkan kursi-kursi dan meja-meja dengan goni-goni dan lap-lap yang dapat menyerap air,” cerita Cak Roeslan.

Selama proses pembersihan ini Gedung Merdeka ditutup rapat. Tujuannya agar tidak ada delegasi yang tiba-tiba masuk ke dalam. Setelah berjuang selama 45 menit Gedung Merdeka akhirnya bersih dan kering seperti sedia kala. Para panitia KAA bisa bernapas lega. “Coba pikirkan bagaimana malu kita andai kata sampai ada delegasi yang mengetahui apalagi para wartawan luar negeri,” kata Cak Roeslan.

Selama KAA berlangsung Cak Roeslan tidak pernah melaporkan peristiwa bocornya Gedung Merdeka kepada Ketua Panitia KAA Ali Sastroamidjojo. Baru setelah acara KAA berakhir sukses peristiwa itu dia laporan kepada Ali. “Semula beliau (Ali) merengut tetapi kemudian tertawa tentang laporan mobilisasi ngligo kita dengan celana dan kaos dalam saja,” ujar Cak Roeslan. ▀

Jay Akbar (Alumnus Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro)

Cara Kolombia Menangkis Tekanan Isu HAM

Sekitar 7,2 juta orang tercatat sebagai korban setelah 50 tahun perseteruan abadi antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).

Presiden Juan Manuel Santos yang terpilih lagi pada 2014 lalu membuat terobosan penting untuk menyelesaikan konflik setengah abad yang tidak kunjung selesai itu. Dia meminta pemerintah dan FARC duduk bersama. Kembali bersatu, mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional agar Kolombia tidak lagi menjadi bulan-bulanan kepentingan asing.

Mereka akhirnya sepakat membentuk sebuah tim independen untuk mencatat dan mendokumentasikan sejarah konflik. Dalam kerangka besar bingkai perdamaian dan rekonsiliasi di Kolombia, ternyata mereka bisa bertemu dan berbagi cerita sejarah apa adanya.

Tim yang terdiri dari beberapa pakar itu akhirnya menyelesaikan tugasnya. Sebuah *report* berupa dokumen setebal sekitar 800 halaman itu benar-benar memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi selama 50 tahun konflik. Dokumen itu mampu menjelaskan secara *clear*: siapa saja yang harus bertanggung jawab atas 7,2 juta orang korban konflik bersenjata antara pemerintah dan pemberontak.

Yang menarik, dan ini patut diapresiasi. Dokumen itu ternyata tidak hanya berkutat menyalahkan pemerintah dan pemberontak. Namun peran besar asing (Amerika Serikat) juga terkuak dengan jelas. *"The US has actively supported Colombia's armed forces in trying to combat drug trafficking, and leftist rebel groups like the FARC and ELN*



Foto atas: Juan Manuel Santos

Foto kanan: Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4).

that have been deeply involved in the drug trade to finance their war against the Colombian state, seperti ditulis di laman *latino.foxnews.com* (7/4).

Namun, yang paling menarik perhatian internasional adalah soal kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum militer AS. Dukumen itu mencatat ada sekitar 2004 kasus kekerasan seksual terjadi. Ada kasus juga dimana seorang anak perempuan diperkosa tentara AS di sekitar kantor kontraktor militer milik AS, lalu *"and sold the films as pornographic material."*

Yang membuat sakit rakyat Kolombia adalah ketika pengadilan di Kolombia tidak bisa menahan pelaku kekerasan seksual tersebut karena alasan pelaku memiliki hak imunitas diplomatik. *"There exists abundant information about the sexual violence, in absolute impunity thanks to the bilateral agreements and*



the diplomatic immunity of United States officials", demikian disebut dalam dokumen tersebut.

Lalu, apa makna penting dokumen itu?

Bagi rakyat Kolombia, dokumen itu menjelaskan secara jelas bahwa bukan hanya pemerintah Kolombia (baca: negara) dan FARC yang salah dan yang harus bertanggungjawab. Tapi Amerika Serikat juga harus bertanggungjawab atas konflik multidimensional itu.

Bagi pemerintah Kolombia, dokumen itu menjadi tonggak penting untuk membangun Kolombia ke depan. Perdamaian akan memudahkan pemerintah, kelompok pemberontak dan rakyat secara bersama untuk membangun



Kolumbia menjadi negara yang berdaulat, damai dan sejahtera.

Untuk kepentingan geopolitik negara-negara di kawasan Amerika Latin, dokumen ini bisa menjadi contoh penting untuk menyelesaikan beberapa konflik menahun antara pemerintah dan oposisi (pemberontak) yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin di luar Kolombia. Terutama, konflik yang dibelakangnya ada kepentingan Amerika Serikat.

Memang, akhirnya, Presiden Juan Manuel Santos dan kelompok FARC sepakat bahwa dokumen ini akan jadi modal penting negara untuk bahan negoisasi, diplomasi dan ‘melawan’ tekanan Amerika Serikat soal beberapa isu di Kolombia dan Amerika Latin.

Apa pentingnya buat Indonesia?

Ingat, ada beberapa masalah HAM di Indonesia yang tidak pernah selesai secara tuntas mulai dari G30S PKI, Papua, Timor Timur, Mei 1998 sampai Munir.

Seyogyanaya, Pemerintah harus mulai memikirkan agar cara Presiden Juan Manuel Santos itu bisa terjadi di Indonesia. Artinya, pemerintah harus mampu meyakinkan semua pihak bahwa penyelesaian HAM besar di Indonesia semangatnya bukan untuk mencari kesalahan. Namun untuk menjelaskan ke rakyat apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada lagi upaya untuk menutup-nutupi.

Ini penting, Jangan sampai penyelesaian kasus HAM justru berujung saling menyalahkan antara negara dan rakyat. Saling cakar-

cakaran antara pemerintah dan rakyat. Harus bisa dijelaskan juga, peran besar asing di setiap kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Baik di kasus G30S PKI, kasus Papua Merdeka sampai kasus Mei 1998.

Rakyat harus paham apa sebenarnya yang terjadi. Bahwa beberapa masalah HAM besar yang terjadi di Indonesia ternyata tak lepas dari peran dan intervensi asing.

Kalau keterlibatan asing juga mampu dijelaskan juga dengan *clear*, maka penyelesaian kasus-kasus HAM dan rekonsiliasi mungkin bisa terjadi dengan lancar. Dan bisa jadi modal diplomatik bagi pemerintah untuk berjuang di tingkat internasional.

Akankah ini bisa terjadi? ■

Andy Abdul Hamid, Zaenal Arifin

Kawasan Timur Tengah seolah-olah memang tak pernah lepas dari konflik, perang, dan kekerasan. Sesudah perang saudara di Suriah yang berlarut-larut, muncul aksi militer Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Terakhir, koalisi negara Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir kelompok Houthi di Yaman. Semua ini sempat menenggelamkan isu lama di dunia Arab: penjajahan Israel atas Palestina.

Untunglah, isu kemerdekaan Palestina terangkat kembali dari lokasi yang tak terduga: Bandung, Jawa Barat. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, April 2015, telah mengangkat kembali isu Palestina. Isu kemerdekaan Palestina sebetulnya sudah disuarakan sejak KAA 1955 di Bandung, namun sampai saat ini rakyat Palestina masih dijajah oleh Israel dan negara Palestina merdeka belum berdiri.

Tak heran, jika Presiden Joko Widodo pada 20 April 2015 di Jakarta mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama Asia Afrika masih memiliki satu kewajiban untuk dipenuhi, yaitu memastikan negara Palestina merdeka. "Saya kira Konferensi Asia Afrika juga masih berutang selama enam dasawarsa pada rakyat Palestina. Indonesia maupun negara-negara lain yang tergabung dalam kerjasama Asia Afrika harus terus menyuarakan dukungan atas kemerdekaan Palestina."

Persoalannya, meski tidak ada pemberitaan media yang gegap gempita seperti kasus pembantaian oleh ISIS atau konflik Yaman, sebetulnya penindasan Israel terhadap rakyat Palestina terus berlangsung. Penjajahan itu berwujud 'lengkap'. Bukan cuma Israel mendominasi secara militer, tetapi negara Zionis Yahudi itu juga 'mencekik' Palestina secara sosial-ekonomi dan keuangan. Bahkan pertarungan juga masuk ke ranah hukum.



Semangat Baru Membela Palestina

Berbagai krisis di Timur Tengah sempat menenggelamkan isu Palestina. Kelompok Zionis pun memainkan isu hukum untuk membangkrutkan Palestina. Namun, forum Konferensi Asia Afrika di Bandung mengangkat kembali dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

Tuntutan Kejahatan Perang

Kini organisasi-organisasi Israel sayap kanan diam-diam meningkatkan "perang legal" terhadap kepemimpinan Palestina, dalam upaya untuk menekan Otoritas Palestina agar tidak mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court).

Kasus terakhir terhadap warga Palestina, yang diajukan di Amerika, memberi ancaman hukuman penjara panjang dan ganti rugi berat terhadap para pemimpin Gerakan Perlawan Islam di Palestina (Hamas), termasuk Khaled Mashal. Mereka dianggap 'bersalah' karena terjadinya penutupan satu-satunya bandara internasional Israel selama serangan Israel ke Gaza, musim



panas 2014.

Tuntutan itu mengikuti keputusan dewan juri pengadilan di New York pada Februari 2015, untuk menimpakan ganti rugi kerusakan senilai 218 juta dollar AS pada Otoritas Palestina, bakal pemerintah Palestina di daerah pendudukan. Kampanye hukum yang mengeksplorasi celah undang-undang anti-terorisme, yang dirumuskan secara longgar di AS, tampaknya dirancang untuk menggerogoti habis cadangan finansial Otoritas Palestina, dan mengucilkannya dari pendanaan baru di kawasan itu.

Komentar-komentar dari Shurat HaDin, sebuah kelompok hukum yang memprakarsai aksi terhadap Otoritas Palestina, mengindikasikan bahwa niat kelompok pro-

Seorang pengunjuk rasa Palestina dan seorang aktivis perdamaian asing (kanan) saling berpegangan tangan di antara seorang tentara Israel saat aksi protes memperingati Hari Tahanan Palestina di desa Maasara, sebelah selatan Bethlehem, Palestina, Jumat (17/4).

Israel ini adalah untuk menekan lembaga-lembaga Palestina ke arah keruntuhan. Tujuannya ada dua: untuk melemahkan usaha-usaha yang melawan pendudukan Israel, dan untuk menghancurkan setiap peluang bagi terbentuknya negara Palestina.

Pada Desember 2014, ketika kasus Otoritas Palestina dibuka, direktur Shurat HaDin, Nitsana Darshan-Leitner memperingatkan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan "ketidakstabilan finansial" bagi pihak Palestina. Ia menambahkan, hukuman finansial yang keras akan menjadi ujian bagi kesiapan Otoritas Palestina untuk menjadi negara. "Jika mereka ingin membentuk sebuah negara, mereka harus menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya."

Ganti rugi 218 juta dollar AS dan sanksi-sanksi sejenis, yang mungkin disetujui oleh juri-juri pengadilan AS di masa depan, secara potensial dapat membangkrutkan Otoritas Palestina. Para pejabat Palestina sudah memperingatkan bahwa Otoritas Palestina menghadapi problem keuangan yang parah, sesudah Israel baru-baru ini menahan jutaan dollar perolehan pajak, yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina.

Keterkucilan secara finansial Lembaga-lembaga Palestina juga menghadapi risiko keterkucilan secara finansial, sesudah kelompok-kelompok legal Israel meraih sukses di Amerika dalam kasus hukum menghadapi sebuah bank Timur Tengah terkemuka. Kasus hukum ini menciptakan preseden buruk bagi kepentingan Palestina. Pada September 2014, dewan juri di pengadilan Amerika menyatakan bahwa Arab Bank yang berbasis di Jordania secara hukum

bertanggungjawab atas 24 serangan, yang disalahkan pada Hamas sebagai pelaku, di mana warga AS terluka atau terbunuh. Bank itu ditunjukkan telah melakukan sejumlah transaksi ke rekening milik anggota Hamas.

Seorang hakim federal di Brooklyn mempertahankan keputusan juri itu, walaupun bank tersebut sudah menunjukkan ia mematuhi praktik-praktik industri perbankan yang standar. Pintu sekarang terbuka bagi sekitar 300 korban dan kerabat mereka untuk mengklaim ganti rugi, yang tampaknya akan mencapai ratusan juta dollar AS.

Arti penting yang lebih luas akibat keputusan itu adalah bahwa ia tampaknya akan membuat sebagian besar bank khawatir beroperasi di kawasan Palestina yang diduduki Israel. Bank-bank ini takut berurusan dengan rekening-rekening, yang mungkin di masa depan akan ditunjukkan dimiliki oleh warga Palestina yang terlibat dalam serangan-serangan terhadap Israel. Ada kasus-kasus serupa yang belum diputuskan terhadap beberapa bank lain, termasuk Bank of China, Credit Lyonnais, dan salah satu unit Royal Bank of Scotland.

Banyak dari kasus-kasus terakhir di Amerika, yang diajukan oleh organisasi-organisasi Israel, sebagian besar kurang diperhatikan. Hal ini karena perhatian dunia lebih terfokus pada usaha-usaha Palestina untuk menggunakan langkah hukum terhadap Israel, terkait kejahanatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Pada April 2015, Otoritas Palestina menjadi anggota resmi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Pihak Palestina diperkirakan akan meminta mahkamah internasional Hague, untuk menyelidiki pejabat-pejabat Israel atas tuduhan melakukan kejahanatan perang. Kejahanatan perang yang dimaksud itu adalah agresi militer yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza pada musim panas 2014, serta kejahanatan perang yang diasosiasikan dengan

pembangunan permukiman Yahudi ilegal selama puluhan tahun di daerah pendudukan.

Para pemimpin Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menuduh Otoritas Palestina melakukan apa yang mereka sebut "perang hukum" ketimbang negosiasi-negosiasi damai. Pada Januari 2015, Netanyahu mengumpulkan para penasehat hukum untuk membantu merancang strategi untuk mendiskreditkan ICC. Netanyahu mengatakan, investigasi kejahatan perang terhadap Israel adalah "absurd" dan sebuah "pemelintiran keadilan" (perversion of justice).

Netanyahu khawatir, investigasi-investigasi itu akan "mendelegitimasi" Israel dan membuat pejabat-pejabat Israel makin sulit untuk bepergian ke luar negeri, di mana mereka mungkin akan ditangkap.

Didanai Tokoh Kasino AS

Gilead Sher, seorang pengacara dan mantan penasihat pemerintah Israel, baru-baru ini berkomentar bahwa "pemunculan front hukum" oleh pihak Palestina adalah tidak lebih dari perluasan medan pertempuran. "Pendekatan Palestina didasarkan pada teori perang total, yang melibatkan upaya-upaya hukum yang dikombinasikan dengan manipulasi media massa, diplomasi aktif, provokasi, boikot-boikot, dan sanksi-sanksi," ujarnya.

Namun kenyataannya, justru organisasi-organisasi Israel yang hingga saat ini jauh lebih efektif dalam melakukan "perang hukum" ketimbang pihak Palestina. Pesan dari Sher dan yang lain bahwa Israel tidak bisa bersikap pasif, dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius bagi Shurat HaDin, yang memiliki ikatan erat dengan kelompok kanan Israel.

Pada 2012, direkturnya, Darshan-Leitner, memenangkan Penghargaan Moskowitz untuk Zionisme, sebuah penghargaan yang didanai oleh tokoh kasino AS yang kaya dan berkuasa,



Irving Moskowitz. Moskowitz telah menginvestasikan jutaan dollar AS untuk mendukung permukiman ilegal Yahudi di daerah Palestina yang diduduki.

Selain tindakan sipil menyerang Otoritas Palestina dan Hamas lewat pengadilan AS baru-baru ini, Shurat HaDin juga memanfaatkan forum ICC secara langsung untuk kepentingan Israel. Pada September 2014, para pengacaranya mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Mashal, dengan melibatkannya dalam eksekusi-eksekusi Hamas terhadap tersangka kolaborator Israel, selama agresi Israel ke Gaza tahun 2014.

Dua bulan kemudian, kelompok Israel itu mengajukan tuntutan kedua, kali ini terhadap Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, atas serangan-serangan yang dituduhkan dilakukan oleh gerilyawan loyalis Fatah dari Gaza. Lebih jauh, pada Januari 2015, kelompok Zionis ini mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, mantan ketua dinas keamanan Palestina Jibril Rajoub, dan pimpinan intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj.

Dalam suatu wawancara, Desember 2014, Darshan-Leitner mengatakan, aksi-aksi Shurat HaDin di ICC dimaksudkan sebagai peringatan kepada kepemimpinan Palestina. "Untuk memberitahu mereka bahwa mereka sedang

bermain api... Pada saat mereka bergabung (dengan ICC), permainan berakhir. Ini akan seperti tembakan penembak jitu," tegasnya.

Bagaimanapun, proses di ICC diperkirakan akan bergerak lambat. Sebagian besar pengamat meyakini, masih sangat kecil kemungkinannya --baik bagi pemimpin Israel maupun Palestina-- menghadapi investigasi yang serius terhadap mereka. Shurat HaDin karena itu maju terus dengan aksi-aksi sipil yang lebih sederhana dan lebih cepat di Amerika, dengan mengeksplorasi fakta bahwa sebagian Yahudi Israel juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat dan bisa menuntut keadilan di pengadilan AS.

Undang-undang anti-teror

Kelompok Zionis ini juga memanfaatkan sekitan undang-undang anti-teror AS, khususnya yang diberlakukan sejak terjadinya serangan teroris ke gedung World Trade Center, New York, dengan menjadikan pejabat-pejabat Palestina sebagai sasaran tuntutan.

Dalam kasus penutupan bandara Ben Gurion, Israel, selama 24 jam lebih pada Juli 2014, Shurat HaDin memanfaatkan undang-undang yang memberi ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda berat bagi siapapun yang membahayakan keselamatan warga negara AS di sebuah bandara internasional.

Komplain itu, yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, mengklaim bahwa 26 warga AS telah dipaksa untuk pergi ke tempat perlindungan bom, sesudah sebuah roket dari Gaza jatuh dekat bandara. Sebagai akibatnya, otoritas penerbangan federal AS melarang maskapai penerbangan AS lepas landas dari Ben Gurion, dan beberapa penerbangan AS yang menuju Israel

Foto kiri: Irving Moskowitz

Foto kanan: Dua gadis Palestina bermain di rumah mereka, yang menurut saksi mata rusak akibat serangan Israel selama pertempuran 50 hari musim panas lalu di Khan Younis, selatan Jalur Gaza, Selasa (10/3).

telah dialihkan ke negara-negara lain.

Keuntungan bagi kelompok-kelompok legal Israel dengan mengajukan tuntutan di pengadilan AS adalah mereka dapat menuntut berdasarkan standar pembuktian yang relatif rendah yang dipersyaratkan di kasus-kasus sipil. Mereka menghindari standar pembuktian yang ketat di mahkamah internasional di Hague.

Para pengacara Israel juga bisa mengandalkan simpati, yang mudah diraih dari para juri dan hakim AS, yang sering menyamakan Arab dan Islam dengan teror. Ini masih didukung oleh media dan budaya politik yang sering mengangkat “penderitaan orang Yahudi,” seraya mengecilkan dan menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina, yang puluhan tahun ditindas oleh militer Israel dan pemukim Yahudi.

Bukan baru sekali ini saja Shurat HaDin berpartisipasi dalam penindasan terhadap Palestina. Pada Mei 2011, Shurat HaDin --yang bekerjasama dengan pemerintah Israel-- menggagalkan pengiriman kapal-kapal bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza. Organisasi Zionis itu mengirim surat ke perusahaan asuransi dan satelit, dan mengancam mereka dengan tuntutan hukum berdasarkan undang-undang AS karena menawarkan layanan

terhadap kapal-kapal itu. Shurat HaDin juga mengupayakan kasus-kasus hukum di AS terhadap negara-negara Timur Tengah, yang dianggap bersekutu dekat dengan organisasi-organisasi Palestina.

Tuntutan kelompok Zionis ini memang terkesan artifisial dan ironis, jika melihat fakta bahwa justru rakyat Palestina yang menjadi korban nyata kebrutalan militer Israel, sehingga mereka yang seharusnya paling patut mengajukan tuntutan hukum. Laporan yang dikeluarkan oleh Defence for Children International-Palestine (DCI-Palestine) dan sudah diverifikasi secara independen, mencatat tewasnya 547 anak Palestina selama 55 hari agresi militer Israel ke Gaza tahun 2014.

Israel membunuh anak-anak

Dari angka itu, sedikitnya 535 anak yang tewas adalah “akibat langsung dari serangan Israel.” Sedangkan, “hampir 68 persen dari anak-anak yang terbunuh oleh militer Israel selama Operation Protective Edge itu berusia 12 tahun atau lebih muda,” kata laporan itu. Dari jumlah di atas, 164 anak terbunuh oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) Israel. “Ada bukti dalam beberapa kasus yang mengisyaratkan bahwa pasukan Israel secara langsung mengarahkan dan secara di luar

hukum membunuh anak-anak lewat rudal-rudal yang diluncurkan oleh drone,” kata laporan DCI-Palestine.

Diperkirakan, 1.000 anak di Gaza menderita cacat atau disabilitas permanen selama agresi militer Israel. Operation Protective Edge adalah agresi yang paling lama dan paling berdarah dari tiga ofensif militer Israel di kantong pesisir sempit Gaza, sejak Israel melancarkan Operation Cast Lead selama tiga minggu pada Desember 2008.

Menghadapi manuver licin dan brutal Israel, yang menghalalkan segala cara untuk mencegah berdirinya negara Palestina, langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sudah tepat. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi di sela-sela peringatan KAA, Indonesia akan selalu bersama bangsa Palestina untuk merebut kemerdekaan Palestina.

Dalam pertemuan bilateral Jokowi dengan PM Palestina Rami Hamdallah, Jokowi menyatakan keinginan untuk membuka Konsulat Jenderal RI di Ramallah, Tepi Barat. Langkah ini diyakini Jokowi akan memudahkan upaya Indonesia membantu Palestina meraih kemerdekaan. “Kita sudah menyampaikan ide itu dan PM Palestina Rami Hamdallah mendukung,” ujar Jokowi.

Rami Hamdallah mengatakan optimistis bahwa langkah Indonesia itu akan diikuti oleh negara-negara lain. “Kami masih percaya bahwa dunia internasional menginginkan Palestina menjadi negara merdeka,” tegasnya.

Rami juga meminta Indonesia meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Merespons permintaan itu, kata Jokowi, Indonesia mempertimbangkan pembebasan pajak barang-barang dari Palestina. “Kalau mereka memang membutuhkan insentif pajak, kami akan memenuhinya,” ucap Jokowi. Bagi Indonesia, masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. ▀

Satrio Arismundar (Dilolai dari berbagai sumber)





Kader PDI Perjuangan Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, dicokok Kodim 0826/Pamekasan setelah ketahuan melakukan pesta narkoba jenis sabu. Pesta narkoba digelar dirumahnya, Bandaran, Kecamatan Tlanakan, bersama rekan-rekannya.

"Tersangka bernama Juanda Cahyono (42) warga Dusun Umbul II, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan," kata Komandan Kodim 0826/Pamekasan Letkol Arm Mawardi di Pamekasan, Minggu (26/4).

Juanda Cahyono merupakan kader PDI Perjuangan dan pada pemilu legislatif 2015. Ia tercatat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019 nomor urut 1. Pria maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) I

Tegakkan Hukum, Tokoh Baduy Berpesan ke Jokowi

Tetua Adat Masyarakat Baduy Daenah mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan hukum seadil-adilnya demi menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Daenah mengingatkan demikian sehubungan dengan rencana eksekusi mati beberapa gembong narkoba.

Selama ini, dibawah kepemimpinan Jokowi proses penegakan hukum terhadap obat-obatan terlarang cukup baik. Akan tetapi, ia menyatakan tantangan ke depan sangat besar. Terlebih dengan adanya intervensi asing dalam proses eksekusi tahap kedua. Khususnya eksekusi terhadap warga Australia dan Perancis.

"Kita berharap penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Jadi Pengedar, Politikus PDI Perjuangan Gelar Pesta Narkoba

yang mencakup Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan.

Diungkapkan Dandim Mawardi, Juanda ditangkap tim unit Intel Kodim 0826/Pamekasan di rumahnya, di Bandaran, Kecamatan Tlanakan. Selain menangkap tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 bong, seperangkat alat hisap, 1 botol alkohol, 1 pocket plastik bungkus sabu bekas pakai, 1 bendel plastik klip dan 1 unit telepon seluler milik tersangka.

"Petugas baru berhasil menangkap si Juanda ini, sedangkan temannya yang ikut dalam pesta narkoba itu kabur," katanya.

Teman Juanda yang berhasil kabur dalam penggerebekan pesta narkoba yang dilakukan politikus PDI Perjuangan itu, menurut Dandim, masing-masing diketahui bernama Edy, Donny, Agus dan Nur Hasan.

Kepada petugas, Juanda mengaku, sebelum ditangkap ia memang memenuhi pesanan sejumlah temannya untuk mendapatkan barang haram tersebut. Kala itu, temannya yang bernama Nanang, memesan agar

disediakan 1 pocket narkoba jenis sabu seharga Rp200 ribu.

"Saya beli dari teman di Desa Sejati yang bernama Sugik," katanya.

Dari hasil penangkapan itu, petugas mengendus bahwa politikus PDI Perjuangan yang tertangkap pesta narkoba di rumahnya di Desa Bandaran itu, bukan hanya pemakai, akan tetapi juga pengedar.

Menurut Dandim, bukti peran Juanda sebagai pengedar berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa yang bersangkutan mendapat pesanan dari temannya untuk membeli narkoba.

"Jadi dia ini bukan sekadar sebagai pemakai, akan tetapi juga selaku pengedar," terang Dandim.

Sementara, Juanda juga meminta agar petugas tidak hanya menangkap dirinya, akan tetapi juga temannya yang bernama Nanang yang telah memesan narkoba jenis sabu itu untuk pesta di rumahnya di Desa Bandaran.

"Kalau tidak ada pesanan dari si Nanang itu, kata dia, kami tidak akan pesta narkoba di rumah," terang Juanda. /Ant-Ismed Eka Kusuma

juga di daerah.

Sebab itu, ia berpesan agar pejabat pemerintah, politisi maupun pengusaha tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Seperti tindak pidana korupsi karena dampaknya membuat rakyat sengsara dan bisa menimbulkan kemiskinan.

Ia menyinggung bagaimana masyarakat Baduy hidup penuh kedamaian, kenyamanan dan keharmonisan dengan warga lainnya. Selain itu juga warga Baduy hingga kini belum ada tindakan melanggar hukum, diantaranya kejadian maupun pencurian.

"Kami merasa nyaman hidup dan damai dengan menikmati hasil pertanian, karena penegakan hukum itu cukup baik sehingga tidak ditemukan lagi kerusakan hutan lindung," katanya. /Ant-Ismed Eka Kusuma



Kami sebagai masyarakat adat tentu mendukung hukuman mati itu," kata Daenah di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (26/4).

Ditekankan dia, penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Adil secara keseluruhan, bukan hanya di tingkat pusat, namun

Keluarkan Sabdaraja, Nama Sri Sultan HB X Akan Berubah

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, akan segera mengajukan perubahan nama dirinya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Seperti diketahui, Sri Sultan pada Kamis (30/4/2015) mengeluarkan Sabdaraja di Setihinggil. Di lokasi yang sama, pada 7 Maret 1989 ia dinobatkan sebagai Raja. Acara adat ini, juga dihadiri para kerabat Keraton, sang Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, para sentono dalem, dan abdi dalem.

Namun tak dihadiri sejumlah keluarga Keraton, antara lain GBPH Yudhaningrat, GBPH Prabukusumo, GBPH Condrodiningrat. Begitupula KGPA Sri Paduka Paku Alam IX. Pangeran yang hadir yaitu KGPH Hadiwinoto.

Menurut penuturan salah satu kerabat Keraton yang hadir di Setihinggil, saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/5/2015) mengutarakan, prosesi pembacaan Sabdaraja ini mirip dengan prosesi saat Sultan naik tahta. Sultan mengenakan pakaian keprabon (kebesaran), namun tidak memakai kuluk hitam melainkan memakai kuluk biru.

Ia mengutarakan, dalam Sabdaraja, Sultan menegaskan bahwa ini merupakan perintah Raja yang tidak boleh dibantah. Ada lima hal penting yang disampaikan, di antaranya mengenai perubahan gelar dan perubahan paugeren.

Antara lain penyebutan Buwana akan diubah menjadi Bawana. Dalam gelar Kasultanan tidak lagi menggunakan Khalifatullah. Kemudian penyebutan Kaping Sedasa diubah menjadi Kaping Sepuluh. Selanjutnya, akan mengubah perjanjian antara pendiri Mataram

Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring. Terakhir, Sultan akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

“Buwono itu maknanya ya jagat raya, kalau Buwono ya saya tidak tahu maknanya. Kalau keris Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun merupakan simbol pewaris tahta, kalau Kanjeng Kyai Ageng Kopek itu pusaka saat Sultan sudah bertahta,” kata kerabat Keraton bergelar Kanjeng Raden

Tumenggung ini.

Saat Sultan HB X naik tahta, ia memeroleh gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

Gelar ini juga sudah tercantum dalam Ketentuan Umum Undang Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 1 nomor 5. Yang berbunyi bahwa Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin seorang Sultan dengan gelar tersebut di atas.

Sementara itu, saat ditemui wartawan dalam sebuah acara di Grha Sabha Pramana (GSP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (1/4/2015), Sultan menegaskan bahwa dirinya akan mengajukan perubahan nama tersebut ke Mendagri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sejumlah pihak terkait.

“Saya akan lapor ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan sebagainya, bukan untuk pers (publik). Nanti saya lapor dulu (ke Mendagri terkait perubahan nama gelar),” katanya dengan nada tinggi.

Ia juga menegaskan bahwa laporan ke Mendagri tersebut berkaitan dengan perubahan nama gelar Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang otomatis Gubernur DIY.

“Itu mengubah, ada nama yang berubah,” kata Sultan.

Massa: Sumut Sudah Dikuasai Kapitalis

Ratusan petani Ramunia bersama mahasiswa, pedagang dan sejumlah elemen masyarakat Medan menyebut daerah Sumatera Utara saat ini sudah dikuasai oleh kaum kapitalis. Mereka menyatakan demikian saat menggelar orasi di Bundaran Majestyk, Jalan Gatot Subroto, Medan (18/4).

“Mereka (kaum kapitalis) sudah menguasai dari pemerintahan, sementara rakyat semakin tertindas. Kapitalis bisa membeli pejabat-pejabat di Sumut,” kata salah seorang orator dalam aksinya.

Kekuatan kapitalis dimaksud, merujuk pada tindakan aparat TNI saat membubarkan posko petani. Akan tetapi, sikap represif tentara ini tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah bersama aparatnya lebih ‘peduli’ dengan kepentingan pemodal di Sumut.

“TNI sudah bertindak semena-mena, membubarkan posko petani. Dimana lagi kami menuntut keadilan, sementara kalian (Pemerintah) hanya mendengarkan pengembang dan pemodal di Sumut,” tandasnya.

Lundu Sinurat, orator perwakilan GMKI mengatakan, tindakan oknum TNI yang membubarkan petani yang selama ini menggelar aksi menginap di depan kantor DPRD Sumut sangat disesalkan. Apalagi aksi tidak manusiawi itu dilakukan dihadapan pejabat tertinggi di Sumatera Utara.

“Pangdam tidak menghormati Gubernur Sumut,” kata dia.

Menurut Lundu, konflik antara Kodam I Bukit Barisan dan petani Ramunia menunjukkan institusi TNI tidak konsisten dalam program swasembada pangan yang digadang-gadang selama ini. Menurutnya, lahan perkebunan Ramunia yang selama ini menjadi lokasi pertanian akan dijadikan lahan properti.

“Tidak konsisten dalam ketahanan pangan. Lahan perkebunan Ramunia akan dijadikan lahan properti,” tegasnya. /Damai Mendoña, Tri Harningsih



Senyaman Bokong Hitam Mugabe

Dhia Prekasha Yoedha

Peringatan 60 tahun Konperensi Asia Afrika tanggal 24 April di Bandung baru berlalu. Bukan soal nostalgia atas prestasi puncak bangsa-bangsa Asia Afrika yang melahirkan prinsip mulia perdamaian dan kerjasama dunia berupa Bandung Spirit dalam Dasa Sila Bandung. Bukan pula wacana antidiskriminasi yang disuarakan para peserta yang memperingati momen dahsyat kebulatan tekad peserta KAA dari dua benua besar di Bandung tahun 1955.

Itulah tekad melawan kolonialisme dan segala bentuk penindasan atas nama ras, agama, ideologi, maupun berbagai elemen pembeda, yang berkobar semasa itu. Tekad yang kelak membentuk Gerakan Nonblok pada tahun 1961. Semua masih segar dalam ingatan penduduk sejagad masa itu, mengingat penduduk di empat benua (dalam konteks ini Australia bukan tergolong benua) baru 10 tahun merayakan usainya Perang Dunia II yang menelan jutaan jiwa manusia di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika.

PD II seperti pula PD I, sesungguhnya bukan peperangan antar Negara Fasis melawan Negara Bebas sebagaimana didengang-dengungkan pihak Sekutu pemenang PD II? Karena PD II sesungguhnya perang antar sesama Negara Kolonialis Eropa, Amerika, dan Asia, yang bernafsu serakah memperebutkan wilayah koloni kaya sumber daya alam di benua Asia dan Afrika?

Wajar jika semangat peserta KAA saat itu patut dipujikan. Meski saat ini terkesan didegradasikan jadi sekedar rasa kesal atas diskriminasi atau antirasialisme. Tidak ada lagi dinamika kegusaran ideologis atas penindasan kolonialisme imperialisme yang melecehkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiada lagi perspektif tajam yang menguliti kelicikan neokolonialisme imperialiasme yang diotaki oleh keserakahkan kapitalisme berjubah liberalisme dan internasionalisme (baca: globalisme) yang semakin menghegemoni negara-negara dunia ketiga atas nama kesetaraaan hak ekonomi setiap negara (para kapitalis eks kolonialis).

Yang menarik malah di dunia maya, para netizen sempat tertegun, saat banyolan satiris

yang konon berasal dari peringatan 60 tahun KAA beredar dari pesan bbm dan status di whatsapp. Konon itu dipetik dari pidato Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, yang juga Ketua Uni Afrika.

Kutipan itu dimulai dengan: *Racism will never end as long as the white car was still using black tires. Racism will not end as long as we still wash white clothes first, than others. Racism will never end if people still use black to symbolize bad luck and WHITE for peace ! Racism will never end if people still wore white to the wedding and the black clothes to funeral.*

Lalu dilanjutkan: *Racism will never end as long as those who do not pay their bills is a black list and not white list. Even when playing snooker, you have not won until you drown black ball and white ball must remain in the field.*

Terlepas benar atau tidak ini berasal dari Mugabe atau bukan, kutipan itu adalah realitas yang mewakili sikap pongah kaum putih atas kaum berwarna, khususnya hitam. Kepongahan nilai hidup yang disosialisasikan dengan memproduksi simbol berpersepsi tunggal sesuai tradisi Barat yang diglobalisasikan ke berbagai aspek kehidupan. Mulai dari ranah otomotif, gaya hidup, perabot rumah tangga, sistem perbankan, maupun hobi permainan.

Sehingga saking kita tak berdaya lagi, secara sarkas "Mugabe" menutupnya dengan: *But it's OK, as long as I still use the WHITE paper tissue cleaning toilet for cleaning my BLACK butt, I'm still fine!!.* (Tapi, biarlah. Selama aku masih gunakan kertas PUTIH tisu toilet untuk menceboki pantat HITAMKU, Aku masih nyaman!!)

Di tengah ketidakberdayaan ditindas rasialisme yang sekaligus berwatak kapitalistik dalam peradaban modern ini, kita masih "diberi" simbol rasa nyaman.

Mungkin itu pula yang membuat Presiden Jokowi "agak nyaman" dalam kebingungan mewujudkan janji kampanye Nawa Cita dari kepungan Neo Lib. Namun Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, ajaran Bung Karno itu bukan tisu toilet. ■ Dhia Prekasha Yoedha

Come and indulge yourself with 38 days of
fabulous shopping and entertainment...
only at **Jakarta Fair Kemayoran 2015.**

Enjoy great bargains on just about everything you need...
Traditional Indonesian handicraft, gemstones,
home appliances, electric and electronic gadgets,
lifestyle equipment and many many more...
Don't give a miss to our non - stop music concerts
for 38 days!!

48



JAKARTA
FAIR
KEMAYORAN
2015

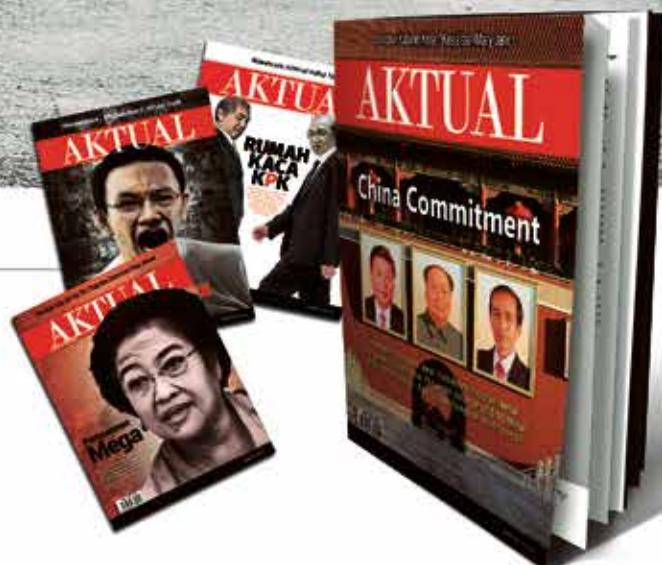


Arena
JIExpo
29th May
to
5th July
2015

The Biggest, The Longest, and The Most Complete Fair

AKTUAL

Berani
Beda
Karena
Benar



Info Dan Pemasaran :

📞 0812 1882 9528 (Marketing)
✉️ iklan@aktual.co
marketing@aktual.co